

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pembagian kewenangan (power sharing) dan pembagian keuangan (financial sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri terutama dalam pengelolaan urusan rumah tangga dan pengelolaan keuangan.

Pemerintah Provinsi Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur Papua menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR Papua berupa Laporan Keuangan tahun 2023 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua telah disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
4. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
6. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRP.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-4100 Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
33. Peraturan Gubernur Papua Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
34. Peraturan Gubernur Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 1; dan
35. Peraturan Gubernur Papua Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan
- 4.2 Prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)
- 5.5 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.6 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
TAHUN 2023

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD yang terdiri dari ikhtisar kinerja pendapatan daerah dan ikhtisar kinerja belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

3.1.1 Ikhtisar Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Ikhtisar Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Papua berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 dengan menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp3.643.143.738.502,00 merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

2. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp3.733.670.617.987,09 atau 102,48% dari yang ditargetkan sebesar Rp3.643.143.738.502,00 atau melampaui target sebesar Rp90.526.879.485,09 atau 2,48%. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Papua yang baik dan efektif.

3. Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp Rp3.733.670.617.987,09 terdiri dari:

- a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp118.965.783.036,85 dari anggaran sebesar Rp179.707.956.117,00 atau 66,20%, atau tidak mencapai target sebesar Rp60.742.173.080,15 atau (33,80%);
- b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp3.591.647.545,00 dari anggaran sebesar Rp920.000.000,00 atau 390,40%, melampaui target sebesar Rp2.671.647.545,00 atau 290,40%;
- c) Urusan Pemerintahan Pilihan terealisasi sebesar Rp256.054.606,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%, tidak dianggarkan;
- d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp4.180.607.154,00 dari anggaran sebesar Rp1.736.000.000,00 atau 240,82%, melampaui target sebesar Rp2.444.607.154,00 atau (140,82%)
- e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp3.606.664.911.559,24 dari anggaran sebesar Rp3.460.779.782.385,00 atau 104,22%, melampaui target sebesar Rp145.885.129.174,24 atau 4,22%.
- f) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp3.059.784,00 dari anggaran 0,00 atau tidak dianggarkan;
- g) Unsur Pemerintahan Umum terealisasi sebesar Rp8.554.302,00 dari anggaran 0,00 atau tidak dianggarkan.

Ikhtisar Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Papua berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 044
Ikhtisar Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Papua Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2023		LEBIH / (KURANG)	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.643.143.738.502,00	3.733.670.617.987,09	102,48	90.526.879.485,09	2,48
4.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	179.707.956.117,00	118.965.783.036,85	66,20	(60.742.173.080,15)	(33,80)
4.1.01	Pendidikan	0,00	782.109.127,00	0,00	782.109.127,00	0,00
4.1.02	Kesehatan	179.597.956.117,00	103.188.833.958,85	57,46	(76.409.122.158,15)	(42,54)
4.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110.000.000,00	14.888.437.957,00	13,534,94	14.778.437.957,00	13,434,94

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2023		LEBIH / (KURANG)	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
4.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
4.1.06	Sosial	0,00	16.401.994,00	0,00	16.401.994,00	0,00
4.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	920.000.000,00	3.591.647.545,00	390,40	2.671.647.545,00	290,40
4.2.07	Tenaga Kerja	0,00	182.856.211,00	0,00	182.856.211,00	0,00
4.2.09	Pangan	445.000.000,00	281.853.844,00	63,34	(163.146.156,00)	(36,66)
4.2.11	Lingkungan Hidup	0,00	176.657.634,00	0,00	176.657.634,00	0,00
4.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	16.238.090,00	0,00	16.238.090,00	0,00
4.2.15	Perhubungan	0,00	964.062.000,00	0,00	964.062.000,00	0,00
4.2.16	Komunikasi dan Informasi	0,00	14.447.656,00	0,00	14.447.656,00	0,00
4.2.18	Penanaman Modal	10.000.000,00	579.210.800,00	5.792,11	569.210.800,00	5.692,11
4.2.19	Kepemudaan dan Olahraga	165.000.000,00	1.228.995.472,00	744,85	1.063.995.472,00	644,85
4.2.22	Kebudayaan	300.000.000,00	147.325.838,00	49,11	(152.674.162,00)	(50,89)
4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	0,00	256.054.606,00	0,00	256.054.606,00	0,00
4.3.25	Kelautan dan Perikanan	0,00	218.177.000,00	0,00	218.177.000,00	0,00
4.3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	37.877.606,00	0,00	37.877.606,00	0,00
4.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	1.736.000.000,00	4.180.607.154,00	240,82	2.444.607.154,00	140,82
4.4.01	Sekretariat Daerah	1.736.000.000,00	1.138.984.798,00	65,61	(597.015.202,00)	(34,39)
4.4.02	Sekretariat DPRD	0,00	3.041.622.356,00	0,00	3.041.622.356,00	0,00
4.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3.460.779.782.385,00	3.606.664.911.559,24	104,22	145.885.129.174,24	4,22
4.5.01	Perencanaan	0,00	29.764.324,00	0,00	29.764.324,00	0,00
4.5.02	Keuangan	3.450.779.782.385,00	3.596.060.861.873,87	104,21	145.281.079.488,87	4,21
4.5.03	Kepegawaian	0,00	183.132.310,00	0,00	183.132.310,00	0,00
4.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000.000,00	10.231.703.427,37	102,32	231.703.427,37	2,32
4.5.06	Pengelolaan Perbatasan	0,00	2.685.924,00	0,00	2.685.924,00	0,00
4.5.07	Penghubung	0,00	156.763.700,00	0,00	156.763.700,00	0,00
4.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	0,00	3.059.784,00	0,00	3.059.784,00	0,00
4.6.01	Inspektorat	0,00	3.059.784,00	0,00	3.059.784,00	0,00
4.8	Unsur Pemerintahan Umum	0,00	8.554.302,00	0,00	8.554.302,00	0,00
4.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	8.554.302,00	0,00	8.554.302,00	0,00

3.1.2 Ikhtisar Kinerja Belanja dan Transfer Provinsi Papua

Ikhtisar Kinerja Belanja dan Transfer Provinsi Papua Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 dengan menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja dan Transfer TA 2023 sebesar Rp5.884.616.768.664,00 merupakan batas maksimal jumlah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja belanja yang baik apabila realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan. Selisih kurang realisasi belanja merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih lebih merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).
2. Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.031.849.735.510,84 atau 85,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.884.616.768.664,00 yang terdiri dari:
 - a) Realisasi belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp1.560.980.071.061,15 atau mencapai 84,51% dari anggaran sebesar Rp1.847.201.771.830,00 tidak terealisasi sebesar negatif Rp286.221.700.768,85 atau (15,49%);
 - b) Realisasi belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar terealisasi sebesar Rp459.202.303.050,34 atau mencapai 91,19% dari anggaran sebesar Rp503.554.218.700,00 tidak terealisasi sebesar Rp44.351.915.649,66 atau (8,81%);
 - c) Realisasi belanja Urusan Pemerintahan Pilihan terealisasi sebesar Rp87.561.731.905,89 atau 93,97% dari anggaran sebesar Rp93.182.050.622,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp5.620.318.716,11 atau (6,03%);
 - d) Realisasi belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp1.052.762.590.376,03 atau 89,66% dari anggaran sebesar Rp1.174.180.424.040,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp121.417.833.663,97 atau (10,34%).
 - e) Realisasi belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp1.779.753.246.321,43 atau 82,38% dari anggaran sebesar Rp2.160.303.577.774,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp380.550.331.452,57 atau (17,62%).

- f) Realisasi belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp59.170.294.465,00 atau 88,52% dari anggaran sebesar Rp66.841.931.213,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp7.671.636.748,00 atau (11,48%).
- g) Realisasi belanja Unsur Pemerintahan Umum terealisasi sebesar Rp32.419.498.331,00 atau 82,38% dari anggaran sebesar Rp39.352.794.485,00 dan tidak terealisasi sebesar negatif Rp6.933.296.154,00 atau (17,62%).

Ikhtisar Kinerja Belanja dan Transfer Provinsi Papua berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 045
Ikhtisar Kinerja Belanja dan Transfer Provinsi Papua Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH	REALISASI 2023		LEBIH / (KURANG)	
		PERUBAHAN	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
5	BELANJA DAERAH	5.884.616.768.660,00	5.031.849.735.510,84	85,51	(852.767.033.153,16)	(14,49)
5.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.847.201.771.826,00	1.560.980.071.061,15	84,51	(286.221.700.768,85)	(15,49)
5.1.01	Pendidikan	190.112.311.998,00	176.973.016.867,80	93,09	(13.139.295.130,20)	(6,91)
5.1.02	Kesehatan	719.161.290.960,00	600.531.145.065,91	83,50	(118.630.145.898,09)	(16,50)
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	858.296.980.760,00	710.445.999.182,44	82,77	(147.850.981.577,56)	(17,23)
5.1.05	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	34.329.753.918,00	30.565.038.884,00	89,03	(3.764.715.034,00)	(10,97)
5.1.06	Sosial	45.301.434.190,00	42.464.871.061,00	93,74	(2.836.563.129,00)	(6,26)
5.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	503.554.218.700,00	459.202.303.050,34	91,19	(44.351.915.649,66)	(8,81)
5.2.07	Tenaga Kerja	52.652.055.105,00	47.513.240.667,00	90,24	(5.138.814.438,00)	(9,76)
5.2.09	Pangan	91.462.009.141,00	83.553.602.421,00	91,35	(7.908.406.720,00)	(8,65)
5.2.11	Lingkungan Hidup	127.290.532.584,00	116.742.173.277,33	91,71	(10.548.359.306,67)	(8,29)
5.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.003.277.261,00	34.496.598.319,00	95,82	(1.506.678.942,00)	(4,18)
5.2.15	Perhubungan	52.123.816.995,00	40.026.437.961,00	76,79	(12.097.379.034,00)	(23,21)
5.2.16	Komunikasi dan Informatika	23.848.485.300,00	22.642.059.321,00	94,94	(1.206.425.979,00)	(5,06)
5.2.18	Penanaman Modal	23.356.321.522,00	21.639.200.497,00	92,65	(1.717.121.025,00)	(7,35)
5.2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	47.373.353.596,00	44.623.450.977,00	94,20	(2.749.902.619,00)	(5,80)
5.2.22	Kebudayaan	49.444.367.196,00	47.965.539.610,01	97,01	(1.478.827.585,99)	(2,99)
5.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	93.182.050.622,00	87.561.731.905,89	93,97	(5.620.318.716,11)	(6,03)
5.3.25	Kelautan dan Perikanan	42.843.070.797,00	40.468.130.477,89	94,46	(2.374.940.319,11)	(5,54)
5.3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral	50.338.979.825,00	47.093.601.428,00	93,55	(3.245.378.397,00)	(6,45)
5.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	1.174.180.424.040,00	1.052.762.590.376,03	89,66	(121.417.833.663,97)	(10,34)
5.4.01	Sekretariat Daerah	636.807.789.952,00	534.577.204.961,03	83,95	(102.230.584.990,97)	(16,05)
5.4.02	Sekretariat DPRD	537.372.634.088,00	518.185.385.415,00	96,43	(19.187.248.673,00)	(3,57)
5.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.160.303.577.774,00	1.779.753.246.321,43	82,38	(380.550.331.452,57)	(17,62)
5.5.01	Perencanaan	100.401.790.539,00	81.031.929.007,66	80,71	(19.369.861.531,34)	(19,29)
5.5.02	Keuangan	1.898.912.930.457,00	1.548.607.963.220,57	81,55	(350.304.967.236,43)	(18,45)
5.5.03	Kepegawaian	50.714.241.980,00	45.993.857.308,00	90,69	(4.720.384.672,00)	(9,31)
5.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	67.014.411.130,00	62.915.115.385,20	93,88	(4.099.295.744,80)	(6,12)
5.5.06	Pengelola Perbatasan Daerah	24.880.301.139,00	23.735.966.996,00	95,40	(1.144.334.143,00)	(4,60)
5.5.07	Penghubung	18.379.902.529,00	17.468.414.404,00	95,04	(911.488.125,00)	(4,96)
5.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	66.841.931.213,00	59.170.294.465,00	88,52	(7.671.636.748,00)	(11,48)
5.6.01	Inspektorat	66.841.931.213,00	59.170.294.465,00	88,52	(7.671.636.748,00)	(11,48)
5.8	Unsur Pemerintahan Umum	39.352.794.485,00	32.419.498.331,00	82,38	(6.933.296.154,00)	(17,62)
5.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	39.352.794.485,00	32.419.498.331,00	82,38	(6.933.296.154,00)	(17,62)

3.1.3 Pencapaian Program/Kegiatan Pemerintah Daerah terkait dengan *Mandatory Spending* dan Penanganan *Stunting*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur dalam undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN); dan
4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam penyelesaian *mandatory spending* adalah dengan perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD tahun 2022. Terdapat 3 (tiga) poin *mandatory spending* yang dituangkan dalam APBD tahun 2022, yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur.

1. Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dari belanja daerah sebagaimana diamankan dalam ketentuan perundang-undangan. Adapun kegiatan fungsi pendidikan dijabarkan dalam program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 046
Program Kegiatan Fungsi Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDIDIKAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	134.150.257.649,00	122.343.660.517,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.667.502.910,00	1.666.857.985,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.157.940.934,00	112.633.696.502,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	950.000.000,00	940.388.127,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.194.314.210,00	1.193.144.320,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.658.806.695,00	3.654.403.324,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	675.000.000,00	674.516.198,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.846.692.900,00	1.580.654.061,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.249.762.225,00	3.243.264.812,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.586.635.750,00	2.580.484.339,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	663.126.475,00	662.780.473,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.711.628.504,00	47.433.551.111,80
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	13.012.132.196,00	12.275.209.631,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	9.739.703.823,00	9.647.203.456,80
Pengelolaan Pendidikan Khusus	25.959.792.485,00	25.511.138.024,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	246.735.850,00	240.735.850,00
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	246.735.850,00	240.735.850,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.500.000.000,00	3.480.328.121,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	900.000.000,00	898.395.957,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	950.000.000,00	949.776.004,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	700.000.000,00	682.164.590,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	950.000.000,00	949.991.570,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.979.272.290,00	18.105.040.499,00
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	18.979.272.290,00	18.105.040.499,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	494.991.000,00	478.356.950,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	233.576.460,00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	244.991.000,00	244.780.490,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.090.000.000,00	1.238.375.600,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.298.400.000,00	1.225.570.600,00
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	791.600.000,00	12.805.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.712.499.789,00	3.702.549.233,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.354.779.789,00	2.348.945.906,00
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.357.720.000,00	1.353.603.327,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.422.417.070,00	1.411.025.758,00
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1.422.417.070,00	1.411.025.758,00
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	504.800.000,00	504.800.000,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	504.800.000,00	504.800.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	45.593.373.430,00	44.003.166.088,20
Pengembangan Kompetensi Teknis	9.412.818.590,00	9.114.869.485,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	36.180.554.840,00	34.888.296.603,20
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	7.850.000.000,00	7.774.829.085,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	7.850.000.000,00	7.774.829.085,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	200.000.000,00	199.900.001,00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200.000.000,00	199.900.001,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	450.000.000,00	421.200.000,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	450.000.000,00	421.200.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.136.468.000,00	1.000.000.000,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.136.468.000,00	1.000.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.133.627.320,00	1.121.457.891,00
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.133.627.320,00	1.121.457.891,00
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	3.800.000.000,00	3.784.300.455,00
Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	3.800.000.000,00	3.784.300.455,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.706.137.200,00	6.368.873.795,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	6.706.137.200,00	6.368.873.795,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.712.499.789,00	3.702.549.233,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.354.779.789,00	2.348.945.906,00
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.357.720.000,00	1.353.603.327,00
NON PROGRAM	0,00	238.178.506.877,00
Non Kegiatan	0,00	224.498.506.877,00
Non Kegiatan	0,00	6.960.000.000,00
Non Kegiatan	0,00	6.720.000.000,00

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
TOTAL	287.644.470.116,00	270.557.965.000,00
TOTAL BELANJA DAERAH	5.884.616.768.664,00	5.031.849.735.510,84
PERSENTASE PROGRAM/KEGIATAN PENDIDIKAN TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH	4,89	5,38

2. Fungsi Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Adapun kegiatan fungsi kesehatan dijabarkan dalam program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 047
Program Kegiatan Fungsi Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
KESEHATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	486.479.876.346,00	267.127.332.852,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	459.725.000,00	459.718.260,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	248.540.531.304,00	212.633.173.685,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000,00	498.231.930,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.658.863.650,00	10.867.851.371,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	840.000.000,00	840.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.827.280.500,00	26.633.701.597,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.291.980.000,00	5.234.818.464,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	175.779.956.117,00	0,00
Fasilitasi Keprotokolan	16.581.539.775,00	9.959.837.545,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	226.783.072.053,00	221.094.467.274,91
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	187.069.475.435,00	184.221.970.482,31
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	31.736.267.526,00	29.623.788.179,60
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	881.487.547,00	861.047.853,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	7.095.841.545,00	6.387.660.760,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	20.103.872.290,00	19.228.023.969,00
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	18.979.272.290,00	18.105.040.499,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.124.600.000,00	1.122.983.470,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	452.210.330,00	451.758.970,00
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	452.210.330,00	451.758.970,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.923.799.720,00	1.573.421.653,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	73.800.000,00	73.000.000,00
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.600.000.000,00	1.250.619.653,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	249.999.720,00	249.802.000,00
Non Program	0,00	25.114.978.041,00
Non Kegiatan	0,00	3.865.000.000,00
Non Kegiatan	0,00	21.249.978.041,00
TOTAL	735.742.830.739,00	534.589.982.759,91
TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI	5.761.332.984.970,00	4.920.090.196.248,84
PERSENTASE PROGRAM/KEGIATAN KESEHATAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI	12,48	10,66

3. Fungsi Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yang merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan publik antar daerah. Adapun program/kegiatan belanja infrastruktur dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 048
Program Kegiatan Fungsi Infrastruktur

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.828.391.100,00	64.941.382.582,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000.206,00	1.153.333.080,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.330.388.680,00	46.479.525.811,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.420.732.147,00	1.404.765.799,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000.110,00	695.666.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.799.249.957,00	10.892.968.357,00

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.200.000,00	82.800.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.686.820.000,00	3.661.740.535,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000,00	570.583.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	41.077.122.820,00	40.144.388.492,88
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	41.077.122.820,00	40.144.388.492,88
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	88.289.688.685,00	67.275.670.054,58
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	88.289.688.685,00	67.275.670.054,58
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	13.491.456.000,00	11.445.463.965,91
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	13.491.456.000,00	11.445.463.965,91
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.610.802.000,00	17.383.442.700,03
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	17.610.802.000,00	17.383.442.700,03
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	619.749.520.155,00	501.281.192.302,04
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	619.749.520.155,00	501.281.192.302,04
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	7.850.000.000,00	7.774.829.085,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	7.850.000.000,00	7.774.829.085,00
Non Program	0,00	156.297.216.364,24
Non Kegiatan	0,00	140.492.216.364,24
Non Kegiatan	0,00	1.630.000.000,00
Non Kegiatan	0,00	14.175.000.000,00
TOTAL	857.896.980.760,00	866.543.585.546,68
TOTAL BELANJA DAERAH	5.884.616.768.664,00	5.031.849.735.510,84
PERSENTASE PROGRAM/KEGIATAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA BERSIFAT UMUM	14,58	17,22

Selanjutnya, program percepatan pencegahan *stunting* merupakan program prioritas pemerintah yang didukung oleh pimpinan pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan pemerintah desa. Prioritas utama atau sasaran dari program pencegahan *stunting* adalah ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran (1.000 HPK).

Upaya Pemerintah Provinsi Papua adalah dengan merencanakan program/kegiatan penanganan *stunting* dan data status gizi balita Provinsi Papua selama penanganan *stunting* dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 049
Program Kegiatan Penanganan *Stunting*

Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18.800.156.119,00	18.084.838.671,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	12.331.697.454,00	11.644.061.071,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	75.000.000,00	74.399.138,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	2.420.000.000,00	2.414.816.831,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	68.395.332.754,00	54.164.907.159,34
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	900.000.245,00	896.199.694,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	700.000.020,00	680.491.647,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	500.526.140,00	0,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	187.250.000,00	141.550.000,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	128.029.972.100,00	53.501.457.423,95
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	203.907.980,00	194.933.880,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	10.000.000.000,00	9.114.760.515,09
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	164.674.136.485,00	141.976.756.429,52
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	155.352.980,00	155.352.980,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.064.740.000,00	3.063.956.739,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.800.100.000,00	1.799.359.828,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	1.264.640.000,00	1.264.596.911,00
TOTAL		413.502.812.277,00	299.172.438.917,90

3.2

HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dari uraian Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 diketahui realisasi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang tidak mencapai target dari yang dianggarkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya melebihi target sebesar Rp90.526.879.485,09 atau 2,48%, dan bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.040.109.011.239,40 menurun sebesar negatif Rp7.306.438.393.252,31 atau (66,18%), penurunan Pendapatan Daerah ini disebabkan adanya Pemekaran 3 (tiga) Provinsi baru. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak mencapai target adalah dari Pendapatan Asli Daerah sebesar negatif Rp406.921.943.144,91 atau (34,55%) dan Pendapatan Transfer sebesar negatif Rp20.418.418.023 atau (1,44%), sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah realisasinya sebesar Rp517.867.240.653,00.
2. Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.031.849.735.510,84 atau 85,51% dari anggarannya sebesar Rp5.884.616.768.664,00 Hal ini disebabkan antara lain: (1) terlambatnya Transfer Dana Otonomi Khusus yang mengakibatkan realisasi belanja tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan (2) Adanya efisiensi belanja yang merupakan sisa kegiatan yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran OPD.
3. Dalam percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting di Provinsi Papua tentunya terdapat kendala-kendala diantaranya sebagai berikut:
 - a. Belum efektifnya program-program pencegahan *stunting*;
 - b. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana;
 - d. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program; dan
 - e. Masih minimnya advokasi, kampanye, diseminasi terkait stunting dan berbagai upaya pencegahannya.

5.1.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN-LRA Rp1.393.688.550.362,00

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan TA 2023 adalah sebesar Rp1.393.688.550.362,00 atau mencapai 98,56% dari anggarannya sebesar Rp1.414.106.968.385,00 dan mempunyai kontribusi 57,00% dari total realisasi pendapatan transfer pada TA 2023 sebesar Rp2.444.887.208.362,00.

Bila dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp5.004.746.236.115,00, maka realisasi TA 2023 turun sebesar Rp3.611.057.685.753,00 atau (72,15%). Dana transfer pusat-dana perimbangan-LRA terdiri dari: (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan TA 2023 dan Realisasi TA 2022 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 063
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LRA
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	243.175.790.000,00	372.057.176.155,00	153,00	26,70	1.938.939.483.801,00
2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	950.470.597.385,00	823.921.492.505,00	86,69	59,12	2.314.812.589.728,00
3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	195.899.501.000,00	178.036.462.636,00	90,88	12,77	366.834.632.121,00
4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	24.561.080.000,00	19.673.419.066,00	80,10	1,41	384.159.530.465,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat-Dana Perimbangan-LRA	1.414.106.968.385,00	1.393.688.550.362,00	98,56	100,00	5.004.746.236.115,00

Realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp372.057.176.155,00

Dana Transfer Umum atau yang disebut Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan pusat yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp372.057.176.155,00 atau 153,00% dari anggaran perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp243.175.790.000,00. Hal ini berarti realisasinya melampaui target sebesar Rp128.881.386.155,00 atau 53,00% dari yang dianggarkan TA 2023.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2023 dirinci dalam tabel 065 sebagai berikut:

Tabel 064
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil - LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

	Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
		(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	28.292.625.000,00	154.496.306.155,00	546,07	126.203.681.155,00	446,07
2	DBH PPh Pasal 21	43.195.451.000,00	42.485.274.000,00	98,36	(710.177.000,00)	(1,64)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	710.177.000,00	0,00	710.177.000,00	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	658.379.000,00	0,00	658379000,00	0,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	157.028.899.000,00	156.370.520.000,00	99,58	(658.379.000,00)	(0,42)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	5.688.929.000,00	0,00	5.688.929.000,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	3.572.241.000,00	561.017.000,00	15,70	(3.011.224.000,00)	(84,30)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	11.086.574.000,00	11.086.574.000,00	100,00	0,00	0,00
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	243.175.790.000,00	372.057.176.155,00	153,00	128.881.386.155,00	53,00

Alokasi dan realisasi transfer umum – Dana Bagi hasil ke daerah oleh pemerintah pusat - Transfer Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp245.853.495.000,00 berikut dalam tabel 066, merupakan pembandingan antara apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 pada perubahan APBD Pemerintah Provinsi Papua dan data SIMTRADA dari Kementerian Keuangan, Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Bagi Hasil - LRA Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 065
Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Bagi Hasil - LRA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

	Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
			Kotor	Potongan	Bersih	
61	Dana Bagi Hasil	370.926.482.000,00	245.853.495.000,00	0,00	245.853.495.000,00	0,00
6111	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	89.029.382.000,00	43.195.451.000,00	0,00	43.195.451.000,00	0,00
	611111 DBH PPh Pasal 21	86.823.487.000,00	42.485.274.000,00	0,00	42.485.274.000,00	0,00
	DBH, TRIWULAN I 2023		8.497.054.800,00	0,00	8.497.054.800,00	0,00
	DBH, TRIWULAN II 2023		8.497.054.800,00	0,00	8.497.054.800,00	0,00
	DBH, TRIWULAN III 2023		16.994.109.600,00	0,00	16.994.109.600,00	0,00
	DBH, TRIWULAN IV 2023		8.497.054.800,00	0,00	8.497.054.800,00	0,00
	611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP	2.205.895.000,00	710.177.000,00	0,00	710.177.000,00	0,00
	DBH, TRIWULAN I 2023		142.035.400,00	0,00	142.035.400,00	0,00
	DBH, TRIWULAN II 2023		142.035.400,00	0,00	142.035.400,00	0,00
	DBH, TRIWULAN III 2023		142.035.400,00	0,00	142.035.400,00	0,00
	DBH, TRIWULAN IV 2023		284.070.800,00	0,00	284.070.800,00	0,00
6112	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	28.292.625.000,00	28.292.625.000,00	0,00	28.292.625.000,00	0,00
	611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	28.292.625.000,00	28.292.625.000,00	0,00	28.292.625.000,00	0,00
	D01 DBH PBB Migas Bagian Daerah	1.621.747.000,00	1.621.747.000,00	0,00	1.621.747.000,00	0,00
	DBH, TRIWULAN I 2023		324.349.400,00	0,00	324.349.400,00	0,00
	DBH, TRIWULAN II 2023		405.436.750,00	0,00	405.436.750,00	0,00
	DBH, TRIWULAN III 2023		567.611.450,00	0,00	567.611.450,00	0,00
	DBH, TRIWULAN IV 2023		324.349.400,00	0,00	324.349.400,00	0,00
	D03 DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah	1.171.731.000,00	1.171.731.000,00	0,00	1.171.731.000,00	0,00
	DBH, MINGGU 1 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 2 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 3 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 4 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 5 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 6 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 7 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 8 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 9 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 10 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 11 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 12 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 13 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 14 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 15 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 16 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 17 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 18 2023		58.586.550,00	0,00	58.586.550,00	0,00
	DBH, MINGGU 19 2023		117.173.100,00	0,00	117.173.100,00	0,00
	D04 DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah	655.827.000,00	655.827.000,00	0,00	655.827.000,00	0,00
	DBH, MINGGU 1 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 2 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 3 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 4 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 5 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 6 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 7 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 8 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 9 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 10 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 11 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 12 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 13 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 14 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 15 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 16 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 17 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 18 2023		32.791.350,00	0,00	32.791.350,00	0,00
	DBH, MINGGU 19 2023		65.582.700,00	0,00	65.582.700,00	0,00
	D05 DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah	24.758.854.000,00	24.758.854.000,00	0,00	24.758.854.000,00	0,00
	DBH, MINGGU 1 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
		Kotor	Potongan	Bersih	
DBH, MINGGU 2 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 3 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 4 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 5 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 6 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 7 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 8 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 9 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 10 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 11 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 12 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 13 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 14 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 15 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 16 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 17 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 18 2023		1.237.942.700,00	0,00	1.237.942.700,00	0,00
DBH, MINGGU 19 2023		2.475.885.400,00	0,00	2.475.885.400,00	0,00
D06 DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah	84.466.000,00	84.466.000,00	0,00	84.466.000,00	0,00
DBH, MINGGU 1 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 2 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 3 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 4 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 5 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 6 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 7 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 8 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 9 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 10 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 11 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 12 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 13 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 14 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 15 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 16 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 17 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 18 2023		4.223.300,00	0,00	4.223.300,00	0,00
DBH, MINGGU 19 2023		8.446.600,00	0,00	8.446.600,00	0,00
6123 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	210.417.816.000,00	157.028.899.000,00	0,00	157.028.899.000,00	0,00
612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	878.156.000,00	658.379.000,00	0,00	658.379.000,00	0,00
DBH, TRIWULAN I 2023		131.675.800,00	0,00	131.675.800,00	0,00
DBH, TRIWULAN II 2023		164.594.750,00	0,00	164.594.750,00	0,00
DBH, TRIWULAN III 2023		230.432.650,00	0,00	230.432.650,00	0,00
DBH, TRIWULAN IV 2023		131.675.800,00	0,00	131.675.800,00	0,00
612312 DBH SDA Minerba - Royalti	209.539.660.000,00	156.370.520.000,00	0,00	156.370.520.000,00	0,00
DBH, TRIWULAN I 2023		31.274.104.000,00	0,00	31.274.104.000,00	0,00
DBH, TRIWULAN II 2023		39.092.630.000,00	0,00	39.092.630.000,00	0,00
DBH, TRIWULAN III 2023		54.729.682.000,00	0,00	54.729.682.000,00	0,00
DBH, TRIWULAN IV 2023		31.274.104.000,00	0,00	31.274.104.000,00	0,00
6125 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	14.658.815.000,00	14.658.815.000,00	0,00	14.658.815.000,00	0,00
612511 DBH SDA Kehutanan - IIUPH	561.017.000,00	561.017.000,00	0,00	561.017.000,00	0,00
DBH, TRIWULAN I 2023		84.152.550,00	0,00	84.152.550,00	0,00
DBH, TRIWULAN II 2023		84.152.550,00	0,00	84.152.550,00	0,00
DBH, TRIWULAN III 2023		196.355.950,00	0,00	196.355.950,00	0,00
DBH, TRIWULAN IV 2023		196.355.950,00	0,00	196.355.950,00	0,00
612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	3.011.224.000,00	3.011.224.000,00	0,00	3.011.224.000,00	0,00
DBH, TRIWULAN I 2023		451.683.600,00	0,00	451.683.600,00	0,00
DBH, TRIWULAN II 2023		451.683.600,00	0,00	451.683.600,00	0,00
DBH, TRIWULAN III 2023		1.053.928.400,00	0,00	1.053.928.400,00	0,00
DBH, TRIWULAN IV 2023		1.053.928.400,00	0,00	1.053.928.400,00	0,00
612513 DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	11.086.574.000,00	11.086.574.000,00	0,00	11.086.574.000,00	0,00
DBH, TRIWULAN I 2023		1.662.986.100,00	0,00	1.662.986.100,00	0,00
DBH, TRIWULAN II 2023		1.662.986.100,00	0,00	1.662.986.100,00	0,00
DBH, TRIWULAN III 2023		3.880.300.900,00	0,00	3.880.300.900,00	0,00
DBH, TRIWULAN IV 2023		3.880.300.900,00	0,00	3.880.300.900,00	0,00
6127 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	2.677.705.000,00	2.677.705.000,00	0,00	2.677.705.000,00	0,00
612711 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	2.677.705.000,00	2.677.705.000,00	0,00	2.677.705.000,00	0,00
DBH, TAHAP I 2023 => 612711 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)		2.677.705.000,00	0,00	2.677.705.000,00	0,00

Sumber: SIMTRAD4 (Data diolah, 2023)

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

Rp823.921.492.505,00

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum Provinsi Papua TA 2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 104 Tahun 2021, sebesar Rp823.921.492.505,00 mempunyai kontribusi sebesar 59,12% atas total realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.393.688.550.362,00.

Tabel 067 dibawah ini merupakan Alokasi dan Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum Pemerintah Provinsi Papua TA 2023.

Tabel 066
Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Dana Alokasi Umum - LRA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
		Kotor	Potongan	Bersih	
62 Transfer Dana Alokasi Umum	824.236.308.000,00	824.236.308.000,00	314.815.495,00	823.921.492.505,00	171.223.620.882,00
6211 Transfer Dana Alokasi Umum	824.236.308.000,00	824.236.308.000,00	314.815.495,00	823.921.492.505,00	171.223.620.882,00
621111 Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	673.096.641.000,00	673.096.641.000,00	314.815.495,00	672.781.825.505,00	171.223.620.882,00
Bulan JANUARI 2023		56.091.386.000,00	0,00	56.091.386.000,00	0,00
Bulan FEBRUARI 2023		56.091.386.000,00	0,00	56.091.386.000,00	0,00
Bulan MARET 2023		56.091.386.000,00	0,00	56.091.386.000,00	0,00
Bulan APRIL 2023		56.091.386.000,00	0,00	56.091.386.000,00	0,00
Bulan MEI 2023		42.068.539.500,00	0,00	42.068.539.500,00	14.022.846.500,00
Bulan JUNI 2023		30.179.749.842,00	0,00	30.179.749.842,00	25.911.636.158,00
Bulan JULI 2023		30.179.749.842,00	0,00	30.179.749.842,00	25.911.636.158,00
Bulan AGUSTUS 2023		30.179.749.842,00	0,00	30.179.749.842,00	25.911.636.158,00
Bulan SEPTEMBER 2023		18.694.061.842,00	0,00	18.694.061.842,00	37.397.324.158,00
Bulan OKTOBER 2023		42.068.539.500,00	314.815.495,00	41.753.724.005,00	14.022.846.500,00
Bulan NOVEMBER 2023		42.068.539.500,00	0,00	42.068.539.500,00	14.022.846.500,00
Bulan DESEMBER 2023		42.068.546.250,00	0,00	42.068.546.250,00	14.022.848.750,00
Bulan MEI 2023 (Ditunda)		14.022.846.500,00	0,00	14.022.846.500,00	0,00
Bulan JUNI 2023 (Ditunda)		14.022.846.500,00	0,00	14.022.846.500,00	0,00
Bulan JUNI 2023 (Ditunda)		11.888.789.658,00	0,00	11.888.789.658,00	0,00
Bulan JULI 2023 (Ditunda)		14.022.846.500,00	0,00	14.022.846.500,00	0,00
Bulan JULI 2023 (Ditunda)		11.888.789.658,00	0,00	11.888.789.658,00	0,00
Bulan AGUSTUS 2023 (Ditunda)		14.022.846.500,00	0,00	14.022.846.500,00	0,00
Bulan AGUSTUS 2023 (Ditunda)		11.888.789.658,00	0,00	11.888.789.658,00	0,00
Bulan SEPTEMBER 2023 (Ditunda)		14.022.846.500,00	0,00	14.022.846.500,00	0,00
Bulan SEPTEMBER 2023 (Ditunda)		23.374.477.658,00	0,00	23.374.477.658,00	0,00
Bulan OKTOBER 2023 (Ditunda)		14.022.846.500,00	0,00	14.022.846.500,00	0,00
Bulan NOVEMBER 2023 (Ditunda)		14.022.846.500,00	0,00	14.022.846.500,00	0,00
Bulan DESEMBER 2023 (Ditunda)		14.022.848.750,00	0,00	14.022.848.750,00	0,00
621121 Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	5.438.497.000,00	5.438.497.000,00	0,00	5.438.497.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK, DESEMBER 2023		5.438.497.000,00	0,00	5.438.497.000,00	0,00
621123 Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	35.570.177.000,00	35.570.177.000,00	0,00	35.570.177.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan, TAHAP 1 2023		10.671.053.000,00	0,00	10.671.053.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan, TAHAP 2 2023		16.006.579.000,00	0,00	16.006.579.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan, TAHAP 3 2023		8.892.545.000,00	0,00	8.892.545.000,00	0,00
621124 Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	51.648.208.000,00	51.648.208.000,00	0,00	51.648.208.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan, TAHAP 1 2023		15.494.462.000,00	0,00	15.494.462.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan, TAHAP 2 2023		23.241.693.000,00	0,00	23.241.693.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan, TAHAP 3 2023		12.912.053.000,00	0,00	12.912.053.000,00	0,00
621125 Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	58.482.785.000,00	58.482.785.000,00	0,00	58.482.785.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum, TAHAP 1 2023		17.544.835.000,00	0,00	17.544.835.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum, TAHAP 2 2023		26.317.253.000,00	0,00	26.317.253.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum, TAHAP 3 2023		14.620.697.000,00	0,00	14.620.697.000,00	0,00

Sumber: SIMTRAD4 (Data diolah, 2023)

Bila dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 sebesar Rp2.314.812.589.728,00 maka realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 turun sebesar Rp1.490.891.097.223,00 atau (64,41%).

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp178.036.462.636,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK Fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi dan penugasan.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp178.036.462.636,00 atau mencapai 90,88% dan mempunyai kontribusi sebesar 12,77% atas total realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp1.393.688.550.362,00.

Tabel 067
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	6.078.247.000,00	5.640.016.504,00	92,79	(438.230.496,00)	(7,21)
2 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	0,00	118.262.168.107,00	0,00	118.262.168.107,00	0,00
3 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	119.903.196.000,00	0,00	0,00	(119.903.196.000,00)	(100,00)
4 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.995.949.000,00	7.318.311.455,00	91,53	(677.637.545,00)	(8,47)
5 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.583.623.000,00	5.397.306.113,00	96,66	(186.316.887,00)	(3,34)
6 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	55.202.018.000,00	40.418.660.457,00	73,22	(14.783.357.543,00)	(26,78)
7 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	1.136.468.000,00	1.000.000.000,00	87,99	(136.468.000,00)	(12,01)
Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	195.899.501.000,00	178.036.462.636,00	90,88	(17.863.038.364,00)	(9,12)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Papua TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp188.798.169.485,00 atau (51,47%) apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp366.834.632.121,00.

dalam tabel 069, merupakan pembandingan antara apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 pada perubahan APBD Pemerintah Provinsi Papua dan data SiMTRADA dari Kementerian Keuangan, Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Bagi Hasil - LRA Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 068
Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Pagu	Realisasi		Ditunda	
		Kotor	Potongan Bersih		
63 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Fisik	195.899.501.000,00	178.036.462.636,00	0,00	178.036.462.636,00	0,00
6312 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	195.899.501.000,00	178.036.462.636,00	0,00	178.036.462.636,00	0,00
C06 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SLB yang disalurkan	6.078.247.000,00	5.640.016.504,00	0,00	5.640.016.504,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-1 2023		1.441.807.587,00	0,00	1.441.807.587,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-2 2023		2.595.253.657,00	0,00	2.595.253.657,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-3 2023		1.292.290.260,00	0,00	1.292.290.260,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-4 2023		310.665.000,00	0,00	310.665.000,00	0,00
D04 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	119.903.196.000,00	118.262.168.107,00	0,00	118.262.168.107,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-1 2023		6.541.015.643,00	0,00	6.541.015.643,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-2 2023		11.773.828.157,00	0,00	11.773.828.157,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-3 2023		6.617.100.478,00	0,00	6.617.100.478,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-4 2023		93.330.223.829,00	0,00	93.330.223.829,00	0,00
F02 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Pengembangan Food Estate yang disalurkan	13.189.593.000,00	9.232.715.100,00	0,00	9.232.715.100,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-1 2023		3.297.398.250,00	0,00	3.297.398.250,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-2 2023		5.935.316.850,00	0,00	5.935.316.850,00	0,00
F03 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disalurkan	15.644.311.000,00	11.803.757.129,00	0,00	11.803.757.129,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-1 2023		3.911.077.750,00	0,00	3.911.077.750,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-2 2023		7.039.939.950,00	0,00	7.039.939.950,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-3 2023		852.739.429,00	0,00	852.739.429,00	0,00
F07 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) yang disalurkan	26.368.114.000,00	19.382.188.228,00	0,00	19.382.188.228,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-1 2023		6.592.028.500,00	0,00	6.592.028.500,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-2 2023		11.865.651.300,00	0,00	11.865.651.300,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-3 2023		924.508.428,00	0,00	924.508.428,00	0,00
G03 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) yang disalurkan	5.583.623.000,00	5.397.306.113,00	0,00	5.397.306.113,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-1 2023		1.395.905.750,00	0,00	1.395.905.750,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-2 2023		2.512.630.350,00	0,00	2.512.630.350,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-3 2023		1.488.770.013,00	0,00	1.488.770.013,00	0,00
G04 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan Tematik Pengembangan Food Estate yang disalurkan	1.136.468.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-4 2023		1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
G06 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) yang disalurkan	7.995.949.000,00	7.318.311.455,00	0,00	7.318.311.455,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-1 2023		1.998.987.250,00	0,00	1.998.987.250,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-2 2023		3.598.177.050,00	0,00	3.598.177.050,00	0,00
DAK Fisik, Tahap ke-3 2023		1.721.147.155,00	0,00	1.721.147.155,00	0,00

Sumber: SIMTRADA (Data diolah, 2023)

Bila dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp366.834.632.121,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 turun sebesar Rp188.798.169.485,00 atau (51,47%).

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA Rp19.673.419.066,00

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp19.673.419.066,00 atau mencapai 80,10% dan mempunyai kontribusi sebesar 1,41% atas total realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp1.393.688.550.362,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2022 sebesar Rp384.159.530.465,00, maka realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2023 turun sebesar Rp364.486.111.399,00 atau (94,88%).

Tabel 069
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 DAK Non Fisik-BOS Reguler	2.887.150.000,00	770.479,00	0,03	(2.886.379.521,00)	(99,97)
2 DAK Non Fisik-BOS Kinerja	133.750.000,00	0,00	0,00	(133.750.000,00)	(100,00)
3 DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.704.310.000,00	1.353.831.700,00	79,44	(350.478.300,00)	(20,56)
4 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	24.000.000,00	0,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)
5 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.712.500.000,00	0,00	0,00	(1.712.500.000,00)	(100,00)
6 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	0,00	1.710.900.000,00	0,00	1.710.900.000,00	0,00
7 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	13.971.162.991,00	0,00	13.971.162.991,00	0,00
8 DAK Non Fisik-PK2UKM	14.794.419.000,00	1.690.266.016,00	11,43	(13.104.152.984,00)	(88,57)
9 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	375.000.000,00	0,00	0,00	(375.000.000,00)	(100,00)
10 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.143.400.000,00	571.700.000,00	50,00	(571.700.000,00)	(50,00)
11 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	374.787.880,00	0,00	374.787.880,00	0,00
12 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.786.551.000,00	0,00	0,00	(1.786.551.000,00)	(100,00)
Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	24.561.080.000,00	19.673.419.066,00	80,10	(4.887.660.934,00)	(19,90)

Alokasi dan realisasi detil transfer ke daerah oleh pemerintah pusat-Transfer Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 070
Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik - LRA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
		Kotor	Potongan	Bersih	
65 Dana Alokasi Khusus Nonfisik	24.561.080.000,00	23.614.073.700,00	921.353.113,00	22.692.720.587,00	0,00
6541 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	1.704.310.000,00	1.353.831.700,00	0,00	1.353.831.700,00	0,00
654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	1.704.310.000,00	1.353.831.700,00	0,00	1.353.831.700,00	0,00
DAKNF, 31 2023 => 654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (003.Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan)		511.293.000,00	0,00	511.293.000,00	0,00
DAKNF, 32 2023 => 654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (003.Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan)		426.077.000,00	0,00	426.077.000,00	0,00
DAKNF, 33 2023 => 654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (003.Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan)		75.599.700,00	0,00	75.599.700,00	0,00
DAKNF, 34 2023 => 654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (003.Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan)		340.862.000,00	0,00	340.862.000,00	0,00
6542 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6543 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	3.020.900.000,00	3.020.072.000,00	0,00	3.020.072.000,00	0,00
654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	3.020.900.000,00	3.020.072.000,00	0,00	3.020.072.000,00	0,00
001.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	2.887.150.000,00	2.886.322.000,00	0,00	2.886.322.000,00	0,00
DAKNF-BOSP, TAHAP ke-1 2023		556.525.000,00	0,00	556.525.000,00	0,00
DAKNF-BOSP, TAHAP ke-1 2023		886.222.000,00	0,00	886.222.000,00	0,00
DAKNF-BOSP, TAHAP ke-2 2023		1.443.575.000,00	0,00	1.443.575.000,00	0,00
015.Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang disalurkan	133.750.000,00	133.750.000,00	0,00	133.750.000,00	0,00
DAKNF-BOSP, TAHAP ke-1 2023		36.250.000,00	0,00	36.250.000,00	0,00
DAKNF-BOSP, TAHAP ke-1 2023		97.500.000,00	0,00	97.500.000,00	0,00
6547 Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	14.794.419.000,00	14.794.419.000,00	823.256.009,00	13.971.162.991,00	0,00
654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan	14.794.419.000,00	14.794.419.000,00	823.256.009,00	13.971.162.991,00	0,00
DAKNF, 21 2023		7.397.209.500,00	823.256.009,00	6.573.953.491,00	0,00
DAKNF, 22 2023		7.397.209.500,00	0,00	7.397.209.500,00	0,00
6548 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan	1.786.551.000,00	1.786.551.000,00	96.284.984,00	1.690.266.016,00	0,00
654812 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	1.786.551.000,00	1.786.551.000,00	96.284.984,00	1.690.266.016,00	0,00
DAKNF, 21 2023		893.275.500,00	96.284.984,00	796.990.516,00	0,00
DAKNF, 22 2023		893.275.500,00	0,00	893.275.500,00	0,00
6549 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	1.712.500.000,00	1.712.500.000,00	1.600.000,00	1.710.900.000,00	0,00
654921 Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman	1.712.500.000,00	1.712.500.000,00	1.600.000,00	1.710.900.000,00	0,00

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
		Kotor	Potongan	Bersih	
Budaya					
DAKNF, 21 2023		856.250.000,00	1.600.000,00	854.650.000,00	0,00
DAKNF, 22 2023		856.250.000,00	0,00	856.250.000,00	0,00
6552 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	375.000.000,00	212.120,00	374.787.880,00	0,00
655211 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	375.000.000,00	212.120,00	374.787.880,00	0,00
DAKNF, 21 2023		187.500.000,00	212.120,00	187.287.880,00	0,00
DAKNF, 22 2023		187.500.000,00	0,00	187.500.000,00	0,00
6553 Dana Fasilitas Penanaman Modal	1.143.400.000,00	571.700.000,00	0,00	571.700.000,00	0,00
655311 Dana Fasilitas Penanaman Modal	1.143.400.000,00	571.700.000,00	0,00	571.700.000,00	0,00
DAKNF, 21 2023		571.700.000,00	0,00	571.700.000,00	0,00

Sumber: SIMTRAD4 (Data diolah, 2023)

Terdapat perbedaan antara realisasi DAK Non Fisik TA 2023 pada LRA dengan realisasi DAK Non Fisik berdasarkan SIMTRADA. Hal tersebut terjadi karena Belanja Dana BOS TA 2023 tidak dianggarkan dalam APBD Induk maupun APBD Perubahan Pemrov Papua, sehingga Pendapatan Dana BOS yang telah disalurkan ke masing-masing sekolah tidak dapat dicatat pada LRA.

5.1.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA -LRA Rp1.051.198.658.000,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA pada TA 2023 terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Dana Insentif Daerah dan Transfer Pengeluaran Non Anggaran.

Pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya-LRA TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.051.198.658.000,00 dan Rp3.804.141.054.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 071
Anggaran dan Realisasi Detil Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LRA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Dana Otonomi Khusus-LRA	1.051.198.658.000,00	1.051.198.658.000,00	100,00	100,00	3.792.655.366.000,00
2 Dana Penyesuaian-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Dana Insentif Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485.688.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya-LRA	1.051.198.658.000,00	1.051.198.658.000,00	100,00	100,00	3.804.141.054.000,00

Pendapatan transfer pusat lainnya TA 2023 sebesar Rp1.051.198.658.000,00 atau mencapai 100,00% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.804.141.054.000,00 maka realisasi transfer pusat lainnya TA 2023 turun sebesar Rp2.752.942.396.000,00 atau sebesar (72,37%). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LRA TA 2023 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Otonomi Khusus TA 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 072
Alokasi dan Realisasi Detil Transfer Dana Otonomi Khusus - LRA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Akun	Pagu	Realisasi			Ditunda
		Kotor	Potongan	Bersih	
64 Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	841.937.511.000,00	841.937.511.000,00	0,00	841.937.511.000,00	0,00
6412 Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	841.937.511.000,00	841.937.511.000,00	0,00	841.937.511.000,00	0,00
641212 Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	580.361.077.000,00	580.361.077.000,00	0,00	580.361.077.000,00	0,00
OTSUS Papua dkk, TAHAP 1 2023		174.108.323.100,00	0,00	174.108.323.100,00	0,00
OTSUS Papua dkk, TAHAP 2 2023		87.468.267.550,00	0,00	87.468.267.550,00	0,00
OTSUS Papua dkk, TAHAP 3 2023		318.784.486.350,00	0,00	318.784.486.350,00	0,00
641213 Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	261.576.434.000,00	261.576.434.000,00	0,00	261.576.434.000,00	0,00
OTSUS Papua dkk, TAHAP 1 2023		78.472.930.200,00	0,00	78.472.930.200,00	0,00
OTSUS Papua dkk, TAHAP 2 2023		117.709.395.300,00	0,00	117.709.395.300,00	0,00
OTSUS Papua dkk, TAHAP 3 2023		65.394.108.500,00	0,00	65.394.108.500,00	0,00

Sumber: SIMTRAD4 (Data diolah, 2023)

5.1.1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus-LRA**Rp1.051.198.658.000,00**

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Salah satu sumber penerimaan Provinsi Papua berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah sumber penerimaan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional;
- 2) Dana Tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan Infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.051.198.658.000,00 dan Rp3.792.655.366.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 073
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus dan
Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LRA	470.837.581.000,00	470.837.581.000,00	100,00	44,79	1.580.796.000.000,00
2 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus ProvPapua-LRA	580.361.077.000,00	580.361.077.000,00	100,00	55,21	2.211.859.366.000,00
Jumlah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	1.051.198.658.000,00	1.051.198.658.000,00	100,00	100,00	3.792.655.366.000,00

Tabel di atas menunjukkan pendapatan transfer Dana Otonomi khusus TA 2023 terealisasi 100,00% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana Otonomi Khusus-LRA terealisasi 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp470.837.581.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.109.958.419.000,00 atau (70,22%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp1.580.796.000.000,00.

Dana Tambahan Infrastruktur-LRA terealisasi 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp580.361.077.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.631.498.289.000,00 atau (73,76%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp2.211.859.366.000,00.

Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus Papua pada tahun 2001, maka pada tahun 2002 Pemerintah Provinsi Papua menerima Transfer Dana Otonomi Khusus untuk pertama kalinya sebesar Rp1.382.282.450.000,00 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2009 mengalami penurunan, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dimana Dana Otonomi Khusus Papua dibagi dengan Provinsi Papua Barat dan selanjutnya mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Total alokasi dan realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp105.455.431.771.550,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 074
Alokasi dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Dari Tahun 2002 s.d. Tahun 2023

(dalam Rupiah)

TAHUN	ANGGARAN	DANA OTONOMI KHUSUS	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR	TOTAL
2002-2012	33.730.917.281.550,00	28.434.488.660.550,00	5.296.428.571.000,00	33.730.917.231.550,00
2013	4.927.378.620.000,00	4.355.950.048.000,00	571.428.572.000,00	4.927.378.620.000,00
2014	6.777.070.560.000,00	4.777.070.560.000,00	2.000.000.000.000,00	6.777.070.560.000,00
2015	7.190.429.880.000,00	4.940.429.880.000,00	2.250.000.000.000,00	7.190.429.880.000,00
2016	7.382.551.859.000,00	5.395.051.859.000,00	1.987.500.000.000,00	7.382.551.859.000,00
2017	8.205.152.407.000,00	5.580.152.407.000,00	2.625.000.000.000,00	8.205.152.407.000,00
2018	8.020.854.115.000,00	5.620.854.115.000,00	2.400.000.000.000,00	8.020.854.115.000,00
2019	8.674.676.695.000,00	5.850.230.158.000,00	2.824.446.537.000,00	8.674.676.695.000,00
2020	7.999.969.920.000,00	5.288.694.844.000,00	2.711.275.076.000,00	7.999.969.920.000,00
2021	7.911.837.607.000,00	5.289.079.464.000,00	2.622.758.143.000,00	7.911.837.607.000,00
2022	3.792.655.366.000,00	1.580.796.000.000,00	2.211.859.366.000,00	3.792.655.366.000,00
2023	841.937.511.000,00	261.576.434.000,00	580.361.077.000,00	841.937.511.000,00
2013-2023	71.724.514.540.000,00	48.939.885.769.000,00	22.784.628.771.000,00	71.724.514.540.000,00
TOTAL	105.455.431.821.550,00	77.374.374.429.550,00	28.081.057.342.000,00	105.455.431.771.550,00

5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah – LRA

Rp0,00

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah TA 2023 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi. Sedangkan pada TA 2022 Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp11.485.688.000,00.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA

Rp517.867.240.653,00

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan transfer pendapatan, yang termasuk hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Pendapatan lain-lain yang sah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah dan 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp517.867.240.653,00 dan Rp4.467.066.197,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 075
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Pendapatan Hibah	0,00	486.710.723.915,00	0,00	93,98	4.396.650.135,00
2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	31.156.516.738,00	0,00	6,02	70.416.062,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA	0,00	517.867.240.653,00	0,00	100,00	4.467.066.197,00

Tabel 076 di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp517.867.240.653,00 atau melebihi anggarannya sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 sebesar Rp4.467.066.197,00, maka realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2023 naik sebesar Rp513.400.174.456,00 atau 11.493,01%.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Unit Organisasi Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada **Lampiran 01**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LRA

Rp486.710.723.915,00

Pendapatan hibah adalah pendapatan berupa uang atau barang/jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN/BUMD, maupun Lembaga/Badan/Organisasi lainnya.

Pendapatan hibah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 terdiri dari: 1). Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri; 2). pendapatan atas Sumbangan Pihak Ketiga.

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA TA 2023 sebesar Rp486.710.723.915,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA TA 2023 dirincikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 076
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	485.021.909.391,00	0,00	485.021.909.391,00	0,00
2 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.688.814.524,00	0,00	1.688.814.524,00	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah-LRA	0,00	486.710.723.915,00	0,00	486.710.723.915,00	0,00

Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp486.710.723.915,00 dalam tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

- o Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri merupakan pendapatan yang dicata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Papua yang kemudian direklasifikasi oleh BPK-RI sebagai penerimaan Pendapatan Hibah dari PT Freeport 13912/STS-EPAD/4.4.12.1/25-08-2023 tanggal sebesar Rp485.021.909.391,00;
- o Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp1.688.814.524,00, ini merupakan pendapatan yang dipungut oleh Samsat, yang kemudian disetorkan ke RKUD sebagai penerimaan daerah pada pendapatan Hibah.

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LRA Rp31.156.516.738,00

Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pemerintah provinsi papua TA 2023 memiliki pendapatan Lainnya yang terdiri dari: 1). Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah dan 2). Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia.

Realisasi Pendapatan Daerah Lainnya-LRA TA 2023 merupakan Pendapatan atas Pengembalian yang terealisasi sebesar Rp31.156.516.738,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Tabel 077
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya-LRA Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	1.066.473.190,00	0,00	1.066.473.190,00	0,00
2 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	30.090.043.548,00	0,00	30.090.043.548,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	31.156.516.738,00	0,00	31.156.516.738,00	0,00

Pendapatan lainnya-LRA TA 2023 dalam tabel 078 diatas dijelaskan sebagai berikut:

- o Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah sebesar Rp1.066.473.190,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00;
- o Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia sebesar Rp30.090.043.548,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00.

Realisasi pendapatan lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.156.516.738,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.086.100.676,00 atau 44.146,32% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp70.416.062,00.

5.1.2 BELANJA DAERAH Rp5.031.849.735.510,84

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas (a) Belanja Operasi, (b) Belanja Modal, (c) Belanja Tidak Terduga dan (d) Belanja Transfer.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp5.031.849.735.510,84 dan TA 2022 Rp11.454.657.535.165,80 dirinci sebagai berikut:

Tabel 078
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Proporsi	(Audited)
1 BELANJA OPERASI	4.580.998.993.122,00	3.936.448.977.955,35	85,93	78,23	8.578.410.637.007,17
2 BELANJA MODAL	574.018.429.744,00	493.844.957.419,80	86,03	9,81	2.029.533.805.428,66
3 BELANJA TIDAK TERDUGA	278.028.534.465,00	163.855.515.062,69	58,93	3,26	196.021.127.021,00
4 BELANJA TRANSFER	451.570.811.333,00	437.700.285.073,00	96,93	8,70	650.691.965.709,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	5.884.616.768.664,00	5.031.849.735.510,84	85,51	100,00	11.454.657.535.165,80

Belanja Daerah TA 2023 terealisasi sebesar Rp5.031.849.735.510,84 atau 85,51% dari anggarannya sebesar Rp5.884.616.768.664,00. Sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp852.767.033.153,16 atau (14,49%). Belanja Operasi mempunyai proporsi 78,23% lebih besar dibandingkan dengan proporsi Belanja Modal 9,81%, proporsi Belanja Tidak Terduga sebesar 3,26% dan proporsi belanja transfer sebesar 8,70% dari total Belanja Daerah.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.422.807.799.654,96 atau (56,07%) bila dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp11.454.657.535.165,80. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pagu anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023. Belanja Daerah Provinsi Papua turun drastis sebagai akibat dari pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua telah resmi diundangkan setelah ditandatangani Tiga undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 25 Juli 2022.

Tiga undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua adalah (1) UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan yang berasal dari wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat; (2) UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah yang berasal dari wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai; dan (3) UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang berasal dari wilayah Provinsi Papua terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.

Belanja Daerah Provinsi Papua lima tahun terakhir sampai dengan TA 2023 dapat dilihat dalam tabel 080 sebagai berikut:

Tabel 079
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua
TA 2019 s.d. TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2019	BELANJA DAERAH	15.447.447.791.782,00	13.421.675.432.410,60	86,89
2	2020	BELANJA DAERAH	14.708.288.005.739,70	12.606.997.656.660,00	85,71
3	2021	BELANJA DAERAH	17.577.357.443.639,00	14.859.606.462.835,80	84,54
4	2022	BELANJA DAERAH	12.910.509.249.727,00	11.454.657.535.165,80	88,72
5	2023	BELANJA DAERAH	5.884.616.768.664,00	5.031.849.735.510,84	85,51

Sumber: LKPD Audited Provinsi Papua

Anggaran dan realisasi dalam tabel 080 diatas dapat kami jelaskan naik dan turun realisasi belanja daerah dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

1. Belanja daerah pemerintah provinsi papua yang terdiri dari belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak Terduga dan Belanja Transfer TA 2019 sebesar Rp13.421.675.432.410,60 ini turun pada TA 2020 sebesar Rp814.677.775.750,60 atau mencapai (6,07%) menjadi sebesar Rp12.606.997.656.660,00, hal ini disebabkan adanya penurunan pagu anggaran pada tahun berjalan dan keterlambatan Pemerintah Provinsi Papua dalam menetapkan APBD perubahan pada TA 2020 yang mana Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan APBD Papua tahun 2020 diperkirakan perimbangan pendapatan dan belanja daerah akan mengalami defisit yang diakibatkan tingginya kebutuhan belanja pembangunan tahun 2020.
2. Belanja daerah pemerintah provinsi papua yang terdiri dari belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak Terduga dan Belanja Transfer TA 2020 sebesar Rp12.606.997.656.660,00, ini naik pada TA 2021 sebesar Rp2.252.608.806.175,80 atau mencapai 17,87% menjadi sebesar Rp14.859.606.462.835,80, hal ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2021 pada umumnya berjalan dengan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum capaian kinerja dan sasaran pada tahun 2021 telah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, Meskipun tingkat efektivitas pencapaian sasaran, masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan, tapi secara umum sudah memperlihatkan capaian yang baik.
3. Belanja daerah pemerintah provinsi papua yang terdiri dari belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp14.859.606.462.835,80, ini turun pada TA 2022 sebesar Rp3.404.948.927.670,00 atau mencapai (22,91%) menjadi sebesar Rp11.454.657.535.165,80, hal ini disebabkan selain turunnya pagu anggaran dan juga keterlambatan dalam menetapkan APBD TA 2022 dan juga ditimbulkan oleh kondisi-kondisi obyektif karena adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, yang tidak selalu mampu mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh. penyerapan anggaran belanja tidak optimal, karena perencanaan anggaran yang kurang matang sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan, perubahan harga saat pelaksanaan mengakibatkan anggaran tidak terserap semua, efisiensi anggaran dana gagal lelang atau keterlambatan lelang juga mengakibatkan anggaran tidak terserap optimal Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah per Unit Organisasi / OPD Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada **Lampiran 03**.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan realisasi TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1

BELANJA OPERASI

Rp3.936.448.977.955,35

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja Operasi dirinci atas jenis a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp3.936.448.977.955,35 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp8.578.410.637.007,17 dirinci sebagai berikut:

Tabel 080
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Papua
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Proporsi	(Audited)
1 Belanja Pegawai	1.262.555.513.494,00	1.098.194.585.460,00	86,98	27,90	2.413.293.504.407,00
2 Belanja Barang dan Jasa	2.421.248.410.899,00	2.123.340.461.900,44	87,70	53,94	4.487.048.045.881,96
3 Belanja Subsidi	301.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Belanja Hibah	873.042.135.284,00	695.069.090.926,91	79,61	17,66	1.634.316.326.641,84
5 Belanja Bantuan Sosial	23.851.193.445,00	19.844.839.668,00	83,20	0,50	43.752.760.076,37
Jumlah Belanja Operasi	4.580.998.993.122,00	3.936.448.977.955,35	85,93	100,00	8.578.410.637.007,17

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 tertinggi terdapat pada belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.123.340.461.900,44 atau 87,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.421.248.410.899,00 dan realisasi terendah terdapat pada Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp19.844.839.668,00 atau 83,20% dari yang telah dianggarkan pada perubahan APBD sebesar Rp23.851.193.445,00 sedangkan pada Belanja Subsidi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp301.740.000,00.

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp3.936.448.977.955,35 atau 85,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.580.998.993.122,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp8.578.410.637.007,17; maka Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 turun sebesar Rp4.641.961.659.051,82 atau (54,11%). Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi per Unit Organisasi Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada **Lampiran 04**.

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp1.098.194.585.460,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai dengan perjanjian kerja yang dipekerjakan oleh pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Pemerintah Provinsi Papua pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.098.194.585.460,00 atau mencapai 86,98%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat belanja pegawai yang tidak terealisasi sebesar Rp164.360.928.034,00 atau (13,02%) dari anggarannya sebesar Rp1.262.555.513.494,00. Belanja pegawai Pemerintah Provinsi Papua mempunyai Proporsi sebesar 27,90% terhadap total Belanja Operasi sebesar Rp3.936.448.977.955,35.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 081
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	504.392.191.732,00	476.257.019.646,00	94,42	(28.135.172.086,00)	(5,58)
2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	572.950.690.251,00	452.695.931.315,00	79,01	(120.254.758.936,00)	(20,99)
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.066.236.900,00	55.324.448.420,00	90,60	(5.741.788.480,00)	(9,40)
4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	74.552.248.426,00	65.608.120.033,00	88,00	(8.944.128.393,00)	(12,00)
5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	386.955.000,00	50.000.000,00	12,92	(336.955.000,00)	(87,08)
6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.295.141.277,00	360.000.000,00	27,80	(935.141.277,00)	(72,20)
7 Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	39.012.049.908,00	38.999.066.046,00	99,97	(12.983.862,00)	(0,03)
8 Belanja Pegawai BLUD	8.900.000.000,00	8.900.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai	1.262.555.513.494,00	1.098.194.585.460,00	86,98	(164.360.928.034,00)	(13,02)

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp476.257.019.646,00 atau 94,42% dari yang telah dianggarkan sebesar Rp504.392.191.732,00. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2022 sebesar Rp2.413.293.504.407,00, maka realisasi belanja pegawai pada TA 2023 turun sebesar Rp1.315.098.918.947,00 atau (54,49%).

rincian belanja pegawai Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 per unit organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 04.**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp2.123.340.461.900,44

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang dan jasa-jasa pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2023 sebesar Rp2.123.340.461.900,44 atau mencapai 87,70% dan yang tidak terealisasi sebesar Rp297.907.948.998,56 atau (12,30%) dari anggarannya. Belanja Barang dan Jasa mempunyai proporsi 53,94% terhadap total realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp3.936.448.977.955,35.

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 082
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Belanja Barang	1.134.097.716.319,00	1.024.220.909.349,24	90,31	(109.876.806.969,76)	(9,69)
2 Belanja Jasa	542.851.842.861,00	484.951.833.993,13	89,33	(57.900.008.867,87)	(10,67)
3 Belanja Pemeliharaan	131.554.507.098,00	123.673.504.359,07	94,01	(7.881.002.738,93)	(5,99)
4 Belanja Perjalanan Dinas	483.757.140.669,00	429.236.126.267,00	88,73	(54.521.014.402,00)	(11,27)
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.807.247.835,00	3.742.110.040,00	98,29	(65.137.795,00)	(1,71)
6 Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00	0,00	0,00
7 Belanja Barang dan Jasa BLUD	120.779.956.117,00	53.115.977.892,00	43,98	(67.663.978.225,00)	(56,02)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	2.421.248.410.899,00	2.123.340.461.900,44	87,70	(297.907.948.998,56)	(12,30)

Realisasi belanja barang dan jasa tertinggi terdapat pada belanja barang sebesar Rp1.024.220.909.349,24 atau 90,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.134.097.716.319,00; dan realisasi terendah terdapat pada belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.742.110.040,00; atau 98,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.807.247.835,00. Realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.024.220.909.349,24 atau 90,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.134.097.716.319,00 terdiri dari:

- (1) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp1.023.693.916.889,24;
- (2) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp526.992.460,00.

2. Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp484.951.833.993,13 atau 89,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp542.851.842.861,00 terdiri dari:

- (1) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp289.918.666.165,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp28.295.295.058,00;
- (3) Belanja Sewa Tanah sebesar Rp1.604.960.000,00;
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp55.748.243.119,86;
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.808.686.895,20;
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp352.100.000,00;
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp45.327.732.285,07;
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp1.146.807.600,00;
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp4.165.571.000,00;
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp16.021.872.382,00;
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.561.899.488,00.

3. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp123.673.504.359,07 atau 94,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp131.554.507.098,00, terdiri dari:

- (1) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp22.302.955.619,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.746.235.939,00;
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.019.609.078,78;
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp35.879.762.672,29;
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.124.986.050,00;
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp599.955.000,00.

4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp429.236.126.267,00 atau 88,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp483.757.140.669,00, terdiri dari:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp426.672.564.774,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp2.563.561.493,00.

5. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.742.110.040,00 atau 98,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.807.247.835,00, terdiri dari:

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.831.250.000,00;
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp910.860.040,00.

6. Realisasi Belanja Penunjang Otonomi Khusus sebesar Rp4.400.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.400.000.000,00.

7. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp53.115.977.892,00 atau 43,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.779.956.117,00.

Belanja barang dan jasa TA 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp4.487.048.045.881,96, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.363.707.583.981,52 atau (52,68%).

Rincian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 per unit organisasi dapat dilihat pada **Lampiran 04**

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi Rp0,00

Belanja subsidi merupakan anggaran pemerintah yang dialokasikan kepada pabrikan dengan maksud membantu biaya produksi supaya harga jual terjangkau oleh masyarakat. Anggaran ini terutama untuk “*Public Service Obligation*” yang harga jualnya diintervensi oleh pemerintah.

Realisasi belanja subsidi Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggarannya sebesar Rp301.740.000,00. Belanja subsidi mempunyai Proporsi 0,00% terhadap total realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp3.936.448.977.955,35.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah Rp695.069.090.926,91

Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi belanja hibah pada TA 2023 sebesar Rp695.069.090.926,91 atau mencapai 79,61%. Hal ini berarti tidak terealisasi sebesar Rp177.973.044.357,09 atau (20,39%) dari anggarannya sebesar

Rp873.042.135.284,00. Belanja hibah mempunyai Proporsi 17,66% terhadap total realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp3.936.448.977.955,35. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah pada TA 2022 sebesar Rp1.634.316.326.641,84 maka realisasi Belanja Hibah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp939.247.235.714,93 atau (57,47%). Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 083
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	0,00	0,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)
2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	43.825.026.925,00	43.393.634.566,00	99,02	(431.392.359,00)	(0,98)
3 Belanja Hibah kepada BUMN	193.725.648,00	0,00	0,00	(193.725.648,00)	(100)
4 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	816.913.197.031,00	647.588.037.966,91	79,27	(169.325.159.064,09)	(20,73)
5 Belanja Hibah Dana BOS	2.335.512.730,00	313.814.394,00	13,44	(2.021.698.336,00)	(86,56)
6 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.774.672.950,00	3.773.604.000,00	65,35	(2.001.068.950,00)	(34,65)
Jumlah Belanja Hibah	873.042.135.284,00	695.069.090.926,91	79,61	(177.973.044.357,09)	(20,39)

Realisasi belanja Hibah pada TA 2023 sebesar Rp695.069.090.926,91 terdiri dari belanja hibah barang sebesar Rp20.467.457.253,00 dan Hibah Berupa Uang sebesar Rp675.662.680.877,00, dapat dijelaskan dalam rincian penerima Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua sebagai berikut:

No.	Nama Rekening	Jumlah
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp 0,00
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 namun tidak ada realisasi sampai dengan Tahun 2023 berakhir	
2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 43.393.634.566,00
a.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 30.000.000.000,00
	Pembayaran Bantuan Hibah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kepada Provinsi DOB guna menunjang Pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan Pemerintahan Tahun 2023	Rp 30.000.000.000,00
	1) Provinsi Papua Selatan	Rp 10.000.000.000,00
	2) Provinsi Papua Tengah	Rp 10.000.000.000,00
	3) Provinsi Papua Pegunungan	Rp 10.000.000.000,00
b.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 13.393.634.566,00
	Pembayaran Bantuan Hibah Barang melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral kepada Pemerintah Daerah:	Rp 13.393.634.566,00
	1) Kabupaten Biak Numfor Pengadaan Solar Home System (SHS)	Rp 397.141.350,00
	2) Kabupaten Mamberamo Raya Repitalisasi PLTS 15 KWP	Rp 1.225.789.412,00
	3) Kabupaten Sarmi Pengadaan Solar Home System (SHS)	Rp 397.568.700,00
	4) Kabupaten Waropen Pengadaan Solar Home System (SHS)	Rp 396.686.250,00
	5) Kabupaten Jayapura Repitalisasi Pembangunan PLTMH	Rp 1.586.828.600,00
	6) Kabupaten Jayapura Repitalisasi PLTS 30 KWP	Rp 2.780.491.170,00
	7) Kabupaten Keerom Repitalisasi PLTS 15 KWP	Rp 671.379.637,00
	8) Kabupaten Keerom Repitalisasi PLTS 10 KWP	Rp 2.554.616.087,00
	9) Kabupaten Kepulauan Yapen Pengadaan Solar Home System (SHS)	Rp 396.408.750,00
	10) Kabupaten Kepulauan Yapen Repitalisasi Pembangunan PLTMH	Rp 2.986.724.610,00
3.	Belanja Hibah kepada BUMN	Rp 0,00
	Belanja Hibah kepada BUMN dianggarkan sebesar Rp193.725.648,00 namun tidak ada realisasi sampai dengan Tahun 2023 berakhir	
4.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp 647.588.037.966,91
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dibayarkan melalui SKPD/OPD:	Rp 153.805.138.402,00
	1) Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 30.000.000,00
	2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Rp 153.775.138.402,00
b.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dibayarkan melalui SKPD/OPD:	Rp 336.586.161.436,92
	1) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 87.654.559,92
	2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Rp 336.498.506.877,00
c.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dibayarkan melalui SKPD/OPD:	Rp 152.140.678.383,52
	1) Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 1.000.000.000,00
	2) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 100.108.384,24
	3) Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 499.999.999,28
	4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Rp 150.540.570.000,00
d.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dibayarkan melalui SKPD/OPD:	Rp 5.012.109.744,47
	1) Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 37.984.200,00
	2) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 2.493.698.721,67
	3) Cabang Dinas Kehutanan Jayapura	Rp 14.606.550,00
	4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Rp 1.836.957.000,00
	3) Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 628.863.272,80
e.	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi untuk Kegiatan Peningkatan Produktivitas,	Rp 43.950.000,00

No.	Nama Rekening	Jumlah
	Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha yang dibayarkan melalui SKPD/OPD: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Rp 43.950.000,00
5.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri TA 2023	Rp 300.000.000,00
	Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah kepada:	Rp 300.000.000,00
	1) SMKN 1 Jayapura	Rp 100.000.000,00
	2) SMKN 4 Jayapura	Rp 100.000.000,00
	3) SMKN 2 Biak	Rp 100.000.000,00
6.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp 3.773.604.000,00
	Pembayaran Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Papua kepada Partai Politik melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Rp 3.773.604.000,00
	1) DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Papua	Rp 267.007.200,00
	2) DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Papua	Rp 251.739.600,00
	3) DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua	Rp 119.910.000,00
	4) DPD Partai Demokrat Provinsi Papua	Rp 516.777.600,00
	5) DPD Partai Garuda Perubahan Indonesia Provinsi Papua	Rp 121.232.400,00
	6) DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua	Rp 343.866.000,00
	7) DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua	Rp 217.486.800,00
	8) DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua	Rp 261.508.800,00
	9) DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua	Rp 337.802.400,00
	10) DPW Partai Nasdem Provinsi Papua	Rp 541.008.000,00
	11) DPW Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Provinsi Papua	Rp 166.142.400,00
	12) DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Papua	Rp 451.651.200,00
	13) DPW Partai Berkarya Provinsi Papua	Rp 177.471.600,00

Realisasi Belanja Bantuan Hibah pada TA 2023 sebesar Rp695.069.090.926,91 terdiri dari Belanja Bantuan Hibah berupa Barang sebesar Rp20.467.457.253,00 dan telah di pertanggungjawabkan oleh masing-masing OPD pemberi Bantuan Hibah dan pada Belanja Bantuan Hibah Berupa Uang terealisasi sebesar Rp675.662.680.877,00 telah dipertanggungjawabkan oleh para penerima Bantuan Hibah Uang sebesar Rp600.893.570.079,00 atau mencapai 88,38% dan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp31.074.861.598,00 atau 4,60% dan Bantuan Hibah yang tidak digunakan dan dikembalikan sebesar Rp43.694.249.200,00 atau 6,47%.

Pelaporan realisasi belanja hibah sampai dengan akhir TA 2023 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi Papua bertanggung-jawab mulai dari verifikasi usulan calon penerima hibah sampai dengan hibah tersebut dicairkan kepada penerimanya dengan dilengkapi bukti-bukti yang sah. Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 19, penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta menyimpan bukti-bukti penggunaan hibah sebagai obyek pemeriksaan.

Rincian Belanja Hibah baik barang maupun Hibah Uang Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 04**.

5.1.2.1.5 Bantuan Sosial Rp19.844.839.668,00

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.

Realisasi belanja Bantuan Sosial pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp19.844.839.668,00 atau mencapai 83,20% dari anggarannya sebesar Rp23.851.193.445,00. Hal ini berarti terdapat belanja bantuan sosial yang tidak terealisasi sebesar Rp4.006.353.777,00 atau (16,80%). Belanja Bantuan Sosial mempunyai Proporsi 0,50% terhadap total realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp3.936.448.977.955,35.

Bila dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial pada TA 2022 sebesar Rp43.752.760.076,37 maka realisasi belanja bantuan sosial pada TA 2023 turun sebesar Rp23.907.920.408,37 atau (54,64%).

Anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 084
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.646.998.445,00	10.663.000.000,00	72,80	(3.983.998.445,00)	(27,20)
2 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.004.195.000,00	3.981.839.668,00	99,44	(22.355.332,00)	(0,56)
3 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	23.851.193.445,00	19.844.839.668,00	83,20	(4.006.353.777,00)	(16,80)

Realisasi belanja Bantuan Sosial pada TA 2023 sebesar Rp19.844.839.668,00 pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Rp 10.663.000.000,00
a.	Belanja Bantuan Sosial untuk Renovasi Rumah	Rp 1.380.000.000,00
b.	Belanja Bantuan Sosial untuk Modal Usaha	Rp 1.411.000.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial untuk Biaya Perjalanan	Rp 197.000.000,00
d.	Belanja Bantuan Sosial untuk Biaya Pengobatan	Rp 4.145.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial untuk Biaya Pendidikan	Rp 3.080.000.000,00
f.	Belanja Bantuan Sosial untuk Bansos Lain-lain	Rp 450.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	Rp 3.981.839.668,00
a.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Rp 150.000.000,00
1)	Panitia Jayapura Youth Revival 2 Tahun 2023	Rp 150.000.000,00
b.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Rp 3.831.839.668,00
1)	Pengadaan Bantuan Mesin Sagu Dan Mesin Parut Kelapa Di Kabupaten Sarmi	Rp 198.912.000,00
2)	Pengadaan Bantuan Peralatan Nelayan Tangkap Ikan Di Kab. Biak Numfor	Rp 296.814.000,00
3)	Keg. Identifikasi Wirausaha Pemula Dan Pelatihan Bisnis Bagi Masyarakat Kampung Di 5 (Lima) Wilayah Adat di Kabupaten Jayapura	Rp 796.308.450,00
4)	Keg. Identifikasi Wirausaha Pemula Dan Pelatihan Bisnis Bagi Masyarakat Kampung Di 5 (Lima) Wilayah Adat di Kabupaten Mamberamo Raya	Rp 397.967.190,00
5)	Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat (Kota Jayapura) Penunjang Keg. Identifikasi Wirausaha Pemula Dan Pelatihan Bisnis	Rp 796.812.390,00
6)	Pemboran Ekplorasi Air Tanah dan lainnya di Kota Jayapura	Rp 1.345.025.638,00
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Rp 5.200.000.000,00
a.	Panitia Pelaksana Dharma Santih (SIMAKRAMA) Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1945 Tingkat Provinsi Papua Tahun 2023	Rp 250.000.000,00
b.	Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Papua	Rp 250.000.000,00
c.	Panitia Pelaksana Kongres Nasional XVI Departemen Pemuda Dan Anak Gereja Bethel Indonesia (GBI) Tahun 2023	Rp 200.000.000,00
d.	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Papua	Rp 4.000.000.000,00
e.	Panitia Muktamar III Majelis Muslim Papua (MMP) Tahun 2023 Di Jayapura	Rp 500.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2023 sebesar Rp19.844.839.668,00 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial berupa Barang sebesar Rp3.831.839.668,00 yang telah di pertanggungjawabkan oleh masih - masing OPD pemberi Bantuan Sosial dan pada Bantuan Sosial Berupa Uang sebesar Rp16.013.000.000,00 telah dipertanggungjawabkan oleh para penerima Bantuan Sosial sebesar Rp14.216.000.000,00 atau mencapai 88,78% dan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.797.000.000,00 atau 11,22%.

Pelaporan belanja bantuan sosial Pemerintah Provinsi Papua telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450).

Rincian Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 04**.

5.1.2.2

BELANJA MODAL**Rp493.844.957.419,80**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Belanja Modal Provinsi Papua TA 2023 terdiri dari: (1). Belanja Modal Tanah; (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan (6) Belanja Modal Aset Lainnya.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 sebesar Rp493.844.957.419,80, atau mencapai 86,03%. Hal ini berarti sebesar Rp80.173.472.324,20, atau (13,97%) dari anggarannya sebesar Rp574.018.429.744,00 yang tidak terealisasi. Belanja Modal mempunyai proporsi 9,81% terhadap total realisasi belanja TA 2023 sebesar Rp5.031.849.735.510,84.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2023 dan realisasi TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 085
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Proporsi	(Audited)
1 Belanja Modal Tanah	13.000.000.000,00	12.734.748.904,00	97,96	2,58	25.000.000.000,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.470.932.556,00	136.329.618.455,43	96,37	27,61	236.086.848.452,50
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.931.739.137,00	103.129.046.171,65	89,73	20,88	1.054.570.476.959,30
4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	301.975.408.051,00	239.023.566.448,72	79,15	48,40	709.924.786.398,86
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.640.350.000,00	2.627.977.440,00	99,53	0,53	2.504.767.568,00
6 Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.926.050,00
Jumlah Belanja Modal	574.018.429.744,00	493.844.957.419,80	86,03	100,00	2.029.533.805.428,66

Realisasi belanja Modal TA 2023 sebesar Rp493.844.957.419,80 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada TA 2022 sebesar Rp2.029.533.805.428,66, maka realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.535.688.848.008,86 atau (75,67%). Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Unit Organisasi/OPD Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada **Lampiran 05**. Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.2.1

BELANJA TANAH**Rp12.734.748.904,00**

Belanja Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Belanja Modal Tanah Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 terdiri dari : (1). Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dan (2) Belanja Modal Tanah untuk Jalan.

Realisasi Belanja Modal tanah pada TA 2023 sebesar Rp12.734.748.904,00, atau mencapai 97,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.000.000.000,00. Hal ini berarti terdapat belanja sebesar Rp265.251.096,00, atau (2,04%) dari anggarannya yang tidak terealisasi.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal tanah Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 086
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.000.000.000,00	1.734.748.904,00	86,74	(265.251.096,00)	(13,26)
2 Belanja Modal Tanah untuk Jalan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah	13.000.000.000,00	12.734.748.904,00	97,96	(265.251.096,00)	(2,04)

Belanja Modal Tanah mempunyai proporsi 2,58% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp493.844.957.419,80. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tanah pada TA 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00; maka realisasi Belanja Modal tanah turun sebesar Rp12.265.251.096,00, atau (49,06%) pada TA 2023.

Belanja Modal Tanah untuk jalan sebesar Rp11.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00, merupakan realisasi pembayaran atas :

- 1) Pembayaran Ganti Rugi Lahan Ulayat Untuk Jalan (Kota Jayapura/Kabupaten Jayapura) (Tahap 2 Pembangunan Ruas Jalan Container Maribu-Depapre) sesuai Berita acara No.03/BA/XI/2023 Tgl. 12 Desember 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 sesuai SP2D nomor: 06568/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.1.0/LS/12-2023 tanggal 19/12/2023;
- 2) Pembayaran Ganti Rugi Lahan Ulayat Untuk Jalan (Kota Jayapura/Kabupaten Jayapura) (Tanah Ulayat Cibery-Holtecamp) Luas 16.596 m X 23 M sesuai Berita acara No. 01/BA/XI/2023 Tgl. 10 Desember 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00; sesuai SP2D nomor: 06589/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.1.0/LS/12-2023 tanggal 19/12/2023;
- 3) Pembayaran Ganti Rugi Lahan Ulayat Untuk Jalan (Kota Jayapura/Kabupaten Jayapura) (Tanah Ulayat Cibery-Holtecamp Bersertifikat) Luas 200 m X 23 M Dari Luas Tanah Keseluruhan (28.184 M2)sesuai Berita acara No. 02/BA/XI/2023 Tgl. 13 November 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00; sesuai SP2D nomor: 06596/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.1.0/LS/12-2023 tanggal 19/12/2023; dan
- 4) Pembayaran Ganti Rugi Lahan Jalan Buper Telaga Ria (Rusun Polda Papua) sesuai Kontrak No. 620/26744 Tgl. 12 Desember 2023 sebesar Rp.1.000.000.000,00; sesuai SP2D nomor: 07152/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.1.0/LS/12-2023 tanggal 22/12/2023.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per Unit Organisasi Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada **Lampiran 05**.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp136.329.618.455,43

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan biaya yang dikeluarkan berdasarkan harga perolehan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin sehingga dapat digunakan.

Belanja modal peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 terdiri dari: (1) Belanja Modal Alat Besar; (2) Belanja Modal Alat Angkutan; (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; (4) Belanja Modal Alat Pertanian; (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar; (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; (8) Belanja Modal Alat Laboratorium; (9) Belanja Modal Komputer; (10) Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian; dan (11) Belanja Modal Rambu-Rambu.

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada TA 2023 sebesar Rp136.329.618.455,43 atau mencapai 96,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.470.932.556,00. Hal ini berarti terdapat belanja sebesar Rp5.141.314.100,57 atau (3,63%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal peralatan dan mesin mempunyai proporsi 27,61% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp493.844.957.419,80.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 087
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

Uraian		ANGGARAN 2023		REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
		(Perda No.8/2023)		Rp	%	Rp	%
1	Belanja Modal Alat Besar	1.190.522.134,00	1.095.631.635,00	92,03	(94.890.499,00)	(7,97)	
2	Belanja Modal Alat Angkutan	15.367.082.000,00	13.131.149.169,00	85,45	(2.235.932.831,00)	(14,55)	
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.009.000.225,00	1.005.532.075,00	99,66	(3.468.150,00)	(0,34)	
4	Belanja Modal Alat Pertanian	5.446.832.500,00	5.414.136.047,20	99,40	(32.696.452,80)	(0,60)	
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.190.821.039,00	10.602.457.214,00	86,97	(1.588.363.825,00)	(13,03)	
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan	673.982.147,00	652.249.580,00	96,78	(21.732.567,00)	(3,22)	

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
Pemancar					
7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	90.292.651.569,00	89.894.341.876,00	99,56	(398.309.693,00)	(0,44)
8 Belanja Modal Alat Laboratorium	1.512.541.000,00	1.407.794.224,00	93,07	(104.746.776,00)	(6,93)
9 Belanja Modal Komputer	12.622.714.350,00	11.969.757.822,00	94,83	(652.956.528,00)	(5,17)
10 Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	264.785.592,00	260.794.500,00	98,49	(3.991.092,00)	(1,51)
11 Belanja Modal Rambu-Rambu	900.000.000,00	895.774.313,23	99,53	(4.225.686,77)	(0,47)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.470.932.556,00	136.329.618.455,43	96,37	(5.141.314.100,57)	(3,63)

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 tertinggi terdapat pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp89.894.341.876,00 atau mencapai 99,56% dari yang telah dianggarkan pada perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp90.292.651.569,00, sedangkan realisasi belanja terendah terdapat pada Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp260.794.500,00 atau mencapai 98,49% dari yang dianggarkan pada perubahan APBD sebesar Rp264.785.592,00.

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada TA 2023 sebesar Rp136.329.618.455,43, atau mencapai 96,37% ini bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada TA 2022 sebesar Rp236.086.848.452,50 maka realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada TA 2023 turun sebesar Rp99.757.229.997,07 atau (42,25%).

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Unit Organisasi Tahun Anggaran 2023 pada **Lampiran 05**.

5.1.2.2.3 **Belanja Gedung dan Bangunan** **Rp103.129.046.171,65**

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini terdiri dari biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya konstruksi.

Belanja modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 terdiri dari: (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal dan (3) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2023 sebesar Rp103.129.046.171,65 atau mencapai 89,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.931.739.137,00. Hal ini berarti terdapat belanja sebesar Rp11.802.692.965,35, atau (10,27%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal gedung dan bangunan Pemerintah Provinsi Papua mempunyai proporsi 20,88% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp493.844.957.419,80.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 088
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.810.659.685,00	20.294.299.060,30	93,05	(1.516.360.624,70)	(6,95)
2 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.122.800.000,00	1.121.361.143,00	99,87	(1.438.857,00)	(0,13)
3 Belanja Modal Bangunan Kesehatan	27.340.540.000,00	26.108.047.468,00	95,49	(1.232.492.532,00)	(4,51)
4 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.083.318.000,00	9.955.925.178,80	98,74	(127.392.821,20)	(1,26)
5 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	220.000.000,00	219.262.805,57	99,66	(737.194,43)	(0,34)
6 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00	99.404.362,13	99,40	(595.637,87)	(0,60)
7 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	16.601.332.452,00	12.847.376.170,00	77,39	(3.753.956.282,00)	(22,61)
8 Belanja Modal Bangunan Industri	60.000.000,00	59.384.384,02	98,97	(615.615,98)	(1,03)
9 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.600.000.000,00	1.591.774.012,86	99,49	(8.225.987,14)	(0,51)
10 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.960.943.000,00	2.357.335.492,42	79,61	(603.607.507,58)	(20,39)
11 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	6.272.500.000,00	6.148.031.832,50	98,02	(124.468.167,50)	(1,98)
12 Belanja Modal Bangunan Parkir	300.000.000,00	299.391.281,00	99,80	(608.719,00)	(0,20)
13 Belanja Modal Taman	16.950.750.000,00	16.800.089.890,03	99,11	(150.660.109,97)	(0,89)
14 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.390.000.000,00	304.243.559,02	6,93	(4.085.756.440,98)	(93,07)
15 Belanja Modal Asrama	1.375.000.000,00	1.371.857.000,00	99,77	(3.143.000,00)	(0,23)
16 Belanja Modal Pagar	3.743.896.000,00	3.551.262.532,00	94,85	(192.633.468,00)	(5,15)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.931.739.137,00	103.129.046.171,65	89,73	(11.802.692.965,35)	(10,27)

Realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 tertinggi terdapat pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp98.205.926.639,65 atau 89,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.812.843.137,00 sedangkan realisasi terendah terdapat pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp1.371.857.000,00 atau 99,77% dari yang dianggarkan pada perubahan APBD sebesar Rp1.375.000.000,00.

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2023 sebesar Rp103.129.046.171,65, apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2022 sebesar Rp1.054.570.476.959,30, maka realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2023 turun sebesar Rp951.441.430.787,65 atau (90,22%).

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Unit Organisasi Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada **Lampiran 05**.

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp239.023.566.448,72

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini terdiri dari biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya konstruksi.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2023 sebesar Rp239.023.566.448,72 atau mencapai 79,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp301.975.408.051,00. Hal ini berarti sebesar negatif Rp62.951.841.602,28, atau (20,85%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mempunyai proporsi 48,40% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp493.844.957.419,80.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 089
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Belanja Modal Jalan	278.381.196.646,00	233.218.157.310,91	83,78	(45.163.039.335,09)	(16,22)
2 Belanja Modal Jembatan	23.594.211.405,00	5.805.409.137,81	24,61	(17.788.802.267,19)	(75,39)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	301.975.408.051,00	239.023.566.448,72	79,15	(62.951.841.602,28)	(20,85)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2023 sebesar Rp239.023.566.448,72 atau mencapai 79,15% apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2022 sebesar Rp709.924.786.398,86 maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan turun sebesar Rp470.901.219.950,14 atau (66,33%) pada TA 2023.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan per Unit Organisasi Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada **Lampiran 05**.

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Rp2.627.977.440,00

Belanja Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2023 sebesar Rp2.627.977.440,00 atau mencapai 99,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.640.350.000,00. Hal ini berarti sebesar negatif Rp12.372.560,00 atau (0,47%) dari anggarannya yang tidak terealisasi. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mempunyai proporsi 0,53% terhadap total realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp493.844.957.419,80.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 090
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)		LEBIH/(KURANG)	
	(Perda No.8/2023)	Rp	%	Rp	%
1 Belanja Modal Buku Umum	345.000.000,00	335.744.000,00	97,32	(9.256.000,00)	(2,68)
2 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
3 Belanja Modal Barang Kerajinan	104.860.000,00	104.848.000,00	99,99	(12.000,00)	(0,01)
4 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	(100.000,00)	(0,10)
5 Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	1.507.290.000,00	1.506.773.940,00	99,97	(516.060,00)	(0,03)
6 Belanja Modal Software	280.000.000,00	278.736.000,00	99,55	(1.264.000,00)	(0,45)
7 Belanja Modal Kajian	302.000.000,00	301.975.500,00	99,99	(24.500,00)	(0,01)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.640.350.000,00	2.627.977.440,00	99,53	(12.372.560,00)	(0,47)

Belanja modal aset tetap lainnya Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp2.627.977.440,00 atau mencapai 99,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.640.350.000,00 terdiri dari: (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp335.744.000,00; (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebesar Rp204.748.000,00; (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebesar Rp1.506.773.940,00; dan (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp580.711.500,00.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya Rp0,00

Belanja Modal aset lainnya merupakan Belanja Modal yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam Belanja Modal tanah, peralatan mesin, jalan, jaringan dan irigasi serta Belanja Modal bangunan dan Gedung. Belanja Modal Aset Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memperoleh Aset Lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2023 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA Rp163.855.515.062,69

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga Rp163.855.515.062,69

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Papua dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Nomor 24 tahun 2013 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2023 sebesar Rp163.855.515.062,69 atau 58,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp278.028.534.465,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2022 sebesar Rp196.021.127.021,00, maka realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2023 turun sebesar Rp32.165.611.958,31 atau (16,41%).

Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 091
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Papua
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Proporsi	(Audited)
1 Belanja Tidak Terduga	278.028.534.465,00	163.855.515.062,69	58,93	100,00	196.021.127.021,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	278.028.534.465,00	163.855.515.062,69	58,93	100,00	196.021.127.021,00

Realisasi Belanja Tidak terduga Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp163.855.515.062,69 pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Hibah Kepada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Dlm Rangka Pemberian Insentif Penanganan Covid-19 Bagi Tenaga Kesehatan RSUD Abepura (Juli S.D Desember 2020 dan Oktober S.D Desember 2021)	Rp 14.404.918.832,00
2	Hibah Kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura Guna Menunjang Dana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Belanja Jasa Tenaga Kesehatan) Tahun 2023	Rp 3.194.954.799,00
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Dalam Rangka Penyelesaian Tunggakan Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Provinsi Papua Dalam Dan Luar Negeri Tahun 2022	Rp122.756.757.988,00
4	Setoran Pengembalian Atas Bantuan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Rangka Penyelesaian Tunggakan Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Provinsi Papua Dalam Dan Luar Negeri Tahun 2022	Rp (76.602.310.126,31)
5	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Papua	Rp 15.000.000.000,00
6	Tim Penanganan Pemulangan Jenasah Almarhum Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH, dan Penyelesaian Konflik	Rp 7.500.000.000,00
7	Hibah Kepada Polda Papua, Korem 172/PPWJ, Kodim Dan Satgas Mandala IV	Rp 16.750.000.000,00
8	Kontingen Papua Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVI Palembang Dalam Rangka Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVI Tahun 2023 Di Palembang Sumatera Selatan	Rp 2.000.000.000,00
9	Hibah Kepada Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	Rp 38.196.220.410,00
10	Setoran Pengembalian Sisa Dana Keg. Tim Perumus Dan Penyusun Lap Ket. Pertanggungjawaban Masa Jabatan Gubernur Papua Periode Tahun 2019-2023	Rp (118.800.000,00)
11	Hibah Kepada Individu/Perorangan	Rp 20.773.773.160,00

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER Rp437.700.285.073,00

Transfer yang dimaksud adalah bagian dari Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada kabupaten/kota se-Provinsi Papua, termasuk Transfer Bagi Hasil Pendapatan kepada Kabupaten/Kota dan Transfer Bantuan Keuangan.

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Papua kepada kabupaten/kota se-Provinsi Papua terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp437.700.285.073,00 dan Tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp650.691.965.709,00, dirinci dalam tabel anggaran dan realisasi belanja transfer Provinsi Papua sebagai berikut:

Tabel 092
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Proporsi	(Audited)
1 Belanja Bagi Hasil	439.570.811.333,00	425.700.285.073,00	96,84	97,26	650.691.965.709,00
2 Belanja Bantuan Keuangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	2,74	0,00
Jumlah Belanja Transfer	451.570.811.333,00	437.700.285.073,00	96,93	100,00	650.691.965.709,00

5.1.2.4.1 Belanja Transfer Bagi Hasil Rp425.700.285.073,00

Transfer bagi hasil merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa bagi hasil.

Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp425.700.285.073,00 atau 96,84% dari anggarannya dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp650.691.965.709,00, maka realisasi pada TA 2023 turun sebesar Rp224.991.680.636,00 atau (34,58%).

Anggaran dan Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota Provinsi Papua TA 2023 dan Realisasi TA 2022 di rinci sebagai berikut:

Tabel 093
Anggaran dan Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Proporsi	(Audited)
1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	360.711.168.520,00	351.571.708.365,00	97,47	82,59	650.691.965.709,00
2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	78.859.642.813,00	74.128.576.708,00	94,00	17,41	0,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pajak	439.570.811.333,00	425.700.285.073,00	96,84	100,00	650.691.965.709,00

5.1.2.4.2 Belanja Transfer Bantuan Keuangan Rp12.000.000.000,00

Transfer Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00, maka realisasi belanja transfer bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 naik sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 100,00%.

Realisasi belanja bantuan keuangan TA 2023 dan 2022 masing-masing dirinci sebagai berikut:

Tabel 094
Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Papua
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Proporsi	(Audited)
1 Belanja Bantuan Keuangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	100,00	0,00

Belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000.000,00 ini terdiri dari:

- Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Keerom dalam rangka Pengadaan Alat untuk Tanam Padi dan Jagung Tahun 2023 sesuai nomor SP2D 05148/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.1.0/LS/11-2023 tanggal 21/11/2023 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya guna menunjang Pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan untuk Rumah Sakit Mamberamo Raya Tahun 2023 sesuai nomor SP2D 05819/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.1.0/LS/12-2023 tanggal 08/12/2023 sebesar Rp10.000.000.000,00.

5.1.3 SURPLUS/DEFISIT (Rp1.298.179.117.523,75)

Surplus/(Defisit) timbul sehubungan dengan selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 095
Surplus/(Defisit) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK/(TURUN)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 PENDAPATAN-LRA	3.733.670.617.987,09	11.040.109.011.239,40	(7.306.438.393.252,31)	(66,18)
2 BELANJA	5.031.849.735.510,84	11.454.657.535.165,80	(6.422.807.799.654,96)	(56,07)
SURPLUS/(DEFISIT)	(1.298.179.117.523,75)	(414.548.523.926,40)	(883.630.593.597,35)	213,15

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah-LRA selama TA 2023 sebesar Rp3.733.670.617.987,09 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp5.031.849.735.510,84 maka Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 mengalami Defisit anggaran sebesar Rp1.298.179.117.523,75.

5.1.4

PEMBIAYAAN NETO

Rp2.267.271.786.674,57

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Provinsi Papua.

Pembiayaan Netto pada TA 2022 sebesar Rp2.209.401.510.206,04 mengalami kenaikan sebesar Rp57.870.276.468,53 atau 2,62% menjadi sebesar Rp2.267.271.786.674,57 pada TA 2023.

Pembiayaan Neto pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 096
Pembiayaan Neto Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK/(TURUN)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.292.871.786.674,57	2.229.401.510.206,04	63.470.276.468,53	2,85
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.600.000.000,00	20.000.000.000,00	5.600.000.000,00	28,00
PEMBIAYAAN NETO	2.267.271.786.674,57	2.209.401.510.206,04	57.870.276.468,53	2,62

5.1.4.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Rp2.292.871.786.674,57

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp2.292.871.786.674,57 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, (SiLPA) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 097
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Papua
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Kontribusi	(Audited)
1 Penggunaan SiLPA	1.772.073.030.162,00	1.792.871.786.674,57	101,17	78,19	1.929.248.255.479,04
2 Pencairan Dana Cadangan	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	100,00	21,81	300.153.254.727,00
3 Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan	2.272.073.030.162,00	2.292.871.786.674,57	100,92	100,00	2.229.401.510.206,04

5.1.4.1.1

Penggunaan SiLPA

Rp1.792.871.786.674,57

Penggunaan SiLPA TA 2023 sebesar Rp1.792.871.786.674,57 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.929.248.255.479,04.

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2023 sebesar Rp1.792.871.786.674,57 dirinci sebagai berikut:

- o Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp1.772.073.030.162,00;

- o Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada BLUD RS ABEPURA sebesar Rp21.611.351.519,64;
- o Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada BLUD RS JAYAPURA sebesar Rp1.168.604.598,19
- o Reklasifikasi Saldo Awal Kas BOS, Pelimpahan Wewenang SMA dan SMK ke Kabupaten Kota sebesar negatif Rp1.993.923.999,00.

5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan Rp500.000.000.000,00

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pindah bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 melakukan pencairan dana Cadangan sebesar Rp500.000.000.000,00 atau 100,00%.

Penggunaan dana cadangan Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 untuk membiayai program/ kegiatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya masyarakat papua khusus Orang Asli Papua sesuai dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/415/TAHUN 2023.

5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp25.600.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal, pembayaran kembali pokok pinjaman daerah dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 memiliki Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp25.600.000.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 098
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase (%)		REALISASI 2022
	(Perda No.8/2023)	(Audited)	Anggaran	Proporsi	(Audited)
1 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30.600.000.000,00	25.600.000.000,00	83,66	100,00	20.000.000.000,00
3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	30.600.000.000,00	25.600.000.000,00	83,66	100,00	20.000.000.000,00

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan Rp0,00

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana Cadangan.

Pemerintah Provinsi Papua, pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan pembentukan dana cadangan atau **NIHIL**.

5.1.4.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp25.600.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.

- Pembayaran Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Provisi Papua kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) Tahun 2023 dengan SP2D Nomor: 03340/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.1.0/LS/09-2023 tanggal 15 September 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00.

- Pembayaran Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Provinsi Papua pada PT. Papua Divestasi Mandiri (PERSERODA) Tahun 2023 dengan SP2D Nomor: 03400/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.1.0/LS/09-2023 tanggal 21 September 2023 sebesar Rp600.000.000,00.

5.1.4.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Rp0,00

Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya

Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 tidak terdapat Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri atau **NIHIL**.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Rp968.887.158.567,03

Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu **NIHIL** karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. SILPA merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Provinsi Papua
TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK/(TURUN)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 SURPLUS/(DEFISIT)	(1.298.179.117.523,75)	(414.548.523.926,40)	(883.630.593.597,35)	213,15
2 PEMBIAYAAN NETTO	2.267.271.786.674,57	2.209.401.510.206,04	57.870.276.468,53	2,62
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	969.092.669.150,82	1.794.852.986.279,64	(825.760.317.128,82)	(46,01)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sampai dengan tutup TA 2023 sebesar Rp969.092.669.150,82 merupakan akumulasi SiLPA sampai dengan 31 Desember 2023, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sampai dengan tutup TA 2023 di jelaskan sebagai berikut:

SiLPA pada Kas Daerah sebesar Rp949.499.167.391,14 merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Papua yang berada di Rekening Kas Umum Daerah Papua per 31 Desember 2023

SiLPA pada Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.144.014.548,00 merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Papua yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023, yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU).

SiLPA pada Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp202.202.020,00 merupakan saldo kas atas penerimaan daerah yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

SiLPA pada Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.206.015.981,68 adalah Saldo Kas per 31 Desember 2023 yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura BLUD dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura BLUD.

SiLPA pada Kas di Bendahara BOS senilai Rp41.269.210,00 per 31 Desember 2023 merupakan sisa Dana BOS Satdiksus negeri di Provinsi Papua yang terdiri dari 5 SLB Negeri dan 5 SMA serta SMK Khusus yang telah menyampaikan laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LAPORAN PERUBAHAN SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.

Laporan perubahan SAL Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 menyajikan secara komparatif dengan periode Tahun Anggaran 2022 pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SiLPA), Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih akhir sebagai berikut:

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL Rp1.794.852.986.279,57

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 adalah akumulasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 atau diperoleh dari saldo anggaran lebih akhir periode pelaporan pada tahun anggaran sebelumnya dan periode tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.794.852.986.279,57 merupakan akumulasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 100
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN		JUMLAH
1	SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN ANGGARAN 2022	(414.548.523.926,47)
	a. PENDAPATAN-LRA	11.040.109.011.239,36
	b. BELANJA	11.454.657.535.165,83
2	PEMBIAYAAN NETTO TAHUN ANGGARAN 2022	2.209.401.510.206,04
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.229.401.510.206,04
	b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
3	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL TAHUN 2023	1.794.852.986.279,57

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.794.852.986.279,57 terdiri dari SURPLUS/(DEFISIT) Tahun Anggaran 2022 sebesar negatif Rp414.548.523.926,47 dan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.209.401.510.206,04.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN Rp1.792.871.786.674,57

Penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Papua sebagai penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp1.792.871.786.674,57 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.929.248.255.479,04.

Nilai Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.792.871.786.674,57; terdiri dari (1) Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp971.073.868.755,82; dan (2) Koreksi Silpa Lain-lain sebesar negatif Rp1.981.199.605,00.

5.2.3 SALDO LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA) Rp969.092.669.150,82

Saldo Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp969.092.669.150,82 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 101
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN		JUMLAH
1	SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN ANGGARAN 2023	(1.298.179.117.523,75)
	a. PENDAPATAN DAERAH	3.733.670.617.987,09
	b. BELANJA DAERAH	5.031.849.735.510,84
2	PEMBIAYAAN NETTO TAHUN ANGGARAN 2023	2.267.271.786.674,57
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.292.871.786.674,57
	b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.600.000.000,00
3	SALDO LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2023	969.092.669.150,82

Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp969.092.669.150,82 terdiri dari SURPLUS/(DEFISIT) Tahun Anggaran 2023 sebesar negatif Rp1.298.179.117.523,75 dan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.267.271.786.674,57.

- 5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA Rp,0,00**
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, terkait dengan kesalahan pencatatan akun, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan atau NIHIL dan Tahun Anggaran 2022 terdapat koreksi kesalahan pembukuan sebesar negatif Rp77.333.055,00.
- 5.2.5 KOREKSI ATAS UANG MUKA PENGADAAN Rp0,00**
Baik pada TA 2023 maupun pada TA 2022 tidak terdapat koreksi atas Uang Muka Pengadaan atau NIHIL.
- 5.2.6 KOREKSI ATAS KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA Rp0,00**
Koreksi atas Kas yang dibatasi Penggunaannya baik pada TA 2023 maupun pada TA 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL.
- 5.2.7 KOREKSI ATAS KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Rp0,00**
Selama periode tahun 2023 tidak terdapat koreksi atas Kas di Bendahara Pengeluaran, demikian pula pada TA 2022 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan sebesar atau NIHIL.
- 5.2.8 LAIN-LAIN (Rp1.981.199.605,00)**
Koreksi Lain-lain pada TA 2023 sebesar negatif Rp1.981.199.605,00 adalah reklasifikasi saldo awal Dana BOS yang merupakan pelimpahan wewenang SMA dan SMK ke Kabupaten/Kota sedangkan pada TA 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL
- 5.2.9 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR TAHUN 2023 Rp969.092.669.150,82**
Saldo Anggaran Lebih akhir diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi koreksi pembukuan Saldo Anggaran Lebih dan dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih 1 (satu) periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Akhir pada TA 2023 adalah sebesar Rp969.092.669.150,82 dan TA 2022 adalah sebesar Rp1.794.852.986.279,57.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Papua tahun 2023 merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023. Posisi keuangan adalah posisi tentang Aset, Kewajiban, dan Ekuitas, yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 102
Neraca Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Jumlah	(%)
1	ASET	22.258.936.680.613,80	23.612.100.674.504,90	(1.353.163.993.891,09)	(5,73)
2	KEWAJIBAN	65.316.936.191,78	149.638.006.751,25	(84.321.070.559,47)	(56,35)
3	EKUITAS	22.193.619.744.422,10	23.462.462.667.753,60	(1.268.842.923.331,54)	(5,41)

Penjelasan atas pos-pos Neraca Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

5.3.1 ASET Rp22.258.936.680.613,80

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai Aset Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.258.936.680.613,80 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.353.163.993.891,09 atau (5,73%) dibandingkan dengan Nilai Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.612.100.674.504,90.

Nilai Aset Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut.

Tabel 103
Aset Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Jumlah	(%)
1	ASET LANCAR	1.485.228.717.451,85	3.270.108.797.026,80	(1.784.880.079.574,95)	(54,58)
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.394.787.925.652,96	1.261.587.449.344,36	133.200.476.308,60	10,56
3	ASET TETAP	14.931.515.346.029,20	17.922.725.953.178,30	(2.991.210.607.149,14)	(16,69)
4	DANA CADANGAN	453.016.281.601,00	918.567.915.952,00	(465.551.634.351,00)	(50,68)
5	ASET LAINNYA	3.994.388.409.878,86	239.110.559.003,44	3.755.277.850.875,41	1.570,52
JUMLAH ASET		22.258.936.680.613,80	23.612.100.674.504,90	(1.353.163.993.891,09)	(5,73)

5.3.1.1 ASET LANCAR Rp1.485.228.717.451,85

Aset lancar adalah Aset yang berbentuk uang tunai maupun aktiva lainnya yang dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.784.880.079.574,95 atau (54,58%) dari semula sebesar Rp3.270.108.797.026,80 per tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp1.485.228.717.451,85 per tanggal 31 Desember 2023.

Rincian Aset Lancar Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 104
Aset Lancar Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	(%)
1	Kas di Kas Daerah	949.499.167.391,14	1.768.953.115.230,74	(819.453.947.839,60)	(46,32)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.144.014.548,00	1.084.402.201,00	59.612.347,00	5,50
3	Kas di Bendahara Penerimaan	202.202.020,00	0,00	202.202.020,00	0,00
4	Kas di BLUD	18.206.015.981,68	22.779.956.117,83	(4.573.940.136,15)	(20,08)
5	Kas di Bendahara BOS	41.269.210,00	2.035.512.730,00	(1.994.243.520,00)	(97,97)
6	Kas Lainnya	1.161.996.518,00	32.467.726,00	1.129.528.792,00	3.478,93
7	Piutang Pajak (Netto)	49.414.700,00	75.227.500,00	(25.812.800,00)	(34,31)
8	Piutang Retribusi (Netto)	467.709.302,00	558.000,00	467.151.302,00	83.718,87
9	Belanja Dibayar Dimuka	239.651.104,07	1.308.161.509,60	(1.068.510.405,54)	(81,68)
10	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.912.819.000,00	0,00	1.912.819.000,00	0,00
12	Piutang Lainnya (Netto)	81.254.431.774,68	35.999.782.251,84	45.254.649.522,84	125,71
13	Persediaan	431.050.025.902,28	1.437.839.613.759,78	(1.006.789.587.857,50)	(70,02)
JUMLAH ASET LANCAR		1.485.228.717.451,85	3.270.108.797.026,80	(1.784.880.079.574,95)	(54,58)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah Rp949.499.167.391,14

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Papua yang berada di Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua yaitu Bank Papua Cabang Utama

Jayapura, Bank Mandiri Cabang Jayapura, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jayapura dan Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Jayapura.

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 sebesar Rp949.499.167.391,14 atau mengalami penurunan sebesar Rp819.453.947.839,60 atau (46,32%) dibandingkan dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.768.953.115.230,74.

Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 105
Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Rekening		Saldo Per 01 Januari 2023	Per 31 Desember 2023		Selisih
	No Rekening	Nama Rekening		Buku Pembantu Kas Daerah	Rekening Koran	
1	BANK PAPUA					
	1000102010801	PT BANK PAPUA – PAD	27.890.134.807,36	39.507.766.718,73	39.507.766.718,73	0,00
	1000102121222	PT BANK PAPUA – RKUD	321.851.856.013,00	623.547.878.572,58	623.547.878.572,58	0,00
	1000102000011	PT BANK PAPUA – OTSUS 1% PROV PAPUA	0,00	77.117.644.536,90	77.117.644.536,90	0,00
	1000102000022	PT BANK PAPUA – OTSUS 1,25% PROV PAPUA	0,00	206.489.057.868,93	206.489.057.868,93	0,00
	1000102000033	PT BANK PAPUA – DTI PROV PAPUA	0,00	2.836.819.694,00	2.836.819.694,00	0,00
2	BANK MANDIRI					
	1540017238464	PT BANK MANDIRI (RKUD)	670.598.131.582,42	0,00	0,00	0,00
	1540018040323	PT BANK MANDIRI (OTSUS 1 %)	365.497.545.082,19	0,00	0,00	0,00
	1540018040224	PT BANK MANDIRI (OTSUS 1,25 %)	158.064.226.172,42	0,00	0,00	0,00
	1540018040331	PT BANK MANDIRI (OSTUS DTI)	225.051.196.573,35	0,00	0,00	0,00
3	BANK BRI					
	0307.01.001876.30.5	PT. BRI 30.5 (GIRO)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		T O T A L	1.768.953.115.230,74	949.499.167.391,14	949.499.167.391,14	0,00

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp1.144.014.548,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Papua yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023, yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Tabel 106
Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	(%)
1 Kas Pengelolaan UP	1.144.014.548,00	1.084.402.201,00	59.612.347,00	5,50
2 Kas Pengelolaan TU	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	1.144.014.548,00	1.084.402.201,00	59.612.347,00	5,50

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.144.014.548,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp59.612.347,00 atau 5,50% dibandingkan dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.084.402.201,00. Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 yang berasal dari pengelolaan UP/TU, telah disetorkan seluruhnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.144.014.548,00 terdapat pada 2 (dua) OPD yaitu Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp795.998.782,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp348.015.766,00. Rincian lebih lanjut Kas di Bendahara Pengeluaran menurut Sub Unit Organisasi/OPD dapat dilihat pada **Lampiran 07** dan **Lampiran 08**.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp202.202.020,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas atas penerimaan daerah yang telah diterima oleh

Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 107
Kas di Bendahara Penerimaan Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	(%)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2	Rumah Sakit Jiwa	201.902.020,00	0,00	201.902.020,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		202.202.020,00	0,00	202.202.020,00	0,00

Atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Jiwa per 31 Desember 2023 telah disetorkan ke Kas Daerah di tahun 2024.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Rp18.206.015.981,68

Kas di BLUD adalah Saldo Kas per 31 Desember 2023 yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura BLUD dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.206.015.981,68 dirinci sebagai berikut:

Tabel 108
Kas di BLUD Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	KETERANGAN	REKENING		SALDO PER 31 Desember 2023	SALDO PER 31 Desember 2022
		NOMOR REKENING	NAMA REKENING		
A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA				358.651.585,19	1.168.604.598,19
1	BANK PAPUA	1000102029724	BLUD RSUD Jayapura	349.337.021,40	1.152.478.873,40
2	BANK PAPUA	1000202103632	Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	KAS TUNAI			9.314.563,79	16.125.724,79
B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA				17.847.364.396,49	21.611.351.519,64
1	BANK PAPUA	1000102029724	BLUD RSUD Abepura	17.845.303.179,10	21.360.669.970,72
2	BANK MANDIRI	1540005347541	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA	2.061.217,39	250.681.548,92
3	KAS TUNAI			0,00	0,00
TOTAL				18.206.015.981,68	22.779.956.117,83

Sampai dengan penyusunan LKPD Tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura BLUD belum menyerahkan Laporan Keuangan.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Rp41.269.210,00

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa Dana BOS Satdiksus negeri di Provinsi Papua Per 31 Desember 2023 senilai Rp41.269.210,00 yang terdiri dari 5 SLB Negeri dan 5 SMA serta SMK Khusus yang telah menyampaikan laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS.

Sesuai PP nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua maka pencatatan Kas di Bendahara BOS Satdikmen negeri di Provinsi Papua yang terdiri SMA Negeri dan SMK Negeri telah di serahkan ke Kabupaten dan Kota.

Tabel 109
Kas di Bendahara BOS Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

dalam Rupiah

No	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Nomor Rekening	Saldo Audited TA 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir Kas BOS per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6+7-8)
1	SLB NEGERI SAIRERI BIAK	SLB	69888926	5000201029596	899.712,00	292.800.000,00	292.823.349,00	876.363,00
2	SLB NEGERI SERUI	SLB	60301358	8000201042363	105.469,00	366.250.000,00	366.255.469,00	100.000,00
3	SLB NEGERI URI - WAREN	SLB	69967022	8010201005575	787.335,00	444.250.000,00	444.250.000,00	787.335,00
4	SLB NEGERI 1 JAYAPURA	SLB	60301021	1020202377515	38.600.884,00	845.741.987,00	845.250.000,00	39.092.871,00
5	SLB NEGERI PEMBINA PROVINSI PAPUA	SLB	60301020	1900201071241	1.195.331,00	486.750.000,00	487.792.690,00	152.641,00
1	SMAN 3 JAYAPURA	SMA	60301018	1000201137331	101.944,00	1.110.990.750,00	1.110.992.694,00	100.000,00
2	SMAN KHUSUS OLAH RAGA	SMA	69881035	1000201137386	556.047,00	509.600.000,00	509.996.047,00	160.000,00
3	SMKN 4 AGROBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI	SMK	60301064	1000201137880	1.360.673,00	407.400.000,00	408.760.673,00	0,00
4	SMKN 1 PARIWISATA	SMK	60301063	1000201137876	10.548.110,00	1.051.480.000,00	1.062.028.110,00	0,00
5	SMKN 2 BIAK	SMK	60300367	5000201028056	157.620,00	228.680.000,00	228.837.620,00	0,00
Jumlah					41.588.731,00	2.435.791.987,00	2.436.371.508,00	41.269.210,00

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Rp1.161.996.518,00

Kas Lainnya merupakan saldo Hutang PFK yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran dan bendahara Pengeluaran BLUD Per 31 Desember 2023 yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD) senilai Rp571.928.462,00 dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp590.068.056,00. Atas saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah di tahun 2024.

5.3.1.1.7 Piutang Pajak

Rp772.609.301,00

Piutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas pajak yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT) namun belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Piutang Pajak Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp772.609.301,00 dan Rp1.709.883.101,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 110
Piutang Pajak Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Piutang PKB	771.912.501,00	1.654.208.401,00
	Piutang s.d Tahun 2013	160.589.800,00	652.462.400,00
	Piutang s.d Tahun 2014	101.599.200,00	172.672.700,00
	Piutang Tahun 2015	187.410.201,00	254.161.801,00
	Piutang Tahun 2016	227.586.300,00	303.435.500,00
	Piutang Tahun 2017	16.076.000,00	27.608.000,00
	Piutang Tahun 2018	20.817.000,00	116.438.000,00
	Piutang Tahun 2019	32.611.000,00	89.055.000,00
	Piutang Tahun 2021	25.223.000,00	38.375.000,00
2	Piutang BBN-KB	696.800,00	55.674.700,00
	Piutang s.d Tahun 2013	107.000,00	54.294.800,00
	Piutang Tahun 2015	303.500,00	412.500,00
	Piutang Tahun 2016	286.300,00	967.400,00
Saldo Piutang Pajak		772.609.301,00	1.709.883.101,00

1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp771.912.501,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan piutang yang diakui atas pajak yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT) namun belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Adapun SKP/SKPT yang telah ditetapkan mulai dari tahun 2013-2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 111
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Piutang PKB S/D Tahun 2013	160.589.800,00	652.462.400,00
2	Piutang PKB Tahun 2014	101.599.200,00	172.672.700,00
3	Piutang PKB Tahun 2015	187.410.201,00	254.161.801,00
4	Piutang PKB Tahun 2016	227.586.300,00	303.435.500,00
5	Piutang PKB Tahun 2017	16.076.000,00	27.608.000,00
6	Piutang PKB Tahun 2018	20.817.000,00	116.438.000,00
7	Piutang PKB Tahun 2019	32.611.000,00	89.055.000,00
8	Piutang PKB Tahun 2021	25.223.000,00	38.375.000,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		771.912.501,00	1.654.208.401,00

Saldo piutang pajak kendaraan bermotor tahun 2023 terdiri dari Piutang PKB sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp160.589.800,00, Piutang PKB tahun 2014 sebesar Rp101.599.200,00 Piutang PKB tahun 2015 sebesar Rp 187.410.201,00, Piutang PKB tahun 2016 sebesar Rp227.586.300,00, Piutang PKB Tahun 2017 sebesar Rp16.076.000,00, Piutang PKB Tahun 2018 sebesar Rp20.817.000,00, Piutang PKB tahun 2019 sebesar Rp32.611.000,00 dan Piutang PKB tahun 2021 sebesar Rp25.223.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp25.223.000,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 112
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2021	REKLASIFIKASI	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2021
1	UPTB JAYAPURA	24.140.000,00	0,00	1.977.000,00	22.163.000,00
2	UPTB NABIRE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3	UPTB TIMIKA	10.203.000,00	10.203.000,00	0,00	0,00
4	UPTB SENTANI	1.810.000,00	0,00	172.000,00	1.638.000,00
5	UPTB KEEROM	1.422.000,00	0,00	0,00	1.422.000,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021		38.375.000,00	11.003.000,00	2.149.000,00	25.223.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019 sebesar Rp32.611.000,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 113
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2019

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2019	REKLASIFIKASI	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2019
1	UPTB JAYAPURA	32.485.000,00	0,00	112.000,00	32.373.000,00
2	UPTB NABIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UPTB TIMIKA	48.964.000,00	48.964.000,00	0,00	0,00
4	UPTB MERAUKE	7.368.000,00	7.368.000,00	0,00	0,00
5	UPTB KEEROM	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
6	UPTB JAYAPURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019		89.055.000,00	56.332.000,00	112.000,00	32.611.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 sebesar Rp20.817.000,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 114
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2018	REKLASIFIKASI	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2018
1	UPTB JAYAPURA	5.459.000,00	0,00	217.000,00	5.242.000,00
2	UPTB BIAK	15.575.000,00	0,00	0,00	15.575.000,00
3	UPTB NABIRE	51.110.000,00	51.110.000,00	0,00	0,00
4	UPTB TIMIKA	32.982.000,00	32.982.000,00	0,00	0,00
5	UPTB WAMENA	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00
6	MERAUKE	7.622.000,00	7.622.000,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018		116.438.000,00	95.404.000,00	217.000,00	20.817.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017 sebesar Rp16.076.000,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 115
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2017	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2017
1	UPTB JAYAPURA	16.076.000,00	0,00	0,00	16.076.000,00
2	UPTB MERAUKE	8.754.000,00	8.754.000,00	0,00	0,00
3	UPTB NABIRE	2.778.000,00	2.778.000,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017		27.608.000,00	11.532.000,00	0,00	16.076.000,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 sebesar Rp227.586.300,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 116
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN	PIUTANG SKP 2016	KOREKSI	REKLASIFIKASI	SALDO PIUTANG 2016
1 UPPD JAYAPURA	173.825.500,00	0,00	0,00	173.825.500,00
2 UPPD SENTANI	49.427.100,00	0,00	0,00	49.427.100,00
3 UPPD MERAUKE	29.037.700,00	0,00	29.037.700,00	0,00
4 UPPD BIAK	2.363.000,00	0,00	0,00	2.363.000,00
5 UPPD NABIRE	46.811.500,00	0,00	46.811.500,00	0,00
6 UPPD KEEROM	1.970.700,00	0,00	0,00	1.970.700,00
7 UPPD PANIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016	303.435.500,00	0,00	75.849.200,00	227.586.300,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015 sebesar Rp187.410.201,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 117
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2015

(dalam Rupiah)

URAIAN	PIUTANG SKP 2015	KOREKSI	REKLASIFIKASI	SALDO PIUTANG 2015
1 UPPD JAYAPURA	172.543.801,00	0,00	0,00	172.543.801,00
2 UPPD SERUI	1.920.300,00	0,00	0,00	1.920.300,00
3 UPPD SENTANI	12.053.000,00	(210.000,00)	0,00	12.263.000,00
4 UPPD MERAUKE	27.130.300,00	210.400,00	26.919.900,00	0,00
5 UPPD BOVEN DIGOEL	1.747.400,00	0,00	1.747.400,00	0,00
6 UPPD MAPPI	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00
7 UPPD BIAK	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00
8 UPPD NABIRE	36.928.900,00	0,00	36.928.900,00	0,00
9 UPPD SUPIORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015	254.161.801,00	400,00	66.751.200,00	187.410.201,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014 sebesar Rp101.599.200,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 118
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2014

(dalam Rupiah)

URAIAN	PIUTANG SKP 2014	REKLASIFIKASI	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2014
1 UPPD JAYAPURA	88.932.100,00	0,00	0,00	88.932.100,00
2 UPPD BIAK	5.310.300,00	0,00	0,00	5.310.300,00
3 UPPD NABIRE	15.603.000,00	15.603.000,00	0,00	0,00
4 UPPD TIMIKA	14.210.000,00	14.210.000,00	0,00	0,00
5 UPPD WAMENA	1.670.700,00	1.670.700,00	0,00	0,00
6 UPPD MERAUKE	39.589.800,00	39.589.800,00	0,00	0,00
7 UPPD SENTANI	7.219.000,00	0,00	0,00	7.219.000,00
8 UPPD KEEROM	0,00	0,00	0,00	0,00
9 UPPD MAPPI	0,00	0,00	0,00	0,00
10 UPPD SUPIORI	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014	172.672.700,00	71.073.500,00	0,00	101.599.200,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013 sebesar Rp160.589.800,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 119
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2013

(dalam Rupiah)

URAIAN	PIUTANG SKP 2013	REKLASIFIKASI	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2013
1 UPPD JAYAPURA	87.111.400,00	0,00	0,00	87.111.400,00
2 UPPD BIAK	27.228.800,00	0,00	0,00	27.228.800,00
3 UPPD SERUI	14.473.400,00	0,00	0,00	14.473.400,00
4 UPPD NABIRE	22.447.800,00	22.447.800,00	0,00	0,00
5 UPPD TIMIKA	350.573.900,00	350.573.900,00	0,00	0,00
6 UPPD MERAUKE	118.339.500,00	118.339.500,00	0,00	0,00
7 UPPD SENTANI	30.118.200,00	0,00	0,00	30.118.200,00
8 UPPD KEEROM	1.382.200,00	0,00	0,00	1.382.200,00
9 UPPD MAPPI	511.400,00	511.400,00	0,00	0,00
10 UPPD SUPIORI	275.800,00	0,00	0,00	275.800,00
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013	652.462.400,00	491.872.600,00	0,00	160.589.800,00

Beberapa langkah yang telah diupayakan oleh Bapenda untuk menagih piutang pajak di atas antara lain melalui turun langsung ke lapangan menemui wajib pajak. Kendala utama yang dihadapi Bapenda saat turun lapangan antara lain alamat tidak jelas, pindah alamat, kendaraan hilang, kendaraan ditarik dealer, atau kendaraan rusak total.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp696.800,00

Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan piutang yang diakui atas pajak yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT) namun belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Adapun SKP/SKPT yang telah ditetapkan mulai dari tahun 2013-2023, dirinci sebagai berikut:

Tabel 120
Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	PIUTANG PAJAK BBNKB S/D TAHUN 2013	107.000,00	54.294.800,00
3	PIUTANG PAJAK BBNKB TAHUN 2015	303.500,00	412.500,00
4	PIUTANG PAJAK BBNKB TAHUN 2016	286.300,00	967.400,00
Saldo Piutang Pajak BBNKB		696.800,00	55.674.700,00

Saldo Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2023 terdiri dari Piutang Pajak BBNKB sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp107.000,00 Piutang Pajak BBNKB tahun 2015 sebesar Rp303.500,00, dan Piutang Pajak BBNKB tahun 2016 sebesar Rp286.300,00.

Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2016

Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 sebesar Rp286.300,00 dapat juga dirincikan berdasarkan UPPD atau Samsat yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 121
Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2016	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2016
1	UPPD JAYAPURA	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00
2	UPPD MERAUKE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UPPD NABIRE	681.100,00	681.100,00	0,00	0,00
4	UPPD PANIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak BBN-KB Tahun 2016		967.400,00	681.100,00	0,00	286.300,00

Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015

Piutang Pajak BBNKB tahun 2015 sebesar Rp303.500,00 berdasarkan UPPD/ Samsat dirinci sebagai berikut:

Tabel 122
Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2015	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2015
1	UPPD JAYAPURA	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00
2	UPPD MERAUKE	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak BBN-KB Tahun 2015		412.500,00	109.000,00	0,00	303.500,00

Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2013

Piutang Pajak BBNKB tahun 2013 sebesar Rp107.000,00 berdasarkan UPPD/ Samsat dirinci sebagai berikut:

Tabel 123
Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013

(dalam Rupiah)

URAIAN		PIUTANG SKP 2013	REKLASIFIKASI	PEMBAYARAN	SALDO PIUTANG 2013
1	UPPD NABIRE	3.830.300,00	3.830.300,00	0,00	0,00
2	UPPD TIMIKA	46.898.100,00	46.898.100,00	0,00	0,00
3	UPPD MERAUKE	3.459.400,00	3.459.400,00	0,00	0,00
4	UPPD SENTANI	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
5	UPPD MAPPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Piutang Pajak BBN-KB Tahun 2013		54.294.800,00	54.187.800,00	0,00	107.000,00

5.3.1.1.7.1 Penyisihan Piutang Pajak (Rp723.194.601,00)

Penyisihan Piutang dimaksudkan agar Aset berupa piutang di neraca dapat terjaga nilainya atau nilai yang diharapkan sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan penyisihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penilaian kualitas piutang sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.

Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet.

Penentuan kualitas piutang untuk Piutang Pajak Daerah, dikategorikan dalam:

- a. Kualitas piutang lancar:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas piutang kurang lancar:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Kepala OPD wajib membentuk Penyisihan Piutang tidak tertagih terhadap piutang yang dikelola oleh OPD yang dipimpinnya. Penyisihan Piutang tidak tertagih untuk Piutang Pajak Daerah ditetapkan sebesar :

- Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Tabel 124
Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Papua
Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2023
		KURANG LANCAR (0 s/d 1 thn) 0.5%	KURANG LANCAR (>1 s/d 2 thn) 10%	DIRAGUKAN (>3 s/d 5 thn) 50%	MACET (> 5 thn) 100%		
2013	160.696.800,00	0,00	0,00	0,00	160.696.800,00	160.696.800,00	0,00
2014	101.599.200,00	0,00	0,00	0,00	101.599.200,00	101.599.200,00	0,00
2015	187.713.701,00	0,00	0,00	0,00	187.713.701,00	187.713.701,00	0,00
2016	227.872.600,00	0,00	0,00	0,00	227.872.600,00	227.872.600,00	0,00
2017	16.076.000,00	0,00	0,00	0,00	16.076.000,00	16.076.000,00	0,00
2018	20.817.000,00	0,00	0,00	10.408.500,00	0,00	10.408.500,00	10.408.500,00
2019	32.611.000,00	0,00	0,00	16.305.500,00	0,00	16.305.500,00	16.305.500,00
2021	25.223.000,00	0,00	2.522.300,00	0,00	0,00	2.522.300,00	22.700.700,00
Jml	772.609.301,00	0,00	2.522.300,00	26.714.000,00	693.958.301,00	723.194.601,00	49.414.700,00

Perhitungan Penyisihan Piutang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan secara total per objek pajak, belum dilakukan perhitungan per masing-masing wajib pajak per masa pajak. Perhitungan dilakukan di BPKAD, tidak dilakukan OPD.

Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (Rp722.497.801,00)

Tabel 125
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Papua
Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2023
		KURANG LANCAR (0 s/d 1 thn) 0.5%	KURANG LANCAR (>1 s/d 2 thn) 10%	DIRAGUKAN (>3 s/d 5 thn) 50%	MACET (> 5 thn) 100%		
2013	160.589.800,00	0,00	0,00	0,00	160.589.800,00	160.589.800,00	0,00
2014	101.599.200,00	0,00	0,00	0,00	101.599.200,00	101.599.200,00	0,00
2015	187.410.201,00	0,00	0,00	0,00	187.410.201,00	187.410.201,00	0,00
2016	227.586.300,00	0,00	0,00	0,00	227.586.300,00	227.586.300,00	0,00
2017	16.076.000,00	0,00	0,00	0,00	16.076.000,00	16.076.000,00	0,00
2018	20.817.000,00	0,00	0,00	10.408.500,00	0,00	10.408.500,00	10.408.500,00
2019	32.611.000,00	0,00	0,00	16.305.500,00	0,00	16.305.500,00	16.305.500,00
2021	25.223.000,00	0,00	2.522.300,00	0,00	0,00	2.522.300,00	22.700.700,00
Jml	771.912.501,00	0,00	2.522.300,00	26.714.000,00	693.261.501,00	722.497.801,00	49.414.700,00

Piutang ini masih terus diupayakan penagihannya pada wajib pajak oleh Badan Pendapatan Daerah melalui mekanisme penagihan langsung atas piutang tersebut namun ditemui hal-hal sebagai berikut: alamat tidak jelas, pindah alamat, bukan milik, lapor jual, rusak, hilang, tarikan dealer, nomor polisi ganda. Kedepannya Bapenda akan melakukan inventarisasi atas piutang-piutang yang ada di masing-masing UPPD/ Samsat sehingga atas piutang yang tak tertagih, dapat diajukan penghapusan piutang pajak.

Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(Rp696.800,00)

Tabel 126
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi Papua
Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2023
		KURANG LANCAR (0 s/d 1 thn) 0.5%	KURANG LANCAR (>1 s/d 2 thn) 10%	DIRAGUKAN (>3 s/d 5 thn) 50%	MACET (> 5 thn) 100%		
2013	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
2015	303.500,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00	303.500,00	0,00
2016	286.300,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00	286.300,00	0,00
Jml	696.800,00	0,00	0,00	0,00	696.800,00	696.800,00	0,00

5.3.1.1.8 Piutang Retribusi

Rp467.709.302,00

Saldo Piutang Retribusi terdiri dari saldo Piutang BPJS Kesehatan yang timbul dari klaim yang telah disetujui oleh Verifikator BPJS atas kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang bersumber dari dana Jaminan Sosial yang belum dibayarkan oleh BPJS dan saldo Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang belum disertorkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp467.709.302,00 dan sebesar Rp558.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127
Piutang Retribusi Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Rumah Sakit Jiwa	460.371.302,00	558.000,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.338.000,00	0,00
Saldo Piutang Retribusi		467.709.302,00	558.000,00

5.3.1.1.9 Belanja Dibayar Dimuka

Rp239.651.104,07

Berdasarkan PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Belanja Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai bagian Aset Lancar. Pada tahun 2023 Belanja Dibayar Dimuka adalah Sewa Dibayar Dimuka atas pemanfaatan fasilitas Aset pihak lain oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Saldo Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp239.651.104,07 merupakan pembayaran sewa bangunan dan gedung, yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 128
Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	OPD	KETERANGAN	RINCIAN PEMBAYARAN 2023				
			Nilai Kontrak	TANGGAL DIMULAI	TANGGAL BERAKHIR	Beban Periode	Beban Dibayar Dimuka
						31 Desember 2023	Per 31 Desember 2023
1		2	3	4	5	6a = (3*(5-4)*(6-4)	5 (3 – 6a)
	SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR						
1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perjanjian Penyewaan Diklat RRI Biak Sebagai Kantor Samsat Sementara	150.000.000,00	01/04/2023	31/01/2024	134.754.098,36	15.245.901,64
2	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Perjanjian Sewa Ruko pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	70.000.000,00	04/02/2023	04/02/2024	63.287.671,23	6.712.328,77
	SEWA ASRAMA						
1	Biro Umum dan Protokol	Perjanjian Sewa-menyewa Bangunan Untuk Asrama Mahasiswa di Makassar (Biro Umum dan Protokol)	237.837.838,00	01/05/2023	31/05/2024	146.546.546,65	91.291.291,35
		Perjanjian Sewa-menyewa Bangunan Untuk Asrama Mahasiswa di Batam (Biro Umum dan Protokol)	160.000.000,00	17/11/2022	17/11/2024	89.521.203,83	70.478.796,17
	SEWA RUMAH TIDAK BERSUSUN						
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Perjanjian Sewa Menyewa Properti Untuk Rumah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000,00	02/01/2023	02/01/2024	99.452.054,79	547.945,21
2	Inspektorat	Sewa Rummah Jabatan/ Rumah Dinas	85.000.000,00	16/08/2023	16/08/2024	31.816.939,89	53.183.060,11

NO	OPD	KETERANGAN	RINCIAN PEMBAYARAN 2023				
			Nilai Kontrak	TANGGAL DIMULAI	TANGGAL BERAKHIR	Beban Periode	
						31 Desember 2023	Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023
1		2	3	4	5	6a = (3*(5-4)*(6-4)	5 (3 - 6a)
3	UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek	Kepala Inspektorat Provinsi Papua Perjanjian Sewa-menyewa Bangunan Rumah Dinas Kepala Taman Burung dan Taman Anggrek di Biak	50.000.000,00	16/01/2023	16/01/2024	47.808.219,18	2.191.780,82
TOTAL			852.837.838,00			613.186.733,93	239.651.104,07

5.3.1.1.10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0,00

Bagian Lancar Piutang Penjualan Angsuran merupakan piutang penjualan angsuran rumah dinas dan piutang penjualan angsuran kendaraan dinas yang telah jatuh tempo melalui mekanisme dan pengaturan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tagihan penjualan angsuran rumah dinas yang belum lunas, dan telah melewati batas jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dipindahkan ke dalam akun Aset Lain-lain.

5.3.1.1.11 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp1.912.819.000,00

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pihak ketiga (rekanan dan anggota DPRD) sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan Piutang ganti rugi berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Pengukuran Piutang disajikan sebagai Aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun yang berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023 senilai Rp1.912.819.000,00 ialah SKTJM atas kurang volume Pembangunan Jalan Entrop - Tasangka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman yang sampai 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah.

5.3.1.1.11.1 Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi yang perlu dilakukan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023, yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 129
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2023**

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2023
		LANCAR (1 bln) 0,5%	KURANG LANCAR (>1 s/d 3 bln) 10%	DIRAGUKAN (>3 s/d 12 bln) 50%	MACET (> 12 bln) 100%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1.912.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.819.000,00	
Jml	1.912.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.819.000,00	

5.3.1.1.12 Piutang Lainnya Rp91.102.113.005,34

Piutang lainnya merupakan piutang yang tidak masuk dalam kategori Piutang Pendapatan, baik Piutang Pajak maupun Piutang Retribusi. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 130
Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1 Piutang Deposito	680.320.613,18	3.972.141.729,18
2 Piutang Dividen	55.382.500.244,00	0,00
4 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	769.200.000,00	0,00
5 Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	4.392.539.000,00	10.101.784.094,96
6 Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.456.000,00	3.144.187.626,04
7 Piutang Pendapatan BLUD	23.889.097.400,00	6.491.015.537,00
8 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	5.637.999.748,16	12.290.653.264,66
Saldo Piutang Lainnya	91.102.113.005,34	35.999.782.251,84

1. Piutang Deposito Rp680.320.613,18

Piutang Deposito adalah perhitungan atas bunga deposito per 31 Desember 2023 yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua dan dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo deposito.

Perhitungan Piutang Deposito sebesar Rp680.320.613,18 terdiri dari Piutang Deposito pada Bank Papua, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 131
Piutang Deposito Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	BANK/ NOMOR REKENING	NILAI SALDO AKHIR TAHUN 2023	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo Bunga	Periode Bunga (per 31 Desember 2023)	Bunga Deposito yang sudah bisa diakui menjadi hak (Piutang Pendapatan)
1	1000301007112	379.978.702.740,00	0,04	1 bulan	549.667.822,00	549.667.822,00
2	1000301006994	72.254.952.700,00	0,04	1 bulan	130.652.791,18	130.652.791,18
Total		452.233.655.440,00				680.320.613,18

2. Piutang Deviden Rp55.382.500.244,00

Piutang Deviden merupakan jumlah uang yang belum diterima dari pembagian keuntungan berupa saham dari penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Piutang Deviden per 31 Desember 2023 berdasarkan SK RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 02/SK/RUPS-BPD/III/2024 adalah senilai Rp55.382.500.244,00.

3. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp769.200.000,00

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Klaim atas Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 senilai Rp769.200.000,00 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi sewa penggunaan/pemakaian sarana prasarana olahraga (Stadion Lukas Enembe dan Wisma Atlet) sebagai tempat berlatih dan bertanding serta sebagai markas pemain sesuai PKS Nomor 426/642/2022 Tanggal 28 Agustus 2022 senilai Rp619.200.000,00.
- b. Retribusi sewa penggunaan/pemakaian sarana prasarana olahraga (Stadion Lukas Enembe dan Wisma Atlet) sebagai tempat berlatih dan bertanding serta sebagai markas pemain sesuai Surat Ketetapan Retribusi Bulan Desember Nomor Urut 70 Tahun 2023 dengan tanggal jatuh tempo 04 Januari 2024 senilai Rp150.000.000,00.

4. Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa Rp4.392.539.000,00

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 masing-masing senilai Rp4.392.539.000,00 dan Rp10.101.784.094,96 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Saldo uang muka tahun 2023 senilai Rp4.392.539.000,00 merupakan kelebihan pembayaran pembangunan Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 M dengan nomor kontrak 050/12624 Tgl. 22 Agustus 2022 dan ADD NO 050/17658 Tgl. 03 Oktober 2022, menjadi barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Papua dengan nomor Print-676/R.1.5/Fd.1/09/2023 tanggal 22 September 2023.
- b. Pengurang Uang Muka selama Tahun 2023 senilai Rp5.709.245.094,96 adalah sebagai berikut:

Penerimaan atas penyetoran Uang Muka pada Dinas Perhubungan untuk Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Ninia di Kabupaten Yahukimo dengan total Nilai pekerjaan fisik Rp828.457.721,00 dengan nomor bukti 07331/STS-EPAD/4.4.12.1/09-05-2023 senilai Rp671.457.721,00 dan 6943/STS-EPAD/2.9.1.1/03-05-2023 senilai Rp157.000.000,00.

Penerimaan dengan nomor bukti setor 06140/STS-EPAD/1.3.1.1/17-04-2023 atas pengembalian Uang Muka Pada Dinas Pekerjaan Umum, kelebihan pembayaran peningkatan Jalan Kimbim Wogi-Wosi SPK nomor 050/10839 Tgl. 11 Agustus 2022.

5. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp350.456.000,00

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 senilai Rp350.456.000,00, ialah saldo Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 yang belum disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Papua karena menjadi barang bukti dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Samabusa – Nabarua Bawah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: Print-630/R.1/Fd.1/09/2023 tanggal 11 September 2023.

6. Piutang Pendapatan BLUD Rp23.889.097.400,00

Piutang Pendapatan BLUD ialah Piutang yang timbul akibat klaim pendapatan pelayanan Kesehatan masyarakat pada RSUD Jayapura BLUD, nilai Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2023 adalah Rp23.889.097.400,00 merupakan Piutang Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura BLUD senilai Rp21.060.616.900,00 dan Piutang Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura BLUD senilai Rp2.828.480.500,00.

7. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Rp5.637.999.748,16

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya ialah Piutang Tahun 2022 yang sampai 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Piutang atas kelebihan pembayaran paket pekerjaan Tahun 2022 yang belum disetorkan pada tahun 2023 senilai Rp5.011.408.000,00 karena menjadi barang bukti dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Samabusa – Nabarua Bawah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua berdasarkan

Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: Print-630/R.1/Fd.1/09/2023 tanggal 11 September 2023.

Saldo Remunerasi Bulan Desember 2022 TDF-TKD sesuai dengan Nota Dinas dari Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 yang sampai akhir 31 desember 2023 belum diterima disebabkan kurangnya informasi teknis pencairan senilai Rp30.608.230,66.

Pendapatan Jasa Giro rekening beasiswa yang belum tercatat dan telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan STS No. 02695/STS-EPAD/4.1.15.1/22-02-2024 pada BPSDM senilai Rp25.859.241,50.

Pengembalian hibah atas kegiatan sail teluk cenderawasih kepulauan yapen tahun 2023 yang telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 3 mei 2024 sesuai STS No.06174/STS-EPAD/4.4.5.2/02-05-2024 senilai Rp533.727.639,00.

Pengembalian hibah atas kegiatan sail teluk cenderawasih pemerintah kabupaten biak numfor tahun 2023 yang telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 17 april 2024 sesuai STS No.06454/STS-EPAD/4.4.5.2/07-05-2024 senilai Rp36.396.637,00.

5.3.1.1.12.1 Penyisihan Piutang Lainnya (Rp9.847.681.230,66)

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, selain pajak dan retribusi, penyisihan piutang menggunakan kualifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Lancar* yaitu apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas Kurang Lancar* yaitu apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas Diragukan*, yaitu apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas Macet*, yaitu apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

Penyisihan Piutang lainnya per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 132
Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023**

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2023
		LANCAR (0 s/d 1 bulan) 0,5%	KURANG LANCAR (>1 s/d 3 bulan) 10%	DIRAGUKAN (>3 s/d 12 bulan) 50%	MACET (> 12 bulan) 100%		
2022	4.392.539.000,00	0,00	0,00	0,00	4.392.539.000,00	0,00	
2023	619.200.000,00	0,00	61.920.000,00	0,00	0,00	557.280.000,00	
2023	150.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	149.250.000,00	
2022	350.456.000,00	0,00	0,00	0,00	350.456.000,00	0,00	
2022	5.042.016.230,66	0,00	0,00	0,00	5.042.016.230,66	0,00	
Jml	10.554.211.230,66	750.000,00	61.920.000,00	0,00	9.785.011.230,66	706.530.000,00	

5.3.1.1.13 Persediaan Rp431.050.025.902,28

Persediaan menurut PSAP Nomor 5 adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 133
Persediaan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Audited)	(Audited)
1	Bahan Kimia	20.940.000,00	19.478.237,00
2	Bahan/Bibit Tanaman	211.592.000,00	2.468.058.548,00
3	Bahan Lainnya	0,00	1.626.116.037,00
4	Suku Cadang Alat Kedokteran	6.295.406.402,61	10.476.619.245,44
5	Suku Cadang Alat Laboratorium	2.361.304.083,00	4.525.335.610,40
6	Alat Tulis Kantor	3.583.338.597,68	4.716.991.996,50
7	Bahan Cetak	1.710.467.681,50	3.258.251.775,00
8	Alat Listrik	501.000,00	5.794.000,00
9	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.282.226.741,00	1.115.587.538,00
10	Obat	12.016.402.693,11	14.400.168.916,36
11	Obat-obatan Lainnya	0,00	5.895.017.887,00
12	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	382.312.353.625,66	1.363.792.554.657,76
13	Persediaan Dalam Proses	0,00	5.438.539.699,52
14	Komponen Jembatan Baja	6.644.789.031,70	9.411.030.955,70
15	Komponen Peralatan	0,00	10.690.068.656,10
16	Komponen Lainnya	8.610.704.046,02	0,00
TOTAL PERSEDIAAN		431.050.025.902,28	1.437.839.613.759,78

Saldo Persediaan Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 sebesar Rp431.050.025.902,28. Saldo persediaan tersebut dihitung dengan menggunakan metode fisik sesuai Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penilaian Persediaan yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi adalah dengan menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir dengan pencatatan metode periodik. Dalam metode ini, fungsi akuntansi secara tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi penilaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Saldo persediaan sebesar Rp431.050.025.902,28 bersumber dari hasil Rekonsiliasi Inspektorat bersama OPD yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik persediaan per 31 Desember 2023.

Rincian lebih lanjut Persediaan menurut OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 09**.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG Rp1.394.787.925.652,96

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

5.3.1.2.1 Investasi Nonpermanen Rp0,00

Nilai Investasi Nonpermanen (Pinjaman Jangka Panjang) adalah:

Kas Tunai 2006 – 2009	Rp21.376.649.706,00
Belanja yang langsung dibiayai Pemprov	<u>Rp15.019.131.957,00</u>
Jumlah	Rp36.395.781.663,00

Nilai Aset Tetap yang dipinjamkan Pemprov Papua ke PT TV Mandiri Papua tidak dicatat sebagai bagian Pinjaman Jangka Panjang karena masih tercatat di Neraca Provinsi Papua dan belum ada berita acara serah terima Aset dari Pemerintah Provinsi Papua kepada PT TV Mandiri Papua.

Pada tahun 2023 Investasi Nonpermanen senilai Rp36.395.781.663,00 direklasifikasi ke Aset Lain-lain berdasarkan surat Gubernur Papua Nomor 800/5949/SET, yaitu karena investasi non permanen tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan, PT TV Mandiri Papua sudah tidak beroperasi dan sudah dalam pembahasan status pailit. Sehingga nilai Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2023 Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Rp1.394.787.925.652,96

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Pemerintah Provinsi Papua memiliki 8 (delapan) investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp1.394.787.925.652,96

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua dalam Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah menggambarkan jumlah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah Provinsi Papua melakukan penilaian dan penyajian penyertaan modal dengan menggunakan dua metode sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.

Metode penilaian dan penyajian penyertaan modal adalah sebagai berikut:

1. Metode Biaya, digunakan untuk kondisi:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20%;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
2. Metode Ekuitas, digunakan untuk kondisi:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50%.

Besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain adalah:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat / pertemuan dewan direksi.

Saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 134
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2023	31 Desember 2022	METODE
		(Audited)	(Audited)	
1	PT. Bank Papua	985.097.635.171,01	815.198.447.584,41	Ekuitas
2	PDAM Kabupaten Jayapura	15.457.858.550,00	15.457.858.550,00	Biaya
3	PD Irian Bakti	102.512.455.274,92	102.512.455.274,92	Ekuitas
4	PT. TV Mandiri Papua	0,00	0,00	Ekuitas
5	PT. Irian Bhakti Mandiri	218.217.374.892,70	218.760.304.507,70	Ekuitas
6	PT. Asuransi Bangun Askrida	25.000.000,00	25.000.000,00	Biaya
7	PT. Jaminan Kredit Daerah Papua	72.877.601.764,33	73.237.601.764,33	Ekuitas
7	PT. PAPUA DIVESTASI MANDIRI	600.000.000,00	0,00	Biaya
TOTAL PENYERTAAN MODAL		1.394.787.925.652,96	1.225.191.667.681,36	

a. PT Bank Papua

PT Bank Papua sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya, didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor: 37/GIB/1966 dan disahkan menjadi peraturan daerah provinsi irian barat Nomor

1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970, pada lembaran daerah provinsi irian barat No. 42 Tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar IB Rp4.000.000,00.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua merupakan salah satu bagian dari struktur komposisi pemegang saham pada PT Bank Papua saat ini, dimana penyertaan modalnya, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua. Sebagaimana diatur dalam Perda tersebut, modal dasar PT Bank Papua bersumber dari penyeteroran modal berupa penyertaan saham. Dalam hal ini, penyertaan saham oleh Pemerintah Provinsi Papua sebesar 51%, Pemerintah Kabupaten/ Kota sebesar 30%, Pihak Ketiga sebesar 15%, dan Pegawai Bank sebesar 4%. Selain itu di dalam Perda tersebut diatur pula perubahan modal tersebut ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara otomatis akan dicatat sebagai modal dasar dalam bank.

Tabel 135
Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua pada PT. Bank Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

TAHUN	SETORAN MODAL	SALDO PENYETORAN MODAL
Saldo Awal		98.605.000.000,00
2009	25.000.000.000,00	123.605.000.000,00
2010	10.000.000.000,00	133.605.000.000,00
2011	10.000.000.000,00	143.605.000.000,00
2012	25.000.000.000,00	168.605.000.000,00
2013	25.000.000.000,00	193.605.000.000,00
2014	90.000.000.000,00	283.605.000.000,00
2015	0,00	283.605.000.000,00
2016	30.000.000.000,00	313.605.000.000,00
2017	75.000.000.000,00	388.605.000.000,00
2018	50.000.000.000,00	438.605.000.000,00
2019	50.000.000.000,00	488.605.000.000,00
2020	50.000.000.000,00	538.605.000.000,00
2021	75.000.000.000,00	613.605.000.000,00
2022	20.000.000.000,00	633.605.000.000,00
2023	25.000.000.000,00	658.605.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua di PT. Bank Papua menggunakan data laporan keuangan tahun 2022 Audited dan laporan dengan menghitung nilai Bagian Laba Tahun Berjalan dan penerimaan Dividen yang diterima di Tahun 2023.

Tabel 136
Investasi Pemerintah Provinsi Papua pada PT. Bank Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2023 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>
1	Saldo Investasi per 1 Januari	815.198.447.584,41	837.163.399.330,41
2	Ditambah: Bagian Laba Tahun 2022	89.704.572.033,25	0,00
3	Ditambah: Bagian Laba Tahun 2023	100.008.773.858,35	0,00
4	Ditambah : Setoran Modal	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5	Koreksi Pencatatan Laba	0,00	0,00
6	Pembayaran Dividen	(44.814.158.305,00)	(41.964.951.746,00)
7	Saldo Investasi per 31 Desember	985.097.635.171,01	815.198.447.584,41

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua terhadap PT Bank Papua berada dalam kategori kepemilikan lebih dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, maka pencatatan atau penilaian investasi berupa penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, maka pencatatan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan metode ekuitas, yaitu dengan mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian

investasi awal dicata sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Adapun bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi dari pemerintah.

Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan, PT Papua Divestasi Mandiri belum menyerahkan Laporan Keuangan, maka dengan ini pencatatan Investasi hanya mencatatkan jumlah Modal yang disetorkan dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 142
Nilai Investasi Pemerintah Provinsi Papua PT PAPUA DIVESTASI MANDIRI
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Investasi per 1 Januari	0,00	0,00
2	Ditambah: Bagian Laba (Rugi)	0,00	0,00
3	Ditambah: Penyertaan Modal	600.000.000,00	0,00
4	Koreksi pencatatan rugi Tahun sebelumnya	0,00	0,00
5	Dikurangi Deviden tahun berjalan	0,00	0,00
6	Saldo Investasi per 31 Desember	600.000.000,00	0,00

5.3.1.3

ASET TETAP

Rp14.931.515.346.029,20

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan Aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp23.329.949.745.462,40 dan Rp30.977.697.766.778,20 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 143
Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KLASIFIKASI		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Tanah	1.822.584.209.202,35	1.981.692.479.514,59
2	Peralatan dan Mesin	2.501.733.738.034,41	2.607.642.528.059,21
3	Gedung dan Bangunan	6.511.675.158.075,89	7.826.120.649.429,38
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.069.749.203.880,50	16.645.422.821.067,40
5	Aset Tetap Lainnya	412.747.572.352,00	465.129.952.070,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.011.459.863.917,30	1.451.689.336.637,62
TOTAL ASET TETAP		23.329.949.745.462,40	30.977.697.766.778,20

Saldo Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak termasuk KDP) masing-masing senilai Rp22.318.489.881.545,10 dan Rp29.526.008.430.140,60 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 144
Aset Tetap Tidak Termasuk KDP Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2023	29.526.008.430.140,60	27.439.983.947.724,80
2	Penambahan Selama TA 2023	564.203.241.590,15	2.460.880.301.009,40
a.	Belanja Modal (LRA)	493.646.221.419,80	2.001.033.258.282,37
b.	Kapitalisasi belanja barang Jasa	42.099.891.161,37	150.180.321.933,22
c.	Kapitalisasi dari KDP (n-1)	1.347.762.996,06	218.789.610.177,34
d.	Reklasifikasi Aset ke KDP	299.299.401,00	0,00
e.	Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lain-lain	0,00	0,00
f.	Reklasifikasi Aset Tetap dari Persediaan	0,00	24.572.525.600,00
g.	Reklasifikasi Aset Tetap dari Ekstrakomtable	2.545.757.357,83	0,00
g.	Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Aset Tetap	0,00	0,00
h.	Reklasifikasi Antar KIB	6.289.191.550,50	26.491.140.216,17
i.	Mutasi antar SKPD	1.329.493.403,00	0,00
j.	Uang Muka jadi Aset Tetap	0,00	0,00
k.	Aset Dana BOS	157.778.600,00	0,00
l.	Aset Tetap dari Hibah	10.393.853.719,00	0,00
m.	Aset BLUD	6.093.991.981,59	39.813.444.800,30
3	Pengurangan Selama TA 2023	7.771.721.790.185,58	374.855.818.593,62
a.	Belanja Modal menjadi KDP	32.758.791.941,36	51.234.551.885,40

Klasifikasi		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Audited)	(Audited)
b.	Belanja Modal yang Dihilangkan	0,00	18.359.289.151,00
c.	Belanja Barang Jasa Jadi KDP	0,00	0,00
d.	Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	0,00	21.450.973.881,13
e.	Belanja Modal yang Menjadi Barang/Jasa	6.079.122.873,13	61.129.942.547,17
f.	Belanja Modal Jadi Utang/Pelunasan Utang	0,00	34.663.367.272,19
g.	Belanja Modal yang Menjadi Barang Habis Pakai	4.070.626.208,00	120.000.000,00
h.	Belanja Modal Jadi Ekstrakomtabel	4.829.747.037,07	14.315.641.653,15
i.	Reklasifikasi Antar KIB	6.568.917.550,50	27.078.062.673,94
j.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	7.658.122.612.359,30	102.963.788.119,92
k.	Reklasifikasi KDP ke Aset	0,00	0,00
l.	Aset Tetap yang Dihilangkan	1.717.046.039,00	32.284.962.534,76
m.	Aset Tetap yang Dihapuskan	0,00	897.094.000,00
n.	Uang Muka Pekerjaan	0,00	10.358.144.874,96
o.	Reklasifikasi ke Aset Lancar	1.912.819.000,00	0,00
p.	Mutasi Kurang Antar SKPD	1.329.493.403,00	0,00
q.	Hibah non Aset	23.780.610.374,22	0,00
r.	Mutasi ke DOB	30.552.003.400,00	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	22.318.489.881.545,10	29.526.008.430.140,60

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.011.260.122.317,30 dan Rp1.451.689.336.637,62 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 145
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Audited)	(Audited)
1	Saldo Awal per 01 Januari 2023	1.451.689.336.637,62	1.593.556.740.970,85
2	Penambahan Selama TA 2023	33.355.741.306,36	77.773.870.783,45
a.	Belanja Modal (LRA)	0,00	34.598.741.970,11
b.	Kapitalisasi belanja barang Jasa	397.223.365,00	299.299.401,00
c.	Kapitalisasi dari KDP (n-1)	0,00	0,00
d.	Reklasifikasi Aset ke KDP	31.057.635.268,36	0,00
e.	Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lain-lain	0,00	0,00
f.	Reklasifikasi Aset Tetap dari Persediaan	0,00	0,00
g.	Reklasifikasi Aset Tetap dari Ekstrakomtable	0,00	199.799.001,00
h.	Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Aset Tetap	0,00	0,00
i.	Reklasifikasi Antar KIB	1.900.882.673,00	17.676.030.411,34
j.	Mutasi antar SKPD	0,00	0,00
k.	Uang Muka jadi Aset Tetap	0,00	25.000.000.000,00
3	Pengurangan Selama TA 2023	473.585.214.026,68	219.641.275.116,68
a.	Belanja Modal menjadi KDP	0,00	0,00
b.	Belanja Modal yang Dihilangkan	0,00	0,00
c.	Belanja Barang Jasa Jadi KDP	0,00	0,00
d.	Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	0,00	0,00
e.	Belanja Modal yang Menjadi Barang/Jasa	0,00	0,00
f.	Belanja Modal Jadi Utang/Pelunasan Utang	0,00	0,00
g.	Belanja Modal yang Menjadi Barang Habis Pakai	0,00	0,00
h.	Belanja Modal Jadi Ekstrakomtabel	49.158.015,00	442.316.901,00
i.	Reklasifikasi Antar KIB	0,00	0,00
j.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	471.988.494.014,62	0,00
k.	Reklasifikasi KDP ke Aset	1.547.561.997,06	219.198.958.215,68
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	1.011.459.863.917,30	1.451.689.336.637,62

5.3.1.3.1

Tanah

Rp1.822.584.209.202,35

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akruar menyatakan Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah dapat diakui sebagai Aset Tetap bila memenuhi lima kriteria yaitu: berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan Aset dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah tidak memungkinkan untuk penggunaan biaya perolehan maka nilai Aset tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Saldo tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.822.584.209.202,35 dan Rp1.981.692.479.514,59 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 146
Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2023	1.981.692.479.514,59	1.930.579.388.732,89
2	Penambahan Selama TA 2023	12.734.748.904,00	51.113.090.781,70
	a. Belanja Modal (LRA)	12.734.748.904,00	25.000.000.000,00
	b. Kapitalisasi belanja barang Jasa	0,00	0,00
	c. Kapitalisasi dari KDP (n-1)	0,00	25.000.000.000,00
	d. Aset BLUD	0,00	1.113.090.781,70
3	Pengurangan Selama TA 2023	171.843.019.216,24	0,00
	a. Belanja Modal menjadi KDP	0,00	0,00
	b. Belanja Modal yang Dihibahkan	0,00	0,00
	c. Belanja Barang Jasa Jadi KDP	0,00	0,00
	d. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	0,00	0,00
	e. Belanja Modal yang Menjadi Barang/Jasa	27.896.000,00	0,00
	f. Belanja Modal Jadi Utang/Pelunasan Utang	0,00	0,00
	g. Belanja Modal yang Menjadi Barang Habis Pakai	0,00	0,00
	h. Belanja Modal Jadi Ekstrakomtabel	0,00	0,00
	i. Reklasifikasi Antar KIB	1.314.719.600,00	0,00
	j. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	165.396.070.312,24	0,00
	k. Hibah non Aset	5.104.333.304,00	0,00
	l. Mutasi ke DOB	0,00	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	1.822.584.209.202,35	1.981.692.479.514,59

Dalam Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya untuk mengurus bukti-bukti kepemilikan atas tanah-tanah yang belum disertifikatkan dan balik nama dari Hak milik ke Hak Pakai Pemerintah Provinsi Papua.

Penurunan nilai Aset tanah selama tahun 2023 sebesar Rp159.108.270.312,24 (Saldo per 31 Desember 2023 – Saldo per 31 Desember 2022) ialah berasal belanja modal senilai Rp12.734.748.904,00 serta pengurangan yang terdiri dari Belanja Modal yang Menjadi Barang/Jasa senilai Rp27.896.000,00, Reklasifikasi Antar KIB senilai Rp1.314.719.600,00, Reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp165.396.070.312,24 dan Hibah non Aset Rp5.104.333.304,00.

Aset tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua Yang Bersengketa dan telah dilakukan Upaya Pengamanan dan Penertiban.

1. Tanah Bangunan Perumahan Komplek DPRP di Jalan Baru Kotaraja seluas 50.000 m² dengan nilai perolehan Rp4.171.948.320,00.

Tanah tersebut telah memiliki bukti legalitas sesuai dengan SHP No 65/ Desa Vim tanggal 30 Mei 1995. Tanah tersebut sebagian digunakan untuk membangun rumah dinas 20 unit dan sisanya belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Rumah – rumah dinas tersebut sebagian besar ditempati oleh anggota DPRP yang telah purna bakti masa jabatannya. Tanah diluar perumahan yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua yang seharusnya masih kosong telah dikapling dan dipagar menjadi 11 unit oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pengamanan Aset adalah telah dibuat surat teguran kepada penghuni dan telah di pasang Plang tanah milik Pemerintah Provinsi Papua serta tidak diberikan Surat Ijin Penghunian (SIP) atas Rumah – rumah Dinas tersebut.

2. Tanah peruntukan Stadion Kotaraja di Jalan Baru Kota Raja seluas 73.330 m² dengan nilai perolehan Rp39.378.210.000,00.

Pada lokasi tanah tersebut terdapat bangunan milik Pemerintah Provinsi Papua berupa kolam renang yang sudah tidak dimanfaatkan dan telah memiliki bukti legalitas sesuai dengan SHP no 37/Desa Vim tanggal 29 Mei 1993 untuk kolam renang seluas 22.536 m². Pada lokasi tanah tersebut terdapat bangunan rumah masyarakat dan bangunan untuk peternakan yang dikuasai oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua yaitu melakukan koordinasi dengan BPN kota untuk segera diterbitkan HGB pada setiap penghuni untuk dikenakan sewa tanah pertahun sesuai dengan jenis jasa komersil.

3. Aset Tanah ex Dinas Sosial di Kelapa Lima, Merauke seluas 48.188 m²

Tanah seluas 48.188 m² dengan nilai perolehan senilai Rp3.402.756.000,00 berada di Persil Kuda Mati Kabupaten Merauke sesuai bukti kepemilikan Tanah SHP. No.10/desa Kelapa lima, Persil Kuda Mati. Tanah persil seluas 48.188 m² adalah milik Pemerintah Provinsi Papua, yang dimanfaatkan sebagai Balai Latihan Kerja (BLK). Lokasi tanah tersebut sebagian besar telah diperjual belikan oleh masyarakat setempat dan dikuasai oleh masyarakat. Pada lokasi tanah tersebut, masyarakat telah membangun rumah dan merenovasi eks kantor Dinsos, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua melakukan pendekatan persuasif dan bila tidak diindahkan maka akan dilanjutkan ke Pengadilan.

4. Tanah Dinas Perkebunan Jl. Sumatra Jayapura (Eks Dinas Perkebunan).

Tanah seluas 1.657 m² dengan bukti legalitas tanah berupa sertifikat SHP no 13/Desa Mandala tanggal 19 Pebruari 1990. Tanah bangunan pemerintah tersebut telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat usaha rental, bangunan rumah makan dan rumah tinggal. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua melakukan pendekatan persuasif dan meminta setiap penghuni untuk membuat pernyataan bahwa tanah bangunan tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Papua.

5. Tanah Gedung Klinik Hewan Jalan Raya Entrop Jayapura.

Tanah seluas 50.000 m² dengan nilai perolehan senilai Rp30.700.000.000,00. Tanah tersebut terdiri dari tempat pemotongan hewan yang sudah beralih fungsi menjadi Rumah Dinas dengan bukti legalitas tanah berupa sertifikat SHP no 17/desa Entrop tanggal 17 September 1996 seluas 560 m² dan kantor Balai Klinik Hewan.

- a. Tanah yang masih dikuasai oleh Balai Klinik Hewan hanya seluas kurang lebih 13.000 m², tanah tersebut telah dipagar keliling namun sebagian lokasi dijadikan jalan umum oleh masyarakat.
- b. Luas tanah sudah berkurang seluas 30.000 m² dan berpindah tangan karena proses jual beli dan sudah dipenuhi rumah masyarakat.

6. Tanah Dinas Perikanan dan Kelautan Kantor Balai Benih Ikan Jl. Yabaso Sentani Kabupaten Jayapura.

Tanah seluas 48.000 m² dengan nilai perolehan Rp7.680.000.000,00. Tanah tersebut awalnya direncanakan untuk kantor Balai Benih Ikan di Jl. Yabaso, Sentani Kabupaten Jayapura. Namun sehubungan dengan tanah tersebut yang telah dikuasai oleh masyarakat, maka kantor Balai Benih Ikan dipindahkan ke Desa Berap, Distrik Genyem Kabupaten Jayapura.

7. Tanah Dinas Pariwisata Gedung Expo Waena.

Tanah seluas 120.000 m² dengan nilai perolehan Rp24.000.000.000,00 dengan bukti legalitas Sertipikat HP No 676/Desa Waena tanggal 12 Oktober 1982. Gedung Expo tersebut tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua karena dikuasai oleh Pihak ketiga. Upaya yang telah dilakukan dengan melakukan beberapa kali rapat dengan pemilik Ulayat untuk mencari solusi atas masalah tersebut, namun sampai saat ini mengalami kendala karena tuntutan Ganti Rugi tanah dari Pihak Adat yang cukup besar.

8. Tanah Dinas Kesehatan.

Tanah peruntukan puskesmas yang terletak di Jl. Baru Pasar Yotefa dengan nilai perolehan Rp1.600.000.000,00 di tempati dan dikuasai oleh masyarakat untuk usaha perdagangan berupa kios.

9. Hotel Arfak Lokasi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

Dasar Kepemilikan:

- a. Dokumen Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT.Natour Kepada Pemerintah Provinsi Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989.
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 276/HGB/BPN 89 tanggal 11 Maret 1989. Telah dilakukan Kajian Penilaian Aset Tanah Hotel Numbay dengan Nilai tanah senilai

Rp4.131.100.000,00 Lokasi Tanah Hotel tersebut, di tuntut ganti rugi tanah oleh Masyarakat Adat/ Pemilik Ulayat dan bangunan dikuasai sepenuhnya oleh Masyarakat atau Pihak yang tidak berhak.

10. Hotel Mapia Lokasi Kabupaten Biak Numfor.

Dasar Kepemilikan:

- a. Dokumen Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT.Natour Kepada Pemerintah Provinsi Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989.
- b. Sertipikat Tanah HPL nomor 01/ Mandala tanggal 1 Mei 1993 seluas 21.264 m², dengan harga perolehan Rp3.402.240.000,00.

Permasalahan :

- a. Tanah Hotel Mapia Biak seluas 21.264 m² sesuai surat pelepasan tanah dari pemilik an. Matias Rumaropen tertanggal 19 Juli 2010 dimana sebagian tanah hotel tersebut di jual kembali oleh Pemilik Ulayat kepada Masyarakat Luar untuk pembangunan rumah tinggal dan usaha.
 - b. Dalam rangka Penertiban Aset milik Pemerintah Provinsi Papua telah dilakukan pendekatan persuasif kepada warga yang ada namun tidak ada solusi penyelesaian.
 - c. Sebanyak 15 kapling berupa: tempat usaha, kafe, bengkel, penjualan batu tela dan dibangun rumah sewa yang disewakan terdiri dari tiga bangunan kopel, dua bangunan rumah kopel terdiri dari tiga unit dan satu bangunan kopel empat unit, serta tempat tinggal penduduk. Bangunan yang dibangun oleh masyarakat tersebut sebagian besar dibuat secara permanen.
11. Dinas Perikanan dan Kelautan TPI (Tanah Pelabuhan Pendaratan Ikan) Hamadi Kota Jayapura.
Tanah seluas 20.000 m² dengan bukti legalitas SHP nomor 19 tanggal 28 April 1997. Permasalahan yang di hadapi pengelolaan TPI Hamadi tidak sesuai mekanisme yang ada.
12. Tanah Hotel Marauw berlokasi di Biak seluas 3.250.000 m² dengan HPL nomor 26.09.02.14.5.0000 atas nama Pemerintah Provinsi Papua, adanya kredit macet oleh PT. Biak Marauw Tourism Development Corporation dengan jaminan HGB yang berlaku selama 30 tahun. Tanah tersebut dilelang oleh KPKNL senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah), diatas tanah tersebut tidak lagi berdiri bangunan Hotel yang mana sudah dirobohkan.

5.3.1.3.2

Peralatan dan Mesin

Rp2.501.733.738.034,41

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menyatakan Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin diakui sebagai Aset Tetap apabila berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan dapat diukur dengan handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Aset Tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya yang tercantum di dalam Kontrak/SPK untuk memperoleh dan mempersiapkan Aset sampai siap di manfaatkan. Penyajian peralatan dan mesin berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.501.733.738.034,41 dan senilai Rp2.607.642.528.059,21 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 147
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Audited)	(Audited)
1	Saldo Awal per 01 Januari 2023	2.607.642.528.059,21	2.408.541.531.890,26
2	Penambahan Selama TA 2023	143.372.999.455,02	252.848.297.658,81
	a. Belanja Modal (LRA)	136.329.618.455,43	208.232.006.607,21
	b. Kapitalisasi belanja barang Jasa	477.067.515,00	3.042.017.739,00
	c. Kapitalisasi dari KDP (n-1)	0,00	0,00
	d. Reklasifikasi Antar KIB	24.930.000,00	3.994.224.294,00
	e. Mutasi antar SKPD	1.329.493.403,00	0,00
	f. Uang Muka jadi Aset Tetap	0,00	0,00
	g. Aset Dana BOS	157.778.600,00	0,00
	h. Aset Tetap dari Hibah	0,00	0,00
	i. Aset BLUD	5.054.111.481,59	37.580.049.018,60
3	Pengurangan Selama TA 2023	249.281.789.479,82	53.747.301.489,86
	a. Belanja Modal menjadi KDP	0,00	0,00
	b. Belanja Modal yang Dihilangkan	0,00	18.359.289.151,00
	c. Belanja Barang Jasa Jadi KDP	0,00	0,00
	d. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	0,00	18.470.755.028,13
	e. Belanja Modal yang Menjadi Barang/Jasa	2.535.424.846,23	1.514.280.816,40
	f. Belanja Modal Jadi Utang/Pelunasan Utang	0,00	0,00
	g. Belanja Modal yang Menjadi Barang Habis Pakai	2.293.260.268,00	0,00
	h. Belanja Modal Jadi Ekstrakomtabel	2.150.591.251,00	11.880.025.736,39
	i. Reklasifikasi Antar KIB	2.266.082.750,50	1.306.271.357,94
	i. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	202.438.043.742,89	1.319.585.400,00
	j. Reklasifikasi KDP ke Aset	0,00	0,00
	j. Aset Tetap yang Dihilangkan	488.919.500,00	0,00
	k. Aset Tetap yang Dihapuskan	0,00	897.094.000,00
	l. Mutasi Kurang Antar SKPD	1.329.493.403,00	0,00
	m. Hibah non Aset	5.227.970.318,20	0,00
	n. Mutasi ke DOB	30.552.003.400,00	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	2.501.733.738.034,41	2.607.642.528.059,21

Penurunan nilai peralatan dan mesin selama tahun 2023 sebesar (Rp105.908.790.024,80) (Saldo per 31 Desember 2023 - Saldo per 31 Desember 2022) yang berasal dari:

1. Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 senilai Rp136.329.618.455,43 nilai ini kemudian dikurangi dengan Reklasifikasi Belanja Modal menjadi jasa senilai Rp2.535.424.846,23, Reklasifikasi ke Barang Habis Pakai senilai Rp2.293.260.268,00, reklasifikasi antar KIB senilai Rp2.266.082.750,50, Hibah Aset dan non Aset masing-masing senilai Rp488.919.500,00 dan Rp5.227.970.318,20, reklasifikasi ke aset lainnya senilai Rp202.438.043.742,89, mutasi barang ke Daerah Otonomi baru senilai Rp30.552.003.400,00 dan Barang Ekstrakomtabel senilai Rp2.150.591.251,00.
2. Kapitalisasi belanja barang dan jasa (yang digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin) senilai Rp477.067.515,00.
3. Reklasifikasi Aset Tetap yang secara khusus menambah nilai Aset peralatan mesin senilai Rp24.930.000,00.
4. Peralatan mesin dari BLUD senilai Rp5.054.111.481,59.
5. Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana BOS senilai Rp157.778.600,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp6.511.675.158.075,89

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menyatakan Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah: gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya.

Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan maka Gedung dan Bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud

untuk digunakan. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan yang meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.

Pada Tahun Anggaran 2023 nilai Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi merupakan nilai konstruksi, perencanaan pengawasan dan pemeliharaan/ renovasi yang didasarkan pada nilai kontrak.

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp6.511.675.158.075,89 dan senilai Rp7.826.120.649.429,38 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 148
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2023 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2022 <i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2023	7.826.120.649.429,38	6.813.958.741.827,25
2	Penambahan Selama TA 2023	108.028.869.954,21	1.237.922.027.500,74
	a. Belanja Modal (LRA)	103.129.046.171,65	1.053.603.951.959,30
	b. Kapitalisasi belanja barang Jasa	1.227.735.510,00	16.956.800.294,50
	c. Kapitalisasi dari KDP (n-1)	1.347.762.996,06	140.452.423.608,65
	d. Reklasifikasi Aset ke KDP	299.299.401,00	0,00
	e. Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lain-lain	0,00	0,00
	f. Reklasifikasi Aset Tetap dari Persediaan	0,00	24.572.525.600,00
	g. Reklasifikasi Aset Tetap dari Ekstrakomtable	670.848.268,00	0,00
	h. Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Aset Tetap	0,00	0,00
	i. Reklasifikasi Antar KIB	314.297.107,50	1.216.021.038,29
	j. Aset BLUD	1.039.880.500,00	1.120.305.000,00
3	Pengurangan Selama TA 2023	1.422.474.361.307,70	225.760.119.898,61
	a. Belanja Modal menjadi KDP	1.900.882.673,00	0,00
	b. Belanja Modal yang Dihilangkan	0,00	0,00
	c. Belanja Barang Jasa Jadi KDP	0,00	0,00
	d. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	0,00	1.296.894.000,00
	e. Belanja Modal yang Menjadi Barang/Jasa	3.213.826.526,90	38.899.379.051,98
	f. Belanja Modal Jadi Utang/Pelunasan Utang	0,00	34.663.367.272,19
	g. Belanja Modal yang Menjadi Barang Habis Pakai	0,00	0,00
	h. Belanja Modal Jadi Ekstrakomtable	1.222.370.143,07	742.132.118,76
	i. Reklasifikasi Antar KIB	2.908.115.200,00	25.313.906.316,00
	j. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	1.400.284.970.757,87	101.644.202.719,92
	k. Reklasifikasi KDP ke Aset	0,00	0,00
	l. Aset Tetap yang Dihilangkan	1.228.126.539,00	22.115.419.918,76
	m. Aset Tetap yang Dihapuskan	0,00	0,00
	n. Hibah non Aset	0,00	1.084.818.501,00
	o. Hibah non Aset	11.716.069.467,86	0,00
	o. Mutasi ke DOB	0,00	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	6.511.675.158.075,89	7.826.120.649.429,38

Penurunan nilai gedung dan bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp1.314.445.491.353,49 (Saldo per 31 Desember 2023 - Saldo per 31 Desember 2022) yang berasal dari:

1. Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2023 senilai Rp103.129.046.171,65. Nilai ini kemudian dikurangi dengan nilai pengurangan diantaranya; Reklasifikasi ke Kontruksi dalam Pengerjaan senilai Rp1.900.882.673,00, Reklasifikasi ke Barang jasa senilai Rp3.213.826.526,90, Reklasifikasi antar KIB senilai Rp2.908.115.200,00, Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp1.400.284.970.757,87, Aset Tetap dihibahkan senilai Rp1.228.126.539,00, Hibah non aset senilai Rp11.716.069.467,86, serta Barang Ekstrakomtable senilai Rp1.222.370.143,07.
2. Belanja barang dan jasa yang menjadi Aset Tetap gedung/bangunan senilai Rp1.227.735.510,00.
3. Kapitalisasi KDP yang mana fisik Aset telah selesai pekerjaan 100% senilai Rp1.347.762.996,06.
4. Reklasifikasi KDP ke Aset senilai Rp299.299.401,00.
5. Reklas Antar KIB senilai Rp314.297.107,50.
6. Pengadaan Aset dari BLUD senilai Rp1.039.880.500,00.
7. Kapitalisasi dari Barang Ekstrakomtable senilai Rp670.848.268,00

Gedung Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Papua yang bersengketa:

1. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat 25 Rumah Dinas yang berlokasi di BBI Holtikultura, Desa Kurik Kabupaten Merauke. Rumah dinas sebanyak 10 rumah ditempati oleh Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sedangkan 15 Rumah Dinas ditempati oleh masyarakat.
2. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan terdapat 33 Rumah Dinas untuk Instruktur Balai Latihan Kerja yang berlokasi di Balai Latihan Kerja, Jl. Pasifik Indah, Kota Jayapura. Rumah dinas sebanyak 16 rumah ditempati oleh para PNS Instruktur BLK sedangkan 17 rumah dinas ditempati oleh masyarakat yang tidak berhak dan terdapat 1 buah bangunan yang dialihfungsikan menjadi 5 kopel rumah tinggal masyarakat.
3. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura terdapat 56 Rumah Dinas yang berlokasi di lingkungan RSUD Jayapura Jalan Kesehatan Dok II kota Jayapura. Rumah Dinas sebanyak 44 Rumah ditempati oleh tenaga medis dan pegawai RSUD Jayapura. Sedangkan sebanyak 12 rumah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak yang terdiri dari pensiunan menempati 9 rumah dan 3 rumah ditempati oleh masyarakat pemilik hak ulayat.
4. Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat 15 Rumah Dinas yang berlokasi di Balai Hewan dan Laboratorium Provinsi Papua, Jl. Entrop/Abepura, Kota Jayapura. Rumah dinas sebanyak 5 rumah ditempati oleh PNS aktif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan 10 rumah ditempati oleh pensiunan. Terdapat 21 Rumah Dinas yang berlokasi di Jl. Raya Sentani, Waena, kota Jayapura. Rumah dinas sebanyak 11 rumah ditempati oleh Pegawai yang masih aktif sedangkan 10 rumah dinas dikuasai oleh pensiunan dan keluarga pensiun.
5. Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua terdapat bangunan berupa eks kantor perkebunan sebanyak 5 (lima) bangunan yang berlokasi di Jl. Sumatera Dok V Kota Jayapura. Namun seluruh bangunan tersebut dikuasai oleh Masyarakat yang tidak berhak. Selain itu terdapat pula 1 bangunan kantor yang digunakan oleh Pusat Koperasi Pegawai RI Provinsi Papua yang berlokasi di Jl. Raya Cigombong, Kota Jayapura namun sekarang ditempati oleh masyarakat.
6. Hotel Numbay Lokasi Kota Jayapura

Dasar Kepemilikan:

- a. Dokumen Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT.Natour Kepada Pemerintah Provinsi Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989.
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 19 tanggal 26 Februari 1990 seluas 7.959 m².
- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 30 Juni 1994 seluas 5.420 m².
- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 21 tanggal 31 Mei 1990 seluas 22.737 m².

Dengan harga perolehan tanah senilai Rp12.098.860.000,00

Permasalahan:

- a. Tanah Hotel Numbay seluas 7.959 m² masih terdapat rumah pribadi anak-anak bekas karyawan dan rumah kontrak oleh dua Partai Politik serta satu gedung masih ditempati pemilik tanah.
- b. Beberapa unit kamar Hotel Numbay blok atas yang berbatasan dengan Jl. Maluku masih ditempati pensiunan karyawan Hotel eks PT. Natour sejak pensiun sampai dengan saat ini, selain itu telah dibangun rumah tinggal oleh pensiunan karyawan hotel.
- c. Tahun 1990 rumah /gedung depan Jalan Angkasa dipinjamkan kepada 2 (dua) Partai Politik (PDI dan PPP) masih tetap ditempati sampai dengan saat ini dan Aset gedung yang dipinjamkan belum dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

7. Hotel Asmat berlokasi di Kabupaten Merauke.

Dasar Kepemilikan:

- a. Dokumen Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT.Natour Kepada Pemerintah Provinsi Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989.

- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) an. PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional Nomor 10 tanggal 24 April 1978 Seluas 6.288 m²
- c. Telah dilakukan Pensertipikatan dengan membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor 028/8001/SET dan Nomor 734.A/SKB-91/VI/2015 tentang Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Papua tanggal 24 Juni 2015.

Dengan Nilai Tanah Hotel Asmat Merauke berdasarkan Tim Penilai Independen senilai Rp7.760.100.000,00

Permasalahan:

- a. Hotel Asmat Merauke merupakan Aset Milik Pemerintah Provinsi Papua, namun sejak melakukan renovasi bangunan yaitu penambahan kamar hotel dari 16 kamar menjadi 22 kamar, 1 Gedung Aula Noken Said an. Rumah Karyawan hotel Pemerintah Kabupaten Merauke tidak berkoordinasi dengan Pihak Pemerintah Provinsi Papua.
- b. Penerimaan sektor jasa usaha dari Hotel Asmat Merauke, menurut keterangan pihak hotel penyeteroran hasil penerimaan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke sejak tahun 2011, namun pihak hotel tidak dapat menunjukkan bukti penyeteroran tersebut.
- c. Penyeteroran penghasilan hotel di tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2010 tidak dapat dibuktikan karena pengelolaan Aset tersebut langsung oleh Pemerintah Kabupaten Merauke.
- d. Pimpinan Hotel Asmat Merauke sampai dengan saat ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 322 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011.

8. Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Papua yang berlokasi di Jakarta:

- a. Tanah Abang: Lokasi Jl. K.H Mas Mansyur No.63, RT 016/009, luas tanah 8.403 m² dengan bukti legalitas HP Nomor 428 tanggal 29 Juli 2013, sedang dalam proses pengurusan HP ke HPL pada BPN Pusat untuk proses pemanfaatan bagi hasil antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pihak Pengembang. Saat ini sedang dalam Penyelesaian pengosongan Penghuni yang menempati lokasi Tanah abang.
- b. Bangunan Kali Batu Senen: Lokasi Jalan Kali Batu / Timur VI No 3.RT.010/002 luas tanah 575 m² dengan bukti legalitas HP 167 tanggal 29 Juli 2013, bangunan tersebut di tempati oleh Pihak Lain.
- c. Bangunan Kepu Selatan: Lokasi Jl. Kepu Selatan No. 55 RT.008/009 luasan 1.214 m² dengan bukti legalitas HP Nomor 237 tanggal 29 Juli 2013, bangunan tersebut di tempati oleh Pihak Lain.
- d. Bangunan Tanah Tinggi: lokasi Jl. Tanah Tinggi I No 78-A RT 012/006 luasan 910 m² dengan bukti legalitas HP Nomor 105 tanggal 29 Juli 2013, bangunan tersebut di tempati oleh Pihak Lain.
- e. Bangunan Rawa Barat: Lokasi Jl. Suryo Nomor 60 RT.001/04 luasan 437 m² dengan bukti legalitas HP nomor 364 tanggal 7 september 1999, bangunan tersebut di tempati oleh Pihak lain.

Gedung Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Papua yang bersengketa tersebut kedepan akan dilakukan Pengelolaan secara KSP, BGS dan KSPI yang mana pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi selama ini terhadap bangunan yang bersengketa dengan membuat surat pernyataan penempatan sementara Gedung/Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Papua kepada Pihak ketiga.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp11.069.749.203.880,50

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual menyatakan Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki

dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai jalan, irigasi dan jaringan maka jalan, irigasi dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal.

Jalan, Irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya ini menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi biaya perolehan yang terdiri dari biaya konstruksi, perencanaan dan pengawasan sampai jaringan tersebut siap pakai.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.069.749.203.880,50 dan Rp16.645.422.821.067,40 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 149
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2023	16.645.422.821.067,40	15.822.893.370.754,40
2	Penambahan Selama TA 2023	297.637.381.836,92	915.122.087.450,15
	a. Belanja Modal (LRA)	239.023.566.448,72	710.724.650.597,86
	b. Kapitalisasi belanja barang Jasa	40.395.088.136,37	130.181.503.899,72
	c. Kapitalisasi dari KDP (n-1)	0,00	53.337.186.568,69
	d. Reklasifikasi Aset Tetap dari Ekstrakomtable	1.874.909.089,83	0,00
	e. Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Aset Tetap	0,00	0,00
	f. Reklasifikasi Antar KIB	5.949.964.443,00	20.878.746.383,88
	g. Aset Tetap dari Hibah	10.393.853.719,00	0,00
	i. Aset BLUD	0,00	0,00
3	Pengurangan Selama TA 2023	5.873.310.999.023,82	92.592.637.137,15
	a. Belanja Modal menjadi KDP	30.857.909.268,36	51.234.551.885,40
	b. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	0,00	4.258.535,00
	c. Belanja Modal yang Menjadi Barang/Jasa	0,00	20.716.282.678,79
	d. Belanja Modal Jadi Ekstrakomtable	1.376.785.643,00	1.194.675.048,00
	e. Reklasifikasi Antar KIB	0,00	0,00
	f. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	5.837.431.247.828,30	0,00
	g. Aset Tetap yang Dihilangkan	0,00	10.169.542.616,00
	h. Uang Muka Pekerjaan	0,00	9.273.326.373,96
	i. Reklasifikasi ke Aset Lancar	1.912.819.000,00	0,00
	j. Hibah non Aset	1.732.237.284,16	0,00
	k. Mutasi ke DOB	0,00	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	11.069.749.203.880,50	16.645.422.821.067,40

Penurunan nilai Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2023 sebesar Rp5.575.673.617.186,90 (saldo per 31 Desember 2023 – saldo per 31 Desember 2022) yang berasal dari:

1. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp239.023.566.448,72, Nilai ini kemudian dikurangi dengan belanja modal yang menjadi Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp30.857.909.268,36, Hibah non Aset senilai Rp1.732.237.284,16, Ekstrakomtable tahun berjalan senilai Rp1.376.785.643,00, reklasifikasi ke Aset Bagian Lancar Tagihan Kerugian senilai Rp1.912.819.000,00 serta reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp5.837.431.247.828,30.
2. Belanja Barang dan Jasa yang Menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp40.395.088.136,37.
3. Reklasifikasi antar asset tetap sebesar Rp5.949.964.443,00
4. Aset Tetap dari Hibah Rp10.393.853.719,00.
5. Kapitalisasi Barang Ekstrakomtable senilai Rp1.874.909.089,83

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp412.747.572.352,00

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual menyatakan Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap

diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi buku perpustakaan/buku dan non buku, barang corak kesenian/kebudayaan/ olahraga, hewan, ikan dan tanaman.

Aset Tetap lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu kantor yang bukan miliknya.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan harga perolehan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp412.747.572.352,00 dan senilai Rp465.129.952.070,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 150
Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Saldo Awal per 01 Januari 2023	465.129.952.070,00	464.010.914.520,00
2	Penambahan Selama TA 2023	2.429.241.440,00	3.874.797.618,00
	a. Belanja Modal (LRA)	2.429.241.440,00	3.472.649.118,00
	b. Kapitalisasi belanja barang Jasa	0,00	0,00
	c. Kapitalisasi dari KDP (n-1)	0,00	0,00
	e. Reklasifikasi Antar KIB	0,00	402.148.500,00
	f. Aset BLUD	0,00	0,00
3	Pengurangan Selama TA 2023	54.811.621.158,00	2.755.760.068,00
	a. Belanja Modal menjadi KDP	0,00	0,00
	b. Belanja Modal yang Dihilangkan	0,00	0,00
	c. Belanja Barang Jasa Jadi KDP	0,00	0,00
	d. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	0,00	1.679.066.318,00
	e. Belanja Modal yang Menjadi Barang/Jasa	301.975.500,00	0,00
	f. Belanja Modal Jadi Utang/Pelunasan Utang	0,00	0,00
	g. Belanja Modal yang Menjadi Barang Habis Pakai	1.777.365.940,00	120.000.000,00
	h. Belanja Modal Jadi Ekstrakomtabel	80.000.000,00	498.808.750,00
	i. Reklasifikasi Antar KIB	80.000.000,00	457.885.000,00
	i. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	52.572.279.718,00	0,00
	j. Mutasi ke DOB	0,00	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	412.747.572.352,00	465.129.952.070,00

Penurunan Aset Tetap lainnya selama tahun 2023 sebesar Rp52.382.379.718,00 (Saldo per 31 Desember 2023 - Saldo Per 31 Desember 2022) berasal dari Realisasi belanja modal selama tahun 2023 senilai Rp2.429.241.440,00. Nilai ini kemudian dikurangi dengan Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Jasa Rp301.975.500,00, Belanja Modal yang Menjadi Barang Habis Pakai Rp1.777.365.940,00, Reklasifikasi antar KIB Rp80.000.000,00 serta Barang Ekstrakomtabel senilai Rp80.000.000,00, serta Reklas ke Aset Lainnya senilai Rp52.572.279.718,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp1.011.459.863.917,30

Buletin Teknis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menyatakan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah Aset dalam proses dan sedang dalam pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diakui bila manfaat ekonomi masa yang akan datang dari Aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan dapat diukur dengan handal, dan masih dalam proses pengerjaan. KDP akan dipindahkan ke pos Aset Tetap jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat sesuai tujuan perolehannya.

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi Aset Tetap tersebut menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing senilai Rp1.011.459.863.917,30 dan Rp1.451.689.336.637,62 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 151
Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Klasifikasi		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Audited)	(Audited)
1	Saldo Awal per 01 Januari 2023	1.451.689.336.637,62	1.593.556.740.970,85
2	Penambahan Selama TA 2023	33.355.741.306,36	77.773.870.783,45
	a. Belanja Modal (LRA)	0,00	34.598.741.970,11
	b. Kapitalisasi belanja barang Jasa	397.223.365,00	299.299.401,00
	c. Kapitalisasi dari KDP (n-1)	0,00	0,00
	d. Reklasifikasi Aset ke KDP	31.057.635.268,36	0,00
	e. Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lain-lain	0,00	0,00
	f. Reklasifikasi Aset Tetap dari Persediaan	0,00	0,00
	g. Reklasifikasi Aset Tetap dari Ekstrakomtable	0,00	199.799.001,00
	h. Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Aset Tetap	0,00	0,00
	i. Reklasifikasi Antar KIB	1.900.882.673,00	17.676.030.411,34
	j. Mutasi antar SKPD	0,00	0,00
	k. Uang Muka jadi Aset Tetap	0,00	25.000.000.000,00
3	Pengurangan Selama TA 2023	473.585.214.026,68	219.641.275.116,68
	a. Belanja Modal menjadi KDP	0,00	0,00
	b. Belanja Modal yang Dihilangkan	0,00	0,00
	c. Belanja Barang Jasa Jadi KDP	0,00	0,00
	d. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	0,00	0,00
	e. Belanja Modal yang Menjadi Barang/Jasa	0,00	0,00
	f. Belanja Modal Jadi Utang/Pelunasan Utang	0,00	0,00
	g. Belanja Modal Jadi Ekstrakomtable	49.158.015,00	442.316.901,00
	h. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	471.988.494.014,62	0,00
	i. Reklasifikasi KDP ke Aset	1.547.561.997,06	219.198.958.215,68
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	1.011.459.863.917,30	1.451.689.336.637,62

Rincian KDP per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Penambahan konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi belanja barang jasa yang menjadi Kontruksi dalam Pengerjaan senilai Rp197.481.765,00.
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap senilai Rp31.057.635.268,36.
3. Reklasifikasi antar Aset KIB senilai Rp1.900.882.673,00.
4. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp397.223.365,00.

Adapun pengurangan Kontruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Kontruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap senilai Rp1.547.561.997,06.
2. Kontruksi dalam Pengerjaan yang menjadi Barang Ekstrakomptabel senilai Rp49.158.015,00.
3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp471.988.494.014,62.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp8.398.434.399.433,28)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu Aset Tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai Aset Tetap tersebut juga semakin menurun. (Buletin Teknis SAP Nomor 18) Perhitungan Akumulasi Penyusutan tahun 2022 dilakukan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Jalan, Jembatan dan Irigasi.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai negatif Rp8.398.434.399.433,28 dan senilai negatif Rp13.054.971.813.599,90 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 152
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (Audited)	Mutasi			Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 (Audited)
			Koreksi Akumulasi Penyusutan	Reklas Ke Aset Lain-lain / Penghapusan	Beban Penyusutan Tahun 2023	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(1.906.526.390.148,51)	0,00	189.965.714.670,36	(239.604.505.991,26)	(1.956.165.181.469,41)
3	Gedung dan Bangunan	(1.210.842.264.073,00)	0,00	237.391.125.119,00	(163.975.789.577,98)	(1.137.426.928.531,98)
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	(9.937.603.159.378,44)	906.996.672.086,91	4.103.493.923.127,51	(377.729.725.267,87)	(5.304.842.289.431,89)
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(13.054.971.813.599,90)	906.996.672.086,91	4.530.850.762.916,87	(781.310.020.837,11)	(8.398.434.399.433,28)

Selama tahun 2023 terjadi pengurangan nilai akumulasi aset tetap senilai negatif Rp4.656.537.414.166,67 hal ini disebabkan adanya penyerahan Aset Tetap pasca PON yang diserahkan ke Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke, reklasifikasi Aset yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru, serta perhitungan ulang nilai penyusutan akibat kapitalisasi Aset tetap, selain itu terdapat penambahan beban penyusutan senilai Rp781.310.020.837,11.

Nilai buku Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp14.931.515.346.029,20 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 153
Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Klasifikasi	Harga Perolehan per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Nilai Buku per 31 Desember 2023
1	Tanah	1.822.584.209.202,35	0,00	1.822.584.209.202,35
2	Peralatan dan Mesin	2.501.733.738.034,41	(1.956.165.181.469,41)	545.568.556.565,00
3	Gedung dan Bangunan	6.511.675.158.075,89	(1.137.426.928.531,98)	5.374.248.229.543,91
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	11.069.749.203.880,50	(5.304.842.289.431,89)	5.764.906.914.448,61
5	Aset Tetap Lainnya	412.747.572.352,00	0,00	412.747.572.352,00
6	KDP	1.011.459.863.917,30	0,00	1.011.459.863.917,30
	Jumlah	23.329.949.745.462,40	(8.398.434.399.433,28)	14.931.515.346.029,20

5.3.1.4 DANA CADANGAN Rp453.016.281.601,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

.5.3.1.4.1 Dana Cadangan Rp453.016.281.601,00

Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dana Cadangan digunakan untuk mendanai peningkatan sumber daya manusia masyarakat Papua yang dititikberatkan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan pasca berakhirnya penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua. Selain itu di dalam perda tersebut diatur pula bahwa pembentukan Dana Cadangan bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan.

Dana Cadangan yang belum digunakan dapat disimpan dalam portofolio atas nama Pemerintah Provinsi Papua dengan tingkat bunga yang menguntungkan. Bunga atas penempatan dana cadangan merupakan penerimaan daerah yang menambah saldo Dana Cadangan tersebut. Perubahan saldo akhir Dana Cadangan dari awal pembentukan tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 154
Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	No Rekening	Saldo 1 Januari 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
1	100211002099907 (Giro Bank Papua)	778.723.812,00	3.902.349,00	0,00	782.626.161,00
2	110003020010611 (Deposito Bank Papua)	458.455.328.086,00	19.797.080.003,00	(478.252.408.089,00)	0,00
3	1000301005955 (Deposito Bank Papua)	459.333.864.054,00	11.868.142.673,00	(471.202.006.727,00)	0,00
4	1000301006994 (Deposito Bank Papua)	0,00	72.254.952.700,00	0,00	72.254.952.700,00
5	1000301007112 (Deposito Bank Papua)	0,00	379.978.702.740,00	0,00	379.978.702.740,00
	Jumlah	918.567.915.952,00	483.902.780.465,00	(949.454.414.816,00)	453.016.281.601,00

Hal ini sesuai dengan Lampiran I.03 PSAP – 02 yang menyebutkan Hasi-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

5.3.1.5 ASET LAINNYA Rp3.994.388.409.878,86

Aset Non Lancar lainnya diklasifikasikan sebagai Aset lainnya. Termasuk dalam Aset lainnya adalah Aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan Aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran Rp6.088.073.882,11

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran merupakan tagihan penjualan angsuran rumah dinas dan tagihan penjualan angsuran kendaraan dinas yang belum dilunasi oleh yang bersangkutan dari beberapa kali penjualan Aset rumah dinas dan kendaraan dinas sejak tahun 2004. Penjualan Aset rumah dinas dan kendaraan dinas dilakukan melalui mekanisme penghapusan Aset daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Terdapat 10 (sepuluh) Keputusan Gubernur yang pembayaran/pelunasannya telah jatuh tempo per 31 Desember 2023, yaitu:

Tabel 155
Piutang Penjualan Angsuran Yang Belum Jatuh Tempo
Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Saldo per 01 Januari 2023	Koreksi	Mutasi	Pembayaran 2023	Saldo per 31 Desember 2023
PIUTANG PENJUALAN ANGSURAN – RUMAH DINAS					
- SK Gubernur No. 133 Tahun 2004	1.941.289.047,00	0,00	0,00	0,00	1.941.289.047,00
- SK Gubernur No. 223 Tahun 2005	1.312.047.335,00	0,00	0,00	(35.669.917,00)	1.276.377.418,00
- SK Gubernur No. 191 Tahun 2009	2.160.372.660,05	0,00	0,00	(45.776.720,00)	2.114.595.940,05
PIUTANG PENJUALAN ANGSURAN – KENDARAAN DINAS					
- SK Gubernur No. 9 Tahun 2004	2.692.631,00	0,00	0,00	0,00	2.692.631,00
- SK Gubernur No. 129 Tahun 2009	24.506.255,00	0,00	0,00	0,00	24.506.255,00
- SK Gubernur No. 138 Tahun 2010	149.509.500,00	0,00	0,00	(35.640.000,00)	113.869.500,00
- SK Gubernur No. 84A Tahun 2011	420.568.291,00	0,00	0,00	(21.160.000,00)	399.408.291,00
- SK Gubernur No.89 Tahun 2013	53.720.000,00	0,00	0,00	0,00	53.720.000,00
- SK Gubernur No.188.4 Tahun 2020	264.606.600,06	0,00	(152.537.400,00)	0,00	112.069.200,06
- SK Gubernur No.188.4/268/2023 Tahun 2023	0,00	(21.637.200,00)	152.537.400,00	(81.354.600,00)	49.545.600,00
Jumlah Piutang Penjualan Angsuran	6.329.312.319,11	(21.637.200,00)	0,00	(219.601.237,00)	6.088.073.882,11

5.3.1.5.1.1 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran (Rp4.853.755.760,03)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Penyusutan Aset Tetap terhadap piutang perlu dilakukan penyisihan terhadap piutang yang sudah jatuh tempo.

Piutang Penjualan Angsuran Rumah Dinas dan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas yang perlu dilakukan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 156
Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Pemerintah Provinsi Papua
Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

THN	NILAI PIUTANG	JATUH TEMPO	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG NETO 31 Desember 2023
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		
			(<1thn)	(1 s/d 2 thn)	(>3 s/d 5 thn)	(> 5 thn)		
			0,5%	10%	50%	100%		
	Rumah Dinas							
2004	1.941.289.047,00	Mei 2014	0,00	0,00	0,00	1.941.289.047,00	1.941.289.047,00	
2005	1.276.377.418,00	Nov-15	0,00	0,00	0,00	1.276.377.418,00	1.276.377.418,00	
2009	2.114.595.940,05	2019	0,00	0,00	1.057.297.970,03	0,00	1.057.297.970,03	
	Kendaraan Dinas							
2004	2.692.631,00		0,00	0,00	0,00	2.692.631,00	2.692.631,00	
2009	24.506.255,00	Desember 2014	0,00	0,00	0,00	24.506.255,00	24.506.255,00	
2010	113.869.500,00	Desember 2015	0,00	0,00	0,00	113.869.500,00	113.869.500,00	
2011	399.408.291,00	Juli 2016	0,00	0,00	0,00	399.408.291,00	399.408.291,00	
2013	53.720.000,00	Apr-18	0,00	0,00	26.860.000,00	0,00	26.860.000,00	
2021	112.069.200,06	Juli 2021	0,00	11.206.920,01	0,00	0,00	11.206.920,01	
2023	49.545.600,00	Maret 2024	247.728,00	0,00	0,00	0,00	247.728,00	
Jml	6.088.073.882,11		247.728,00	11.206.920,01	1.084.157.970,03	3.758.143.142,00	4.853.755.760,03	

5.3.1.5.4 Aset Tak Berwujud

Rp21.937.218.508,00

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

ATB diakui bila memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dapat dikendalikan, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Termasuk dalam ATB yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah *software* komputer dan aplikasi komputer.

ATB diakui bila memenuhi kriteria:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan Aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Saldo Aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 terinci sebagai berikut:

Tabel 157
Aset Tak Berwujud Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1 Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.734.155.000,00	1.776.395.000,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	273.410.499,00	273.410.499,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	3.744.950.000,00	3.744.950.000,00
4 Rumah Sakit Jiwa	1.099.230.000,00	1.099.230.000,00
5 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	63.450.000,00	63.450.000,00
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	467.500.000,00	467.500.000,00
7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	137.364.700,00	137.364.700,00
8 Dinas Olah Raga dan Pemuda	1.004.950.000,00	1.004.950.000,00
9 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	422.750.000,00	422.750.000,00
10 Sekretariat Daerah	379.005.000,00	379.005.000,00
11 Biro Umum dan Protokol	198.736.000,00	0,00
12 Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.390.975.000,00	1.195.975.000,00
13 Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	155.100.000,00	155.100.000,00
14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	8.492.747.440,00	8.492.747.440,00
16 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	460.153.869,00	546.943.869,00
17 Badan Kepegawaian Daerah	478.500.000,00	478.500.000,00
18 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	245.000.000,00	245.000.000,00
19 Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	321.084.000,00	321.084.000,00
20 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	77.550.000,00	77.550.000,00
21 Inspektorat	390.607.000,00	310.607.000,00
Saldo Aset Tak Berwujud	21.937.218.508,00	21.592.512.508,00

Penambahan Aset tidak berwujud pada tahun 2023 senilai Rp473.736.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) OPD antara lain:

1. Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa senilai Rp195.000.000,00.
2. Biro Umum senilai Rp198.736.000,00.
3. Inspektorat senilai Rp80.000.000,00.

Pengurangan Aset tidak berwujud pada tahun 2023 senilai Rp129.030.000,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Lainnya yang terdapat pada 2 OPD antara lain:

1. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah senilai Rp42.240.000,00.
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah senilai Rp86.790.000,00.

Amortisasi Aset Tak Berwujud

(Rp20.137.081.125,00)

Akumulasi Amortisasi adalah amortisasi tahun sebelumnya ditambah dengan beban amortisasi tahun berjalan. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam Aset Tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak (Buletin Teknis SAP Nomor 17 Perhitungan Akumulasi Amortisasi tahun 2015 dilakukan untuk Aset Tak Berwujud).

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023 senilai negatif Rp20.137.081.125,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 158
Akumulasi Amortisasi Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan per 01 Januari 2023	Beban Penyusutan Tahun 2023	Reklasifikasi Akumulasi Amortisasi	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023
		<i>(Audited)</i>			<i>(Audited)</i>
1	Aset Tidak Berwujud	(18.888.944.037,00)	(1.364.510.213,00)	116.373.125,00	(20.137.081.125,00)
	Jumlah	(18.888.944.037,00)	(1.364.510.213,00)	116.373.125,00	(20.137.081.125,00)

Perhitungan amortisasi mulai tahun 2014 sampai saat ini disesuaikan dengan tanggal pencairan SP2D sebagai perhitungan umur pemakaian barang. Sedangkan perhitungan amortisasi barang sampai dengan 31 Desember 2023 menggunakan penyusutan pertahun dengan menggunakan metode garis lurus sesuai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dimana amortisasi Aset tak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Persentase amortisasi yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai amortisasi pertahun.

5.3.1.5.5 Aset Lain-Lain

Rp8.495.509.862.340,68

Aset Lain-lain terdiri dari kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Tetap yang Rusak, Aset Tetap yang Dihilangkan, dan Aset Lain-lain.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp8.495.509.862.340,68 dan sebesar Rp166.811.931.063,39 dirinci sebagai berikut:

Tabel 159
Aset Lain-lain Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KLASIFIKASI		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	141.160.648,00	365.328.808,47
2	Investasi non Permanen (TV Mandiri Papua)	36.395.781.663,00	0,00
3	Aset Tetap yang Rusak	55.958.438.946,00	59.678.088.596,00
4	Aset Tetap yang Dihilangkan	5.778.688.000,00	106.768.513.658,92
5	Aset Lain-lain	8.397.235.793.083,68	0,00
TOTAL ASET LAIN-LAIN		8.495.509.862.340,68	166.811.931.063,39

1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp141.160.648,00

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp141.160.648,00 dan Rp365.328.808,47. Saldo per 31 Desember 2023 merupakan subsidi bunga pinjaman untuk Usaha Kecil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja pada Rekening Bank Papua Nomor 1000126002481 yang belum digunakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp141.160.648,00.

2. Investasi Non Permanen (TV Mandiri Papua) Rp36.395.781.663,00

Investasi Non Permanen pada Pemerintah Provinsi Papua merupakan Pinjaman Jangka Panjang kepada PT TV Mandiri Papua. Pada awalnya sesuai akta notaris Habel Rumbiak nomor 3 tanggal 2 Mei 2007 pemegang saham adalah:

Mathias Resirius Refra	Rp 1.000.000,00
PT Bangun Tanah Papua	<u>Rp6.999.000.000,00</u>
Jumlah	Rp7.000.000.000,00

Sampai dengan 31 Desember 2014, belum ada realisasi setoran kas dari pemegang saham. Seluruh biaya operasional disediakan oleh Pemprov Papua dan dicatat oleh TV Mandiri Papua sebagai hutang penyertaan Pemda. Rincian Hutang Penyertaan Pemda adalah sebagai berikut:

Kas tunai tahun 2006-2009	Rp21.376.649.706,00
Aset Tetap	Rp17.871.269.380,00
Belanja yang langsung dibiayai Pemprov	<u>Rp15.019.131.957,00</u>
Jumlah	Rp54.267.051.043,00

Berdasarkan akta notaris Habel Rumbiak nomor 2 tanggal 2 November 2010 tentang RUPS, saham dialihkan ke Pemprov Papua. Berdasarkan akta notaris Puspo Adi Cahyono nomor 8 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa dimana Pemprov Papua mengubah struktur pengurus. Namun demikian, Peraturan Daerah tentang pembentukan dan penyertaan modal TV Mandiri Papua belum disahkan dan kondisi perusahaan sudah berhenti beroperasi, karyawan dihentikan, dan siap dilikuidasi. PT. Televisi Mandiri Papua pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai surat kepada Gubernur Papua nomor: 002/TVMP_DIR/I/2017 perihal penutupan siaran dan operasional kantor Papua TV menyatakan bahwa seluruh aset yang berada di gedung BPD lantai 6 akan diamankan oleh penanggungjawab operasional dan akan dikembalikan kepada Pemprov Papua. Oleh karena itu, dengan pertimbangan Perda tentang Penyertaan Modal belum ada, maka kontribusi Pemda berupa pemberian kas tunai dan pembiayaan operasional TV Mandiri Papua selama tahun 2006-2009 lebih tepat dikategorikan sebagai Pemberian Pinjaman Jangka Panjang. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pengakuan pada Laporan Keuangan PT TV Mandiri Papua per 31 Desember 2014 sebagai Hutang Penyertaan Modal Pemda. Dengan demikian, nilai Investasi Nonpermanen (Pinjaman Jangka Panjang) adalah:

Kas Tunai 2006 – 2009	Rp21.376.649.706,00
Belanja yang langsung dibiayai Pemprov	<u>Rp15.019.131.957,00</u>
Jumlah	Rp36.395.781.663,00

Nilai Aset Tetap yang dipinjamkan Pemda ke PT TV Mandiri Papua tidak dicatat sebagai bagian Pinjaman Jangka Panjang karena masih tercatat di Neraca Provinsi Papua dan belum ada berita acara serah terima Aset dari Pemprov Papua kepada PT TV Mandiri Papua.

Pada tahun 2023 investasi non permanen TV Mandiri Papua direklasifikasi ke Aset Lain-lain berdasarkan surat Gubernur Papua Nomor 800/5949/SET, yaitu karena investasi non permanen tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan, PT TV Mandiri Papua sudah tidak

beroperasi dan sudah dalam pembahasan status pailit.

3. Aset Tetap yang Rusak Rp55.958.438.946,00

Aset Tetap yang Rusak merupakan Aset Tetap yang sudah dihentikan penggunaannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Aset Tetap yang Rusak Berat sebelum penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 160
Aset Tetap yang Rusak Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KLASIFIKASI		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Peralatan dan mesin	35.752.095.496,00	37.509.411.146,00
2	Bangunan/Gedung	19.179.735.300,00	21.142.069.300,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	326.608.150,00	326.608.150,00
4	Aset tetap lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00
Total Aset Tetap yang Rusak		55.958.438.946,00	59.678.088.596,00

4. Aset Tetap yang Dihilangkan Rp5.778.688.000,00

Aset Tetap yang Dihilangkan merupakan Aset Tetap yang diserahkan kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Provinsi Papua sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Aset Tetap yang Dihilangkan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 161
Aset Tetap yang Dihilangkan Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KLASIFIKASI		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Aset Tetap yang dihibahkan pada tahun 2015	392.150.000,00	392.150.000,00
2	Aset yang di Hibahkan pada Tahun 2017	5.386.538.000,00	5.386.538.000,00
3	Aset yang di Hibahkan pada Tahun 2022	0,00	100.989.825.658,92
Total Aset Tetap yang Dihilangkan		5.778.688.000,00	106.768.513.658,92

Saldo Aset Tetap yang Dihilangkan pada Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp5.778.688.000,00 yang terdiri dari:

1. Aset Gedung/Bangunan ex Biro Pemerintahan Kampung (dihilangkan tahun 2017) yang tercatat pada Sekretaris Daerah senilai Rp5.386.538.000,00.
2. Aset Tetap jalan, irigasi dan Jaringan dari Dinas Pekerjaan Umum dihibahkan tahun 2015 senilai Rp392.150.000,00.

5. Aset Lainnya Rp8.397.235.793.083,68

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.397.235.793.083,68 dan sebesar Rp0,00 merupakan Aset yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, serta PP nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 162
Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KLASIFIKASI		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	Kas BOS SMA, SMK, SLB Negeri	1.981.199.605,00	0,00
2	Piutang Pendapatan	934.795.400,00	0,00
3	Persediaan	262.302.897.704,75	0,00
4	Aset Tetap	7.657.273.128.359,31	0,00
5	Konstruksi dalam Pengerjaan	471.988.494.014,62	0,00
6	Aset Tidak Berwujud	129.030.000,00	0,00
7	Aset Rusak	2.626.248.000,00	0,00
Saldo Aset Lain-Lain		8.397.235.793.083,68	0,00

Kas BOS SMA, SMK, SLB Negeri merupakan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 Satdiknas Negeri dan Satdiksus Negeri yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru dan yang akan diserahkan ke Kabupaten dan Kota Provinsi Papua. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Piutang Pendapatan merupakan Saldo Piutang PKB senilai Rp879.817.500,00 dan Saldo Piutang BBKB Senilai Rp54.977.900,00 yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 163
Piutang Pendapatan Daerah Otonomi Baru
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	KABUPATEN						TOTAL
		BOVEN DIGOEL	MAPPI	MERAUKE	NABIRE	TIMIKA	WAMENA	
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	1.747.400,00	1.666.400,00	237.630.900,00	176.479.200,00	456.932.900,00	5.360.700,00	879.817.500,00
	PIUTANG SKP 2013	0,00	511.400,00	118.339.500,00	22.447.800,00	350.573.900,00	0,00	491.872.600,00
	PIUTANG SKP 2014	0,00	0,00	39.589.800,00	15.603.000,00	14.210.000,00	1.670.700,00	71.073.500,00
	PIUTANG SKP 2015	1.747.400,00	1.155.000,00	26.919.900,00	36.928.900,00	0,00	0,00	66.751.200,00
	PIUTANG SKP 2016	0,00	0,00	29.037.700,00	46.811.500,00	0,00	0,00	75.849.200,00
	PIUTANG SKP 2017	0,00	0,00	8.754.000,00	2.778.000,00	0,00	0,00	11.532.000,00
	PIUTANG SKP 2018	0,00	0,00	7.622.000,00	51.110.000,00	32.982.000,00	3.690.000,00	95.404.000,00
	PIUTANG SKP 2019	0,00	0,00	7.368.000,00	0,00	48.964.000,00	0,00	56.332.000,00
	PIUTANG SKP 2021	0,00	0,00	0,00	800.000,00	10.203.000,00	0,00	11.003.000,00
2	PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	0,00	0,00	3.568.400,00	4.511.400,00	46.898.100,00	0,00	54.977.900,00
	PIUTANG SKP 2013	0,00	0,00	3.459.400,00	3.830.300,00	46.898.100,00	0,00	54.187.800,00
	PIUTANG SKP 2015	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
	PIUTANG SKP 2016	0,00	0,00	0,00	681.100,00	0,00	0,00	681.100,00
TOTAL KESELURUHAN								934.795.400,00

Persediaan senilai Rp262.302.897.704,75 merupakan persediaan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Perhubungan yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru. Rincian Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Aset Tetap, Kontruksi dalam Pengerjaan, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Tetap dalam Kondisi Rusak merupakan Aset yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru dan yang akan diserahkan ke Kabupaten dan Kota Provinsi Papua dapat dilihat pada **Lampiran 13 dan Lampiran 14**.

5.3.1.5.5.1 Akumulasi Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan Aset Lain-Lain (Rp4.571.652.475.966,90)

Akumulasi Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan Aset Lain-Lain terdiri dari dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihilangkan, Amortisasi Aset Tetap Tidak Berwujud, Akumulasi Penyisihan Piutang Pendapatan.

Akumulasi Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar negatif Rp4.571.652.475.966,90 dan sebesar negatif Rp58.175.223.222,03 dirinci

sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak Pemerintah (Rp52.677.456.030,00)
Provinsi Papua

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Rusak Berat per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 164
 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak Pemerintah Provinsi Papua
 per 31 Desember 202

(dalam Rupiah)

	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku 31 Desember 2023
			31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	
1	Peralatan dan mesin	35.752.095.496,00	(37.509.411.146,00)	(34.586.321.996,00)	1.165.773.500,00
2	Bangunan/Gedung	19.179.735.300,00	(18.710.570.384,00)	(17.064.525.884,00)	2.115.209.416,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	326.608.150,00	(326.608.150,00)	(326.608.150,00)	0,00
4	Aset tetap lainnya	700.000.000,00	(700.000.000,00)	(700.000.000,00)	0,00
	Total	55.958.438.946,00	(57.246.589.680,00)	(52.677.456.030,00)	3.280.982.916,00

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang D hibahkan (Rp928.633.542,03)

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Tetap Yang D hibahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 165
 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang D hibahkan Pemerintah Provinsi Papua
 per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku 31 Desember 2023
			31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	
1	Aset Tetap yang dihibahkan pada tahun 2015				
	- Aset tetap jalan, irigasi dan Jaringan	392.150.000,00	(34.709.480,22)	(34.709.480,22)	357.440.519,78
2	Aset yang di Hibahkan pada Tahun 2017				
	- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.386.538.000,00	(893.924.061,81)	(893.924.061,81)	4.492.613.938,19
	Jumlah (1) + (2)	5.778.688.000,00	(928.633.542,03)	(928.633.542,03)	4.850.054.457,97

3. Akumulasi, Amortisasi, dan Penyisihan Aset Lainnya (Rp4.518.046.386.394,87)

Akumulasi, Amortisasi, dan Penyisihan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai negatif Rp4.518.046.386.394,87 dapat dirincikan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Pendapatan yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru senilai negatif Rp849.024.700,00;

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru senilai negatif Rp4.514.454.740.569,87;

Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru senilai negatif Rp116.373.125,00; dan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak yang akan diserahkan ke Daerah Otonomi Baru senilai negatif Rp2.626.248.000,00.

5.3.1.5.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Rp67.496.568.000,00

Treasury Deposit Facility ialah Fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Transfer Treasury Deposit Facility pada tahun 2023 sesuai surat berdasarkan surat No. S-137/KPN.3401/2024 tentang Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF TA 2023 adalah senilai Rp67.496.568.000,00.

5.3.2 KEWAJIBAN

Rp65.316.936.191,78

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 166
Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KLASIFIKASI		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	65.316.936.191,78	149.638.006.751,25
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		65.316.936.191,78	149.638.006.751,25

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Rp65.316.936.191,78

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 terdiri dari Utang PFK, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp1.161.996.518,00

Utang PFK mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Utang perhitungan kepada pihak ketiga merupakan penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa potongan Iuran Wajib Pegawai, Taperum, Askes, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Beras.

Utang PFK merupakan utang perhitungan kepada pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayarkan kepada pihak ketiga berupa pajak dan pungutan lainnya yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran OPD. Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 167
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian		PPh Ps. 21	PPh Ps. 22	PPh Ps. 23	PPN	PFK 2023 <i>Audited</i>	PFK 2022 <i>Audited</i>
1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)	571.928.462,00				571.928.462,00	0,00
3	Rumah Sakit Jiwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581.600,00
4	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.886.126,00
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	424.978.000,00	5.353.405,00	64.076.009,00	95.660.642,00	590.068.056,00	0,00
Total		996.906.462,00	5.353.405,00	64.076.009,00	95.660.642,00	1.161.996.518,00	32.467.726,00

5.3.2.1.2 Utang Belanja

Rp15.526.322.339,78

Saldo utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 yang merupakan utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa dan Utang Pengadaan Aset Tetap yang sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2023 belum terbayarkan dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.2.1.2.1 Utang Belanja Pegawai Rp1.937.764.160,00

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2023 senilai Rp1.937.764.160,00 merupakan hutang Tunjangan Beras ASN sesuai surat pelaksanaan Rekonsiliasi Bulog Nomor B-14/26040/KU.6/01/2024.

5.3.2.1.2.2 Utang Belanja Barang dan Jasa Rp13.477.603.441,78

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.477.603.441,78 dan sebesar Rp35.463.547.430,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 168
Utang Belanja Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	TAHUN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
			(Audited)	(Audited)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA		10.720.386.530,78	10.720.386.530,78
	- Utang Otsus/KPS TA 2017	2017	2.568.285.021,28	2.568.285.021,28
	- Utang APBD TA 2017	2017	3.109.989.770,90	3.109.989.770,90
	- Utang Obat BPJS TA 2018	2018	2.543.319.818,60	2.543.319.818,60
	- Utang Belanja Barang & Jasa RSUD s.d.TA 2019	2019	2.487.856.600,00	2.487.856.600,00
	- Penambahan Utang Belanja Barang & Jasa TA RSUD TA 2020	2020	10.935.320,00	10.935.320,00
2	RUMAH SAKIT JIWA		957.496.640,00	0,00
	- Paket Pekerjaan Gedung Bangsal Tahun 2019	2023	522.743.640,00	0,00
	- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bangsal Administrasi Tahun 2019	2023	434.753.000,00	0,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA (BLUD)		1.265.623.271,00	0,00
	- Paket Pekerjaan Pengadaan Reagen Laboratorium TA 2021	2023	727.057.057,00	0,00
	- Paket Pengadaan Alat Medis Habis Pakai (AMHP)/implat yang dilaksanakan tahun 2021, 2022 dan 2023	2023	508.566.214,00	0,00
	- Pekerjaan pengadaan perencanaan rehabilitas poli vct, bedah dan paru menjadi IGD dan ruang informasi BLUD RSUD Abepura	2023	30.000.000,00	0,00
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		333.991.000,00	0,00
	- Pekerjaan pengadaan pupuk organik di Kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom	2023	59.496.000,00	0,00
	- Pekerjaan pengadaan bibit babi betina di Kabupaten Jayapura	2023	157.936.000,00	0,00
	- pekerjaan penyediaan APK untuk pengembangan kako di Kabupaten Jayapura	2023	11.988.000,00	0,00
	- Pekerjaan pengadaan pupuk organik untuk pengembangan kako di Kabupaten Jayapura	2023	59.607.000,00	0,00
	- Pekerjaan penyediaan pupuk NPK untuk pengembangan kako di Kabupaten Jayapura	2023	35.964.000,00	0,00
	- Pekerjaan pengawasan pembangunan rumah oroduksi sagu di kabupaten supiori	2023	9.000.000,00	0,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		0,00	24.543.054.900,00
	- Iuran Jaminan/Asuransi- Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI	2022	0,00	24.543.054.900,00
6	BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS		200.106.000,00	200.106.000,00
	- Utang Pengadaan Inventaris Biro Tata Pemerintahan	2020	200.106.000,00	200.106.000,00
TOTAL UTANG BELANJA			13.477.603.441,78	35.463.547.430,78

5.3.2.1.2.3 Utang Pengadaan Aset Tetap Rp110.954.738,00

Utang pengadaan Aset Tetap merupakan utang yang terjadi karena belum dilakukannya pembayaran atas pekerjaan dimana dokumen tagihan pihak ke tiga telah diberikan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) telah diterbitkan dan Surat Perintah Membayar (SPM) telah diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun 2023.

Saldo utang pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2023 merupakan Hutang Manajemen Kontruksi Pembangunan Lapangan Tennis Kota Jayapura TA 2020 Pada Dinas Olahraga dan Pemuda senilai Rp110.954.738,00.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp48.628.617.334,00

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp48.654.476.575,50 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp114.031.036.856,47 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Utang Kekurangan Transfer Dana Bagi Hasil Rp48.628.617.334,00

Utang Kekurangan Transfer Dana Bagi Hasil merupakan utang yang timbul akibat penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Provinsi Papua yang tidak sejalan dengan realisasi penerimaan pajak di tahun 2023 sesuai Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/89/Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Alokasi Lebih/Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 169
Utang Kekurangan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Audited)	(Audited)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	3.275.192.903,00	19.090.799.128,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.048.549.682,00	11.324.958.962,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.157.557.684,00	30.101.715.432,00
4	Pajak Air Permukaan	100.290.978,00	20.326.461.940,00
5	Pajak Rokok	31.047.026.087,00	33.047.984.729,00
Saldo Utang Kurang Salur		48.628.617.334,00	113.891.920.191,00

Rincian Utang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Papua yang berasal dari sisa Utang Transfer Dana Bagi Hasil Tahun 2023. Adapun rincian jumlah kekurangan salur pada Kab/Kota sebagai berikut:

Tabel 170
Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua yang Kurang Salur
per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	PKB	BBN KB	PAP	PBB-KB	Rokok
1 KOTA JAYAPURA	1.143.108.383,00	82.584.076,00	3.151.959,00	1.058.299.952,00	9.150.612.365,00
2 KAB. BIAK NUMFOR	233.793.031,00	82.584.076,00	794.289,00	3.050.129.554,00	4.185.681.167,00
3 KAB. YAPEN	215.411.521,00	82.584.076,00	(3.674.502,00)	2.905.537.842,00	3.291.391.160,00
4 KAB. JAYAPURA	575.850.901,00	206.250.680,00	90.878.024,00	2.684.174.986,00	4.388.572.253,00
5 KAB. SARMI	188.135.461,00	82.584.076,00	(199.389,00)	434.058.197,00	1.835.443.169,00
6 KAB. KEEROM	426.818.101,00	264.210.470,00	(115.280,00)	1.243.617.622,00	2.238.953.769,00
7 KAB. WAROPEN	181.359.601,00	82.584.076,00	3.151.959,00	467.572.602,00	2.235.726.207,00
8 KAB. SUPIORI	155.357.952,00	82.584.076,00	3.151.959,00	503.451.830,00	1.970.601.425,00
9 KAB. MAMBERAMO RAYA	155.357.952,00	82.584.076,00	3.151.959,00	810.715.099,00	1.750.044.572,00
TOTAL	3.275.192.903,00	1.048.549.682,00	100.290.978,00	13.157.557.684,00	31.047.026.087,00

2. Utang Beban Transfer Beasiswa Rp0,00

Utang Beban Transfer Beasiswa Siswa Unggul Papua merupakan dana beasiswa pada rekening Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua pada Bank Mandiri Nomor 1540058802020 yang belum disalurkan per 31 Desember 2023. Pada tahun 2023 keseluruhan Dana Beasiswa telah disalurkan dan terdapat sisa dana pada rekening senilai Rp25.859.241,50 yang merupakan Jasa Giro bulan desember 2023. Atas jasa giro tersebut telah dicatat sebagai Piutang Jasa Giro dan telah disetorkan pada bulan Januari 2024.

5.3.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rp0,00

Tidak terdapat Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Papua baik per 31 Desember 2023 maupun per 31 Desember 2022.

5.3.3 EKUITAS Rp22.193.619.744.422,10

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.193.619.744.422,10 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.462.462.667.753,60.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 **PENDAPATAN-LO** **Rp3.728.123.362.600,58**

Pendapatan adalah hak Pemerintah Provinsi Papua yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 171
Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	817.179.800.193,58	2.250.543.963.322,44	(1.433.364.163.128,86)	(63,69)
2 PENDAPATAN TRANSFER-LO	2.392.506.197.478,00	8.935.090.971.270,00	(6.542.584.773.792,00)	(73,22)
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	518.437.364.929,00	4.467.066.197,00	513.970.298.732,00	11.505,77
JUMLAH PENDAPATAN – LO	3.728.123.362.600,58	11.190.102.000.789,40	(7.461.978.638.188,82)	(66,68)

Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 adalah sebesar Rp3.728.123.362.600,58 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar 817.179.800.193,58, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.392.506.197.478,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp518.437.364.929,00.

Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.461.978.638.188,82 atau (66,68%) dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp2.250.543.963.322,44 turun sebesar Rp1.433.364.163.128,86 atau (63,69%) menjadi sebesar Rp817.179.800.193,58 pada TA 2023.
2. Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp8.935.090.971.270,00 pada TA 2023 turun sebesar Rp6.542.584.773.792,00 atau (73,22%) menjadi sebesar Rp2.392.506.197.478,00.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2023 sebesar Rp518.437.364.929,00. Bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp4.467.066.197,00 maka Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp513.970.298.732,00 atau 11.505,77 %.

Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO**Rp817.179.800.193,58**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah Pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Papua, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua menggambarkan perbandingan antara Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2023 sebesar Rp817.179.800.193,58 mengalami penurunan sebesar Rp1.433.364.163.128,86 atau (63,69%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.250.543.963.322,44.

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp817.179.800.193,58 dan sebesar Rp2.250.543.963.322,44 dirinci sebagai berikut:

Tabel 172
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Pendapatan Pajak Daerah-LO	518.639.194.099,00	1.235.457.459.765,00	(716.818.265.666,00)	(58,02)
2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	19.765.960.766,00	17.713.806.139,00	2.052.154.627,00	11,59
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	55.386.065.084,00	724.226.605.890,00	(668.840.540.806,00)	(92,35)
4 Lain-lain PAD yang Sah-LO	223.388.580.244,58	273.146.091.528,44	(49.757.511.283,86)	(18,22)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	817.179.800.193,58	2.250.543.963.322,44	(1.433.364.163.128,86)	(63,69)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.433.364.163.128,86 atau (63,69%). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp1.235.457.459.765,00 pada TA 2023 turun sebesar Rp716.818.265.666,00 atau (58,02%) menjadi sebesar Rp518.639.194.099,00.
2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp17.713.806.139,00 naik sebesar Rp2.052.154.627,00 atau 11,59% pada TA 2023 menjadi sebesar Rp19.765.960.766,00.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp724.226.605.890,00 pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp668.840.540.806,00 atau (92,35%) menjadi sebesar Rp55.386.065.084,00.
4. Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp273.146.091.528,44 turun sebesar Rp49.757.511.283,86 atau (18,22%) pada TA 2023 menjadi sebesar Rp223.388.580.244,58.

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2023 yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah-LO**Rp518.639.194.099,00**

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang pungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Laporan Operasional disajikan dalam basis akrual, dikarenakan pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 173
Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	136.097.678.000,00	267.959.735.356,00	(131.862.057.356,00)	(49,21)
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	68.867.332.000,00	150.797.322.000,00	(81.929.990.000,00)	(54,33)

	(BBNKB)-LO				
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	138.233.071.480,00	254.146.270.400,00	(115.913.198.920,00)	(45,61)
4	Pajak Air Permukaan-LO	1.042.671.310,00	225.605.474.573,00	(224.562.803.263,00)	(99,54)
5	Pajak Rokok-LO	174.398.441.309,00	336.948.657.436,00	(162.550.216.127,00)	(48,24)
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO	518.639.194.099,00	1.235.457.459.765,00	(716.818.265.666,00)	(58,02)

Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp518.639.194.099,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.235.457.459.765,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp716.818.265.666,00 atau (58,02%). Penurunan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan pendapatan Pajak Rokok-LO sebagai akibat pembentukan 3 (Tiga) provinsi baru di Papua yaitu: (1) UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; (2) UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan (3) UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua.
2. Penurunan realisasi penerimaan Pajak Rokok-LO karena sudah merupakan Pengeluaran Non Anggaran Pajak Rokok yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp174.398.441.309,00.

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1.2 **Pendapatan Retribusi Daerah-LO** **Rp19.765.960.766,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pendapatan retribusi dipungut dan dikelola oleh OPD pengelola retribusi dengan segala pungutan yang tarifnya ditetapkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang retribusi daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 174
Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
A.	Retribusi Jasa Umum-LO	15.675.743.366,00	11.916.811.639,00	3.758.931.727,00	31,54
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	6.466.623.366,00	5.823.271.639,00	643.351.727,00	11,05
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	9.209.120.000,00	6.093.540.000,00	3.115.580.000,00	51,13
B.	Retribusi Jasa Usaha-LO	3.503.757.400,00	3.857.174.100,00	(353.416.700,00)	(9,16)
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.127.067.700,00	3.328.096.600,00	(201.028.900,00)	(6,04)
4	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	258.000.000,00	(258.000.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	193.893.700,00	154.000.000,00	39.893.700,00	25,91
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	14.686.000,00	11.775.000,00	2.911.000,00	24,72
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	168.110.000,00	105.302.500,00	62.807.500,00	59,64
C.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	586.460.000,00	1.939.820.400,00	(1.353.360.400,00)	(69,77)
8	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	17.500.000,00	3.250.000,00	14.250.000,00	438,46
9	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	21.460.000,00	1.453.070.400,00	(1.431.610.400,00)	(98,52)
10	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	547.500.000,00	483.500.000,00	64.000.000,00	13,24
11	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO	19.765.960.766,00	17.713.806.139,00	2.052.154.627,00	11,59

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp19.765.960.766,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp17.713.806.139,00, maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.052.154.627,00 atau 11,59%.

Penurunan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai akibat pembentukan 3 (Tiga) provinsi baru di Papua yaitu: (1) UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; (2) UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan (3) UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua.
2. Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu-LO mengalami penurunan sebesar Rp1.353.360.400,00 atau (69,77%) dibandingkan dengan penurunan Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp353.416.700,00 atau (9,16%) dan kenaikan Retribusi Jasa Umum-LO sebesar Rp3.758.931.727,00.

Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a.	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	Rp 17.180.906.474,00
b.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	<u>Rp 19.765.960.766,00</u>
	Selisih (a - b)	Rp (2.585.054.292,00)
Penjelasan selisih:		
a.	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	Rp 17.180.906.474,00
	<i>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</i>	Rp 2.585.054.292,00
-	Pengakuan Piutang Retribusi	Rp 42.660.425,00
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO - Penggunaan langsung pendapatan di RSJ Abepura	Rp 672.636.900,00
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO - piutang pendapatan BLUD TA 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura BLUD	Rp 1.444.708.090,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - piutang retribusi Dinas Pariwisata	Rp 7.338.000,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah - piutang retribusi pelayanan kesehatan pada RSJ Abepura	Rp 417.710.877,00
b.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Rp 19.765.960.766,00

5.4.1.1.3 **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO** **Rp55.386.065.084,00**

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan asli daerah dari laba atas penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Papua pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 175
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	724.223.405.759,00	(724.223.405.759,00)	(100,00)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	55.386.065.084,00	3.200.131,00	55.382.864.953,00	1.730.643,68
Jumlah Pendapatan Bagian Laba BUMD-LO		55.386.065.084,00	724.226.605.890,00	(668.840.540.806,00)	(92,35)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 sebesar Rp55.386.065.084,00 bila dibandingkan dengan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 sebesar Rp724.226.605.890,00, maka Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp668.840.540.806,00 atau (92,35%).

Selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	Rp 45.177.723.145,00
b.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	<u>Rp 55.386.065.084,00</u>
	Selisih (a - b)	Rp (10.208.341.939,00)
Penjelasan selisih:		
a.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	Rp 45.177.723.145,00
	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	Rp 55.382.500.244,00
-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - Pengakuan Piutang Deviden Bank Papua 2023	Rp 55.382.500.244,00
	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	Rp 45.174.158.305,00
-	Penyesuaian atas Laba dan penerimaan deviden Bank Papua 2022	Rp 44.814.158.305,00
-	Penyesuaian atas Penerimaan Deviden PT Jamkrida	Rp 360.000.000,00
b.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Rp 55.386.065.084,00

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Rp223.388.580.244,58

Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah pendapatan asli daerah diluar dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 176
Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	114.535.345,00	12.172.800,00	102.362.545,00	840,91
2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	637.440,00	23.243.600,00	(22.606.160,00)	(97,26)
3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	865.999.000,00	5.262.000,00	860.737.000,00	16.357,60
4 Hasil Kerja Sama Daerah-LO	35.188.288.288,00	0,00	35.188.288.288,00	0,00
5 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	1.519.387,00	(1.519.387,00)	(100,00)
6 Jasa Giro-LO	47.765.745.300,45	83.632.054.539,35	(35.866.309.238,90)	(42,89)
7 Pendapatan Bunga-LO	680.380.613,18	477.409.334,70	202.971.278,48	42,52
8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	7.234.925.519,10	3.857.925.933,24	3.376.999.585,86	87,53
9 Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.352.625.242,00	2.462.243.375,00	(109.618.133,00)	(4,45)
10 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	3.215.440.126,04	(3.215.440.126,04)	(100,00)
11 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	8.198.038.600,00	13.785.143.400,00	(5.587.104.800,00)	(40,53)
12 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	145.000,00	869.000,00	(724.000,00)	(83,31)
13 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	112.600.000,00	0,00	112.600.000,00	0,00
14 Pendapatan dari Pengembalian-LO	401.071.804,00	210.264.030,00	190.807.774,00	90,75
15 Pendapatan dari BLUD-LO	113.801.868.618,85	116.446.226.412,45	(2.644.357.793,60)	(2,27)
16 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) -LO	3.617.828.400,00	36.725.664.326,00	(33.107.835.926,00)	(90,15)
17 Remunerasi-LO	3.053.891.074,00	0,00	3.053.891.074,00	0,00
18 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	12.290.653.264,66	(12.290.653.264,66)	(100,00)
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah-LO	223.388.580.244,58	273.146.091.528,44	(49.757.511.283,86)	(18,22)

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp273.146.091.528,44 pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp49.757.511.283,86 atau (18,22%) menjadi sebesar Rp223.388.580.244,58.

Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a.	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA	Rp 189.915.867.254,09
b.	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	<u>Rp 223.388.580.244,58</u>
	Selisih (a - b)	Rp (33.472.712.990,49)
Penjelasan selisih:		
a.	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA	Rp 189.915.867.254,09
	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	Rp 49.299.732.137,49
-	Jasa Giro Dana Cadangan	Rp 30.476.223.919,81
-	Hasil Sewa BMD - Piutang Lain-lain PAD	Rp 769.200.000,00
-	Jasa Giro pada Kas Daerah - Piutang Jasa Giro pada BPSDM	Rp 25.859.241,50
-	Piutang BLUD	Rp 17.348.128.363,00

- Piutang Deposito Dana Cadangan	Rp 680.320.613,18
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	Rp 15.827.019.147,00
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Rp 125.358.892,00
- Penerimaan Piutang tagihan Kerugian	Rp 15.701.660.255,00
b. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	Rp 223.388.580.244,58

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO Rp2.392.506.197.478,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Pemerintah Provinsi Papua dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 177
Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.341.307.539.478,00	5.130.949.917.270,00	(3.789.642.377.792,00)	(73,86)
2 Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	1.051.198.658.000,00	3.804.141.054.000,00	(2.752.942.396.000,00)	(72,37)
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	2.392.506.197.478,00	8.935.090.971.270,00	(6.542.584.773.792,00)	(73,22)

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp2.392.506.197.478,00 dan TA 2022 sebesar Rp8.935.090.971.270,00. Hal ini berarti terjadi penurunan Pendapatan Transfer-LO pada TA 2023 sebesar Rp6.542.584.773.792,00 atau (73,22%).

Penurunan realisasi Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan 3 (Tiga) provinsi baru di Papua yaitu: (1) UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; (2) UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan (3) UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua.
2. Alokasi anggaran Transfer Pusat ke Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Transfer-LO kepada Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Rp1.341.307.539.478,00

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp1.341.307.539.478,00 dan TA 2022 sebesar Rp5.130.949.917.270,00 yang dirinci sebagai berikut:

Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 178
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Dana Bagi Hasil Pajak	138.984.644.000,00	518.004.139.902,00	(379.019.495.902,00)	(73,17)
2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	174.365.419.000,00	1.420.935.343.899,00	(1.246.569.924.899,00)	(87,73)
3 Dana Alokasi Umum	823.921.492.505,00	2.441.016.270.883,00	(1.617.094.778.378,00)	(66,25)
4 Dana Alokasi Khusus	204.035.983.973,00	750.994.162.586,00	(546.958.178.613,00)	(72,83)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO	1.341.307.539.478,00	5.130.949.917.270,00	(3.789.642.377.792,00)	(73,86)

Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan-LO pada TA 2023 sebesar Rp1.341.307.539.478,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.789.642.377.792,00 atau (73,86%) dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan-LO pada TA 2022 sebesar Rp5.130.949.917.270,00.

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO **Rp138.984.644.000,00**

Dana bagi hasil pajak adalah dana yang bersumber dari hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO pada TA 2023 sebesar Rp138.984.644.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp379.019.495.902,00 atau (73,17%) dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO pada TA 2022 sebesar Rp518.004.139.902,00.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Provinsi Papua TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 179
Transfer Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
1	DBH PBB-LO	95.789.193.000,00	296.070.247.437,00	(200.281.054.437,00)	(67,65)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	42.485.274.000,00	217.160.682.325,00	(174.675.408.325,00)	(80,44)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	710.177.000,00	4.773.210.140,00	(4.063.033.140,00)	(85,12)
Jumlah Transfer DBH Pajak-LO		138.984.644.000,00	518.004.139.902,00	(379.019.495.902,00)	(73,17)

5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam **Rp174.365.419.000,00**

Dana bagi hasil sumber daya alam adalah dana yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Papua dari sumber daya alam.

Pendapatan Transfer DBH Bukan Pajak/SDA-LO pada TA 2023 sebesar Rp174.365.419.000,00 dan 2022 sebesar Rp1.420.935.343.899,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.246.569.924.899,00 atau (87,73%).

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp174.365.419.000,00 dan 2022 sebesar Rp1.420.935.343.899,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 180
Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
1	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	658.379.000,00	5.764.213.458,00	(5.105.834.458,00)	(88,58)
2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	156.370.520.000,00	SDA	(1.187.084.457.333,00)	(88,36)
3	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	5.688.929.000,00	11.000.988.794,00	(5.312.059.794,00)	(48,29)
4	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	561.017.000,00	0,00	561.017.000,00	0,00
5	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	11.086.574.000,00	60.715.164.314,00	(49.628.590.314,00)	(81,74)
Jumlah Transfer DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO		174.365.419.000,00	1.420.935.343.899,00	(1.246.569.924.899,00)	(87,73)

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum **Rp823.921.492.505,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka desentralisasi.

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp823.921.492.505,00 atau turun sebesar Rp1.617.094.778.378,00 atau (66,25%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp2.441.016.270.883,00.

Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2023 untuk Provinsi Papua berdasarkan Perpres Nomor 130 TA 2022 terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya Pagu Rp673.096.641.000,00 terealisasi sebesar Rp672.781.825.505,00 atau 99,95%
2. Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK Pagu Rp5.438.497.000,00 terealisasi sebesar Rp5.438.497.000,00 atau 100%;
3. Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan Pagu Rp35.570.177.000,00 terealisasi sebesar Rp35.570.177.000,00 atau 100%;
4. Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan Pagu sebesar Rp51.648.208.000,00 terealisasi sebesar Rp51.648.208.000,00 atau 100%; dan
5. Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum Pagu Rp58.482.785.000,00 yang terealisasi sebesar Rp58.482.785.000,00 atau 100%.

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO Rp204.035.983.973,00

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dengan bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp204.035.983.973,00 terdiri dari: (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler-LO sebesar Rp131.220.496.066,00; (2) Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan-LO sebesar Rp46.815.966.570,00; dan (3) Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO sebesar Rp25.999.521.337,00.

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus-LO Provinsi Papua TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 181
Transfer Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
A. Dana Alokasi Khusus Reguler-LO	131.220.496.066,00	253.541.999.921,00	(122.321.503.855,00)	(48,25)
1 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	0,00	68.938.212.274,00	(68.938.212.274,00)	(100,00)
2 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan-LO	0,00	111.017.325.688,00	(111.017.325.688,00)	(100,00)
3 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	5.640.016.504,00	14.084.195.171,00	(8.444.178.667,00)	(59,95)
4 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	118.262.168.107,00	11.147.132.361,00	107.115.035.746,00	960,92
5 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	0,00	32.348.223.702,00	(32.348.223.702,00)	(100,00)
6 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	7.318.311.455,00	16.006.910.725,00	(8.688.599.270,00)	(54,28)
B. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan-LO	46.815.966.570,00	113.292.632.200,00	(66.476.665.630,00)	(58,68)
1 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	40.418.660.457,00	69.157.399.505,00	(28.738.739.048,00)	(41,56)
2 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	12.113.666.330,00	(12.113.666.330,00)	(100,00)
3 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	5.397.306.113,00	24.462.784.698,00	(19.065.478.585,00)	(77,94)
4 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	1.000.000.000,00	7.558.781.667,00	(6.558.781.667,00)	(86,77)
C. Dana Alokasi Khusus Nonfisik-LO	25.999.521.337,00	384.159.530.465,00	(358.160.009.128,00)	(93,23)
1 DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	6.326.872.750,00	252.771.442.987,00	(246.444.570.237,00)	(97,50)
2 DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	1.353.831.700,00	112.027.235.580,00	(110.673.403.880,00)	(98,79)
3 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	6.939.000.000,00	(6.939.000.000,00)	(100,00)
4 DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	0,00	5.886.524.896,00	(5.886.524.896,00)	(100,00)
5 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	1.710.900.000,00	1.338.834.500,00	372.065.500,00	27,79
6 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	13.971.162.991,00	3.669.227.539,00	10.301.935.452,00	280,77
7 DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	1.690.266.016,00	788.311.963,00	901.954.053,00	114,42
8 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	571.700.000,00	437.153.000,00	134.547.000,00	30,78
9 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	374.787.880,00	301.800.000,00	72.987.880,00	24,18
Jumlah Transfer Dana Alokasi Khusus-LO	204.035.983.973,00	750.994.162.586,00	(546.958.178.613,00)	(72,83)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus-LO pada TA 2023 sebesar Rp204.035.983.973,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp750.994.162.586,00, maka Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus-LO pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp546.958.178.613,00 atau (72,83%)

5.4.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LO Rp1.051.198.658.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah dana transfer yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp1.051.198.658.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp3.804.141.054.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 182
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Dana Otonomi Khusus	1.051.198.658.000,00	3.792.655.366.000,00	(2.741.456.708.000,00)	(72,28)
2 Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Dana Insentif Daerah	0,00	11.485.688.000,00	(11.485.688.000,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya-LO	1.051.198.658.000,00	3.804.141.054.000,00	(2.752.942.396.000,00)	(72,37)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO TA 2023 sebesar Rp1.051.198.658.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.752.942.396.000,00 atau (72,37%) dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO 2022 sebesar Rp3.804.141.054.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO TA 2023 terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah lainnya dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus Rp1.051.198.658.000,00

Dana Otonomi Khusus adalah Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Khusus pada Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kemudian disusul dengan Tiga undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua yaitu: (1) UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; (2) UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan (3) UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua.

Dengan demikian, penerimaan Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 semakin berkurang atau sedikit. Dimana Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp1.051.198.658.000,00, sedangkan pada TA 2022 sebesar Rp3.792.655.366.000,00 dan pada TA 2021 sebesar Rp7.911.837.607.000,00.

Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 terdiri dari:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp470.837.581.000,00;
2. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp580.361.077.000,00.

5.4.1.2.2.2 Dana Penyesuaian Rp0,00

Pendapatan Dana Penyesuaian Pemerintah Provinsi Papua baik pada TA 2023 maupun 2022 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi atau NIHIL.

5.4.1.2.2.3 Dana Insentif Daerah Rp0,00

Dana Insentif Daerah adalah pendapatan berupa uang yang berasal dari pemerintah pusat karena memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 tidak mendapat Dana Insentif Daerah atau NIHIL dan pada TA 2022 menerima Dana Insentif Daerah sebesar Rp11.485.688.000,00.

Selisih antara Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a.	Pendapatan Transfer-LRA	Rp 2.444.887.208.362,00
b.	Pendapatan Transfer-LO	Rp 2.392.506.197.478,00
	Selisih (a - b)	Rp 52.381.010.884,00
Penjelasan selisih:		
a.	Pendapatan Transfer-LRA	Rp 2.444.887.208.362,00
	<i>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</i>	Rp 73.822.670.271,00
	- DBH-LO (treasury Deposit Fund) - Pencatatan Piutang TDF	Rp 67.496.568.000,00
	- DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	Rp 6.326.102.271,00
	<i>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</i>	Rp 126.203.681.155,00
	- DBH-LO (treasury Deposit Fund) - Penerimaan Piutang TDF	Rp 126.203.681.155,00
b.	Pendapatan Transfer-LO	Rp 2.392.506.197.478,00

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Rp518.437.364.929,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO adalah pendapatan daerah dari sumber lain kepada Pemerintah Provinsi Papua yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp32.845.331.262,00 dan TA 2022 sebesar Rp4.467.066.197,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 183
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN		<i>(dalam Rupiah)</i>			
		TA 2023 <i>(Audited)</i>	TA 2022 <i>(Audited)</i>	Kenaikan/(Penurunan) Rp %	
1	Pendapatan Hibah-LO	486.710.723.915,00	4.396.650.135,00	482.314.073.780,00	10.970,04
2	Pendapatan Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya-LO	31.726.641.014,00	70.416.062,00	31.656.224.952,00	44.955,97
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO		518.437.364.929,00	4.467.066.197,00	513.970.298.732,00	11.505,77

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp518.437.364.929,00. Bila dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp4.467.066.197,00, maka Lain-lain Pendapatan yang sah-LO pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp513.970.298.732,00 atau 11.505,77% dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp486.710.723.915,00

Pendapatan Hibah adalah Pendapatan berupa Uang, Barang dan atau Jasa yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Masyarakat, Organisasi dan Badan Usaha Dalam Negeri yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pendapatan Hibah-LO berupa uang, barang dan atau jasa bagi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp486.710.723.915,00 berasal dari Hibah PT Freeport dan Sumbangan Sukarela dari Pihak Ketiga (SP3) yang mengerjakan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua.

Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp486.710.723.915,00 mengalami kenaikan sebesar Rp482.314.073.780,00 atau 10.970,04 % dibandingkan dengan Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp4.396.650.135,00.

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya Rp31.726.641.014,00

Pendapatan Lainnya-LO Pemerintah Provinsi Papua merupakan pendapatan yang diperoleh dari hibah dana BOS atau pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun sebelumnya.

Pendapatan Lainnya Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp31.726.641.014,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.656.224.952,00 atau 44.955,97% dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya

pada Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp70.416.062,00.

Pendapatan Lainnya TA 2023 sebesar Rp31.726.641.014,00 merupakan setoran pengembalian dari penerima bantuan dana hibah dan sosial dengan rincian sebagai berikut:

1. KONI Provinsi Papua sebesar Rp30.170.103.000,00;
2. Beasiswa Pendidikan S1 Afirmasi sebesar Rp490.000,00;
3. Honor Guru Kontrak Provinsi Papua sebesar Rp1.368.000,00;
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp894.512.190,00;
5. Hibah Kepada Kepolisian Negara Indonesia Daerah sebesar Rp43.548,00;
6. Uang Lelah Satgas COVID-19 sebesar Rp90.000.000,00;
7. Hibah kegiatan sail teluk cenderawasih kepada Pemkab Yapen Rp533.727.639,00 dan Pemkab Biak Rp36.396.637,00, yang disetorkan di tahun 2024.

Rekapitulasi Pendapatan-LO dan Pendapatan Asli Daerah-LO per unit organisasi/OPD TA 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 15 dan Lampiran 16**.

Selisih antara Lain-lain Pendapatan yang sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan yang sah-LO TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - Lra	Rp	517.867.240.653,00
b.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lo	Rp	518.437.364.929,00
	Selisih (a - b)	Rp	(570.124.276,00)
Penjelasan selisih:			
a.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - Lra	Rp	517.867.240.653,00
	<i>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</i>	Rp	570.124.276,00
	- Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia - Pengembalian atas Hibah Sail Teluk Cendrawasih	Rp	570.124.276,00
	<i>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</i>	Rp	0,00
b.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lo	Rp	518.437.364.929,00

5.4.2

BEBAN

Rp4.870.328.641.649,35

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp4.870.328.641.649,35 dan pada TA 2022 sebesar Rp10.605.685.323.139,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 184
Beban Operasional Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)		
	(Audited)	(Audited)	Rp	%	
1	Beban Pegawai-LO	1.050.762.185.920,00	2.433.503.558.492,00	(1.382.741.372.572,00)	(56,82)
2	Beban Persediaan	889.044.961.559,49	2.969.915.028.532,77	(2.080.870.066.973,28)	(70,06)
3	Beban Jasa	513.455.741.863,06	1.030.016.211.865,83	(516.560.470.002,77)	(50,15)
4	Beban Pemeliharaan	88.903.986.531,83	168.310.042.449,22	(79.406.055.917,39)	(47,18)
5	Beban Perjalanan Dinas	429.530.621.247,00	473.291.578.551,00	(43.760.957.304,00)	(9,25)
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	85.051.495,00	23.787.857,00	61.263.638,00	257,54
8	Beban Hibah	710.743.851.227,13	1.696.830.984.408,60	(986.087.133.181,47)	(58,11)
9	Beban Bantuan Sosial	19.844.839.668,00	43.752.760.076,37	(23.907.920.408,37)	(54,64)
10	Beban Penyusutan	782.674.531.050,11	1.082.775.101.320,10	(300.100.570.269,99)	(27,72)
11	Beban Penyisihan Piutang	9.847.681.230,66	705.435.304,02	9.142.245.926,64	1.295,97
12	Beban Transfer	372.436.982.216,00	675.401.468.603,00	(302.964.486.387,00)	(44,86)
13	Beban Lain-lain	2.998.207.641,07	31.159.365.679,15	(28.161.158.038,08)	(90,38)
	Jumlah Beban Operasional	4.870.328.641.649,35	10.605.685.323.139,10	(5.735.356.681.489,71)	(54,08)

Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp4.870.328.641.649,35 dibandingkan dengan Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp10.605.685.323.139,10. maka Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.735.356.681.489,71 atau (54,08%)

Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp4.870.328.641.649,35 diuraikan sebagai berikut:

5.4.2.1

Beban Pegawai-LO**Rp1.050.762.185.920,00**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Beban Pegawai dan Tunjangan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp1.050.762.185.920,00 dan TA 2022 sebesar Rp2.433.503.558.492,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 185
Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN		(dalam Rupiah)			
		TA 2023 (Audited)	TA 2022 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	476.774.620.106,00	867.297.592.206,00	(390.522.972.100,00)	(45,03)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	452.695.931.315,00	1.399.994.118.880,00	(947.298.187.565,00)	(67,66)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.324.448.420,00	30.216.408.760,00	(13.891.960.340,00)	(45,97)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	65.608.120.033,00	78.821.029.371,00	(13.212.909.338,00)	(16,76)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	136.103.051,00	(136.103.051,00)	(100,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	360.000.000,00	828.750.000,00	(468.750.000,00)	(56,56)
7	Beban Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB	38.999.066.046,00	35.999.502.139,00	2.999.563.907,00	8,33
8	Beban Pegawai BLUD	0,00	20.210.054.085,00	(20.210.054.085,00)	(100,00)
Beban Pegawai-LO		1.050.762.185.920,00	2.433.503.558.492,00	(1.382.741.372.572,00)	(56,82)

Beban Pegawai-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.382.741.372.572,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.433.503.558.492,00 menjadi sebesar Rp1.050.762.185.920,00 pada TA 2023.

Selisih antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai-LO TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a.	Belanja Pegawai	Rp 1.098.194.585.460,00
b.	Beban Pegawai-LO	<u>Rp 1.050.762.185.920,00</u>
	Selisih (a - b)	Rp 47.432.399.540,00

Penjelasan selisih:

a.	Belanja Pegawai	Rp 1.098.194.585.460,00
	<i>Penambahan Belanja Pegawai terhadap LO:</i>	Rp 517.600.460,00
	- Pengakuan Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	Rp 517.600.460,00
	<i>Pengurangan Belanja Pegawai terhadap LO:</i>	Rp 47.950.000.000,00
	- Reklasifikasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN ke Beban Persediaan	Rp 39.000.000.000,00
	- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan - Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	Rp 50.000.000,00
	- Reklasifikasi Belanja Pegawai BLUD ke Beban Persediaan	Rp 8.900.000.000,00
b.	Beban Pegawai	Rp 1.050.762.185.920,00

5.4.2.2

Beban Persediaan-LO**Rp889.044.961.559,49**

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk Barang atau Perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban persediaan yang dimaksudkan dalam laporan operasional adalah penggunaan barang barang persediaan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan periode 31 Desember 2023.

Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 memiliki Beban Persediaan-LO sebesar Rp889.044.961.559,49 dan TA 2022 sebesar Rp2.969.915.028.532,77 dirinci sebagai berikut:

Tabel 186
Beban Persediaan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
1	Beban Barang Pakai Habis	883.672.362.565,41	2.961.157.588.507,05	(2.077.485.225.941,64)	(70,16)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	5.372.598.994,08	8.757.440.025,72	(3.384.841.031,64)	(38,65)
Beban Persediaan-LO		889.044.961.559,49	2.969.915.028.532,77	(2.080.870.066.973,28)	(70,06)

Beban Persediaan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp889.044.961.559,49 mengalami penurunan sebesar Rp2.080.870.066.973,28 atau (70,06%) bila dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp2.969.915.028.532,77.

Selisih antara Belanja Barang dan Beban Persediaan-LO TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a.	Belanja Barang	Rp 1.024.220.909.349,24
b.	Beban Persediaan-LO	<u>Rp 889.044.961.559,49</u>
	Selisih (a - b)	Rp 135.175.947.789,75

Penjelasan selisih:

a.	Belanja Barang	Rp 1.024.220.909.349,24
	<i>Penambahan Belanja Pemeliharaan terhadap LO:</i>	Rp 806.085.322.909,74
	- Penyesuaian Penggunaan Persediaan	Rp 708.441.740.758,74
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Reklas dari Belanja Pegawai	Rp 50.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah- LO - Pencatatan atas Penggunaan Langsung	Rp 378.141.920,00
	- Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp 324.991.000,00
	- Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Rp 508.566.214,00
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Koreksi double catata Persediaan	Rp 36.044.949.394,00
	- Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin	Rp 2.158.781.770,00
	- Reklasifikasi aset tetap lainnya	Rp 1.777.365.940,00
	- Reklasifikasi dari Beban Pegawai	Rp 47.900.000.000,00
	- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp 8.500.785.913,00
	<i>Pengurangan Belanja Barang terhadap LO:</i>	Rp 941.261.270.699,49
	- Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan - Koreksi double Pencatatan Persediaan	Rp 941.261.270.699,49
b.	Beban Persediaan-LO	Rp 889.044.961.559,49

5.4.2.3 Beban Jasa-LO

Rp513.455.741.863,06

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi jasa yang habis pakai.

Beban Jasa pada Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 187
Beban Jasa-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
1	Beban Jasa Kantor	291.168.374.255,00	377.301.654.139,10	(86.133.279.884,10)	(22,83)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.752.240.158,00	142.748.780.581,95	(138.996.540.423,95)	(97,37)
3	Beban Sewa Tanah	1.604.960.000,00	1.692.000.000,00	(87.040.000,00)	(5,14)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	55.748.243.119,86	78.309.345.942,00	(22.561.102.822,14)	(28,81)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	41.877.197.300,73	45.793.736.613,43	(3.916.539.312,70)	(8,55)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	352.100.000,00	23.650.000,00	328.450.000,00	1.388,79
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	43.852.736.957,07	84.900.120.665,80	(41.047.383.708,73)	(48,35)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.146.807.600,00	3.597.298.500,00	(2.450.490.900,00)	(68,12)
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	3.807.776.210,79	(3.807.776.210,79)	(100,00)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	4.165.571.000,00	3.953.505.000,00	212.066.000,00	5,36
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.021.872.382,00	44.056.875.999,00	(28.035.003.617,00)	(63,63)
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	1.561.899.488,00	2.453.498.285,00	(891.598.797,00)	(36,34)
13	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	2.831.250.000,00	701.500.000,00	2.129.750.000,00	303,60

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
	Lain/Masyarakat				
14	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	910.860.040,00	5.877.870.000,00	(4.967.009.960,00)	(84,50)
15	Beban Penunjang Otonomi Khusus	4.400.000.000,00	3.000.000.000,00	1.400.000.000,00	46,67
16	Beban Barang dan Jasa BOS	5.540.429.565,00	157.945.779.428,00	(152.405.349.863,00)	(96,49)
17	Beban Barang dan Jasa BLUD	38.521.199.997,40	73.852.820.500,75	(35.331.620.503,35)	(47,84)
Beban Jasa - LO		513.455.741.863,06	1.030.016.211.865,83	(516.560.470.002,77)	(50,15)

Beban Jasa-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp513.455.741.863,06 mengalami penurunan sebesar Rp516.560.470.002,77 atau (50,15%) dibandingkan Beban Jasa – LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp1.030.016.211.865,83.

Beban dan Jasa BOS TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp152.405.349.863,00 karena pelimpahan wewenang ke kabupaten/kota dan DOB sehingga pada TA 2023 hanya dilakukan pencatatan transaksi BOS Sekolah SLB dan SMA/SMK Khusus yaitu sebesar Rp5.540.429.565,00.

Selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa-LO TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Jasa	Rp	546.224.868.030,92
b. Beban Jasa-LO	Rp	<u>513.455.741.863,06</u>
Selisih (a - b)	Rp	32.769.126.167,86

Penjelasan selisih:

a. Belanja Jasa	Rp	546.224.868.030,92
Penambahan Belanja Jasa terhadap LO:	Rp	8.892.135.160,53
- Hutang Belanja - Pengakuan Hutang Belanja	Rp	39.000.000,00
- Pencatatan Penerimaan dan BOS	Rp	3.306.800.750,00
- Pencatatan Penggunaan dana BOS	Rp	13.814.394,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	Rp	1.444.708.090,00
- kurang catat pendapatan dan beban atas penggunaan langsung		
- Pengakuan Beban Dibayar dimuka	Rp	1.068.510.405,53
- Reklasifikasi dari Beban Barang Jasa BLUD	Rp	3.019.301.521,00
Pengurangan Belanja Jasa terhadap LO:	Rp	41.661.261.328,39
- Reklasifikasi Belanja Jasa menjadi Aset Tetap Tanah	Rp	5.054.111.481,60
- Koreksi atas kelebihan catata pendapatan blud	Rp	14.946.105,79
- Jalan Provinsi - Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap	Rp	982.646.778,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Provinsi - Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	199.741.600,00
- Reklas Beban Barang Jasa ke Beban Hibah BOS	Rp	584.772.000,00
- Reklas Beban Barang dan Jasa BOS ke Aset Tetap Peralatan Mesin	Rp	214.715.100,00
- Reklasifikasi Belanja Jasa menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	1.082.227.000,00
- Reklasifikasi Belanja Jasa menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	91.778.685,00
- Reklasifikasi Belanja Jasa menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	197.481.765,00
- Reklasifikasi Belanja Jasa menjadi Aset Tidak Berwujud	Rp	195.000.000,00
- Reklasifikasi Belanja Jasa Penjadi Beban Persediaan	Rp	8.500.785.913,00
- Penyesuaian atas Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi- Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI	Rp	24.543.054.900,00
b. Beban Jasa	Rp	513.455.741.863,06

5.4.2.4 **Beban Pemeliharaan-LO** **Rp88.903.986.531,83**

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan adalah beban atas pemeliharaan aset tetap Pemerintah Provinsi Papua yang tidak dikapitalisasi ke aset tetap selama periode TA 2023.

Beban Pemeliharaan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut :

Tabel 188
Beban Pemeliharaan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	22.330.851.619,00	10.311.665.688,00	12.019.185.931,00	116,56
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.939.071.768,23	45.533.115.536,40	(15.594.043.768,17)	(34,25)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.048.046.595,68	86.857.061.151,01	(49.809.014.555,33)	(57,35)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.440.900.001,08)	13.746.762.651,42	(17.187.662.652,50)	(125,03)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.426.961.550,00	0,00	2.426.961.550,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	599.955.000,00	11.861.437.422,39	(11.261.482.422,39)	(94,94)
Beban Pemeliharaan-LO		88.903.986.531,83	168.310.042.449,22	(79.406.055.917,39)	(47,18)

Beban Pemeliharaan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp88.903.986.531,83 atau mengalami penurunan sebesar Rp79.406.055.917,39 atau (47,18%) dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp168.310.042.449,22.

Selisih antara Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a.	Belanja Pemeliharaan	Rp	123.673.504.359,07
b.	Beban Pemeliharaan	Rp	88.903.986.531,83
	Selisih (a-b)	Rp	34.769.517.827,24
Penjelasan selisih:			
a.	Belanja Pemeliharaan	Rp	123.673.504.359,07
	Penambahan Belanja Pemeliharaan terhadap LO:	Rp	6.125.969.646,13
	- Reklasifikasi Belanja Modal Tanah menjadi Beban Pemeliharaan	Rp	27.896.000,00
	- Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Pemeliharaan	Rp	2.582.271.619,23
	- Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Beban Pemeliharaan	Rp	3.213.826.526,90
	- Reklasifikasi Belanja Aset Tidak Berwujud menjadi Beban Pemeliharaan	Rp	301.975.500,00
	Pengurangan Belanja Pemeliharaan terhadap LO:	Rp	40.895.487.473,37
	- Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	389.435.790,00
	- Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	30.898.239.267,67
	- Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	1.185.389.010,00
	- Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	8.422.423.405,70
b.	Beban Pemeliharaan	Rp	88.903.986.531,83

5.4.2.5 **Beban Perjalanan Dinas-LO** **Rp429.530.621.247,00**

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Jabatan.

Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 189
Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN		<i>(dalam Rupiah)</i>			
		TA 2023 <i>(Audited)</i>	TA 2022 <i>(Audited)</i>	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	426.967.059.754,00	457.407.163.093,00	(30.440.103.339,00)	(6,65)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.563.561.493,00	15.884.415.458,00	(13.320.853.965,00)	(83,86)
Beban Perjalanan Dinas-LO		429.530.621.247,00	473.291.578.551,00	(43.760.957.304,00)	(9,25)

Beban Perjalanan Dinas-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp429.530.621.247,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.760.957.304,00 atau (9,25%) dibandingkan Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2022 sebesar Rp473.291.578.551,00.

5.4.2.6 **Beban Subsidi-LO** **Rp85.051.495,00**

Beban Subsidi merupakan beban yang timbul akibat belanja yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat umum.

Beban Subsidi TA 2023 sebesar Rp85.051.495,00 merupakan penggunaan Subsidi Bunga Kredit untuk pinjaman untuk Usaha Kecil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang terdapat pada Rekening Bank Papua Nomor 1000126002481, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 518/1233 Nomor:95/PKS-BPD/XI/2021 tentang Pelaksanaan Kredit Program Percepatan Akses Keuangan Daerah (PAPEDA) Bagi Usaha Mikro di Provinsi Papua.

5.4.2.7 **Beban Hibah-LO** **Rp710.743.851.227,13**

Beban Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pemerintah Provinsi Papua Memiliki Beban Hibah-LO TA 2023 dan 2022 sebesar Rp710.743.851.227,13 dan Rp1.696.830.984.408,60 dirinci sebagai berikut:

Tabel 190
Beban Hibah-LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.712.200.000,00	1.224.300.000,00	3.487.900.000,00	284,89
2 Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	53.785.237.260,22	0,00	53.785.237.260,22	0,00
3 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	154.014.813.903,28	862.075.468.308,00	(708.060.654.404,72)	(82,13)
4 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	336.586.161.436,92	67.766.337.107,78	268.819.824.329,14	396,69
5 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	156.943.112.626,71	678.926.206.460,82	(521.983.093.834,11)	(76,88)
6 Beban Hibah kepada Koperasi	43.950.000,00	2.700.000.000,00	(2.656.050.000,00)	(98,37)
7 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	300.000.000,00	80.365.068.532,00	(80.065.068.532,00)	(99,63)
8 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdus Swasta	584.772.000,00	0,00	584.772.000,00	0,00
9 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.773.604.000,00	3.773.604.000,00	0,00	0,00
Beban Hibah-LO	710.743.851.227,13	1.696.830.984.408,60	(986.087.133.181,47)	(58,11)

Beban Hibah-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp710.743.851.227,13 mengalami penurunan sebesar Rp986.087.133.181,47 atau (58,11%) dibandingkan Beban Hibah-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp1.696.830.984.408,60.

Selisih Belanja Hibah dan Beban Hibah (LO) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Hibah	Rp 695.069.090.926,91
b. Beban Hibah	Rp 710.743.851.227,13
Selisih (a - b)	Rp (15.674.760.300,22)

Penjelasan selisih:

a. Belanja Hibah	Rp 695.069.090.926,91
<i>Penambahan Belanja Hibah terhadap LO:</i>	Rp 24.350.191.129,06
- Reklasifikasi Belanja Modal Tanah menjadi Beban Hibah	Rp 5.104.333.304,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Beban Hibah	Rp 5.716.889.818,20
- Reklasifikasi Belanja Hibah ke Barang dan jasa BOS	Rp 584.772.000,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Beban Hibah	Rp 12.944.196.006,86
<i>Pengurangan Belanja Hibah terhadap LO:</i>	Rp 8.675.430.828,84
- Reklasifikasi Belanja Hibah ke Barang dan jasa BOS	Rp 13.814.394,00
- Reklasifikasi Beban Hibah menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 8.661.616.434,84
b. Beban Hibah	Rp 710.743.851.227,13

5.4.2.8

Beban Bantuan Sosial-LO

Rp19.844.839.668,00

Beban Bantuan Sosial adalah beban bantuan berupa uang yang diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Beban bantuan sosial merupakan beban pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Beban Bantuan Sosial-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp19.844.839.668,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.907.920.408,37 atau (54,64%) dibandingkan Beban Bantuan Sosial-LO Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp43.752.760.076,37.

Beban Bantuan Sosial-LO TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 191
Beban Bantuan Sosial-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.663.000.000,00	25.987.319.875,00	(15.324.319.875,00)	(58,97)
2 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	480.000.000,00	(480.000.000,00)	(100,00)
3 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	3.618.500.000,00	(3.468.500.000,00)	(95,85)
4 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.200.000.000,00	0,00	5.200.000.000,00	0,00
5 Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	3.831.839.668,00	13.666.940.201,37	(9.835.100.533,37)	(71,96)
Beban Bantuan Sosial-LO	19.844.839.668,00	43.752.760.076,37	(23.907.920.408,37)	(54,64)

5.4.2.9 Beban Penyusutan-LO**Rp781.310.020.837,11**

Beban Penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan. Beban penyusutan masuk dalam Laporan Operasional, sedangkan akumulasi penyusutan masuk dalam Neraca.

Beban penyusutan TA 2023 sebesar Rp781.310.020.837,11 dan TA 2022 sebesar Rp1.082.775.101.320,10 dirinci sebagai berikut:

Tabel 192
Beban Penyusutan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Beban Penyusutan Alat Besar	239.604.505.991,26	232.546.365.308,00	7.058.140.683,26	3,04
2 Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00	15.333.333,00	(15.333.333,00)	(100,00)
3 Beban Penyusutan Bangunan Gedung	163.975.789.577,98	139.631.087.778,19	24.344.701.799,79	17,44
4 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	377.693.103.689,87	709.005.662.401,91	(331.312.558.712,04)	(46,73)
5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	36.621.578,00	1.576.652.499,00	(1.540.030.921,00)	(97,68)
Beban Penyusutan-LO	781.310.020.837,11	1.082.775.101.320,10	(301.465.080.482,99)	(27,84)

Beban penyusutan dihitung menggunakan pendekatan bulanan penggunaan, dengan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh sesuai dengan Bultek SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua.

5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang-LO**Rp9.847.681.230,66**

Beban penyisihan piutang adalah pengakuan atas taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Beban penyisihan piutang akan tampak dalam Laporan Operasional, sedangkan akun akumulasi penyisihan piutang akan terlihat dalam Neraca.

Beban penyisihan piutang TA 2023 sebesar Rp9.847.681.230,66 dan TA 2022 sebesar Rp705.435.304,02 dirinci sebagai berikut:

Tabel 193
Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	74.479.800,00	(74.479.800,00)	(100,00)
2 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	93.278.230,66	0,00	93.278.230,66	0,00
2 Beban Penyisihan Piutang Lainnya	9.754.403.000,00	630.955.504,02	9.123.447.495,98	1.445,97
Beban Penyisihan Piutang-LO	9.847.681.230,66	705.435.304,02	9.142.245.926,64	1.295,97

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp9.847.681.230,66; mengalami kenaikan sebesar Rp9.142.245.926,64 atau naik 97,79% dibandingkan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp705.435.304,02. Kenaikan terjadi karena pada TA 2023 dilakukan penyisihan atas Piutang Lainnya sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.

5.4.2.11 Beban Transfer-LO**Rp372.436.982.216,00**

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 194
Beban Transfer-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	286.308.405.508,00	0,00	286.308.405.508,00	0,00
2 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota	74.128.576.708,00	675.401.468.603,00	(601.272.891.895,00)	(89,02)
3 Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	0,00
Beban Transfer-LO	372.436.982.216,00	675.401.468.603,00	(302.964.486.387,00)	(44,86)

Beban Transfer-LO Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp372.436.982.216,00 bila dibandingkan dengan Beban Transfer pada TA 2022 sebesar Rp675.401.468.603,00, maka Beban Transfer Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp302.964.486.387,00 atau (44,86%)

Selisih antara Belanja Transfer dan Beban Transfer-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Transfer	Rp	425.700.285.073,00
b. Beban Transfer	<u>Rp</u>	<u>372.436.982.216,00</u>
Selisih (a - b)	Rp	53.263.302.857,00

Penjelasan selisih:

a. Belanja Transfer	Rp	425.700.285.073,00
<i>Penambahan Belanja Transfer terhadap LO:</i>	Rp	60.628.617.317,00
- Pengakuan Kurang Salur Dana Bagi Hasil	Rp	48.628.617.317,00
- Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Keerom dalam rangka Pengadaan Alat untuk Tanam Padi dan Jagung Tahun 2023	Rp	2.000.000.000,00
- Pembayaran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya guna menunjang Pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan untuk Rumah Sakit Mamberamo Raya Tahun 2023	Rp	10.000.000.000,00
<i>Pengurangan Belanja Transafer terhadap LO:</i>	Rp	113.891.920.174,00
- Pembayaran Bagi Hasil Pajak Lebih/Kurang Salur PKB, BBN-KB, PAP, PBB-KB dan Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Prov Papua Pegunungan TA 2022	Rp	113.891.920.174,00
b. Beban Transfer	Rp	372.436.982.216,00

5.4.2.12 Beban Lain-lain-LO Rp2.998.207.641,07

Beban lain-lain Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp2.998.207.641,07 dan TA 2022 sebesar Rp31.159.365.679,15 yang merupakan beban barang ekstrakomptabel.

Dibandingkan dengan Beban lain-lain Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp31.159.365.679,15, maka TA 2023 Beban Lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp28.161.158.038,08 atau (90,38%).

Rekapitulasi Beban Operasional per unit organisasi/OPD TA 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (Rp1.142.205.279.048,77)

Surplus/defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang dari Pendapatan dan Beban selama periode pelaporan dari kegiatan operasional.

Surplus/defisit dari kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar negatif Rp Rp1.142.205.279.048,77 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp584.416.677.650,38 merupakan selisih lebih Pendapatan dibandingkan Beban yang berasal dari kegiatan operasional yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 195
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
1	PENDAPATAN-LO	3.728.123.362.600,58	11.190.102.000.789,40	(7.461.978.638.188,82)	(66,68)
2	BEBAN	4.870.328.641.649,35	10.605.685.323.139,10	(5.735.356.681.489,75)	(54,08)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL		(1.142.205.279.048,77)	584.416.677.650,38	(1.726.621.956.699,15)	(295,44)

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 adalah sebesar negatif Rp1.142.205.279.048,77, turun sebesar Rp1.726.621.956.699,15 atau (295,44%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp584.416.677.650,38.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp74.002.972.364,68

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional TA 2023 yaitu Surplus sebesar Rp74.002.972.364,68 dan TA 2022 surplus sebesar Rp1.255.644,00. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 74.001.716.720,68 atau 5.893.526,89% dirinci sebagai berikut

5.4.4.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Rp191.042.839.294,60

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada TA 2023 sebesar Rp191.042.839.294,60 terdiri dari; (1) Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO sebesar Rp1.329.493.403,00; (2) Koreksi pencatatan laba Bank Papua Tahun 2023 berdasarkan LK Audited Bank Papua Tahun 2023 sebesar Rp100.008.773.858,35 dan (3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp89.704.572.033,25; sedangkan TA 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

5.4.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Rp0,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO TA 2023 sebesar Rp0,00 atau NIHIL dan TA 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

5.4.4.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Rp116.496.937.314,92

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp116.496.937.314,92 dan Rp0,00 atau NIHIL.

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO TA 2023 sebesar Rp116.496.937.314,92, terdiri dari:

1. Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya-LO sebesar Rp1.329.493.403,00
2. Defisit Penghapusan Peralatan Olahraga-LO sebesar Rp14.155.981.053,00;
3. Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO sebesar Rp100.989.825.658,92; dan
4. Defisit atas penyesuaian harga jual kendaraan berdasarkan SK Nomor 188.4/268/TAHUN 2023 sebesar Rp21.637.200,00.

5.4.4.4 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Rp0,00

Surplus Penjualan Aset Nonlancar baik pada TA 2023 maupun TA 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

5.4.4.5 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp542.929.615,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun pada TA 2023 sebesar Rp542.929.615,00 dan TA 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL. Defisit TA 2023 sebesar Rp542.929.615,00 merupakan Pengakuan atas kerugian PT Irian Bhakti.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (Rp1.068.202.306.684,09)

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa adalah surplus atau defisit dari kegiatan operasional ditambah dengan surplus atau defisit kegiatan non operasional. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa pada Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar negatif Rp1.068.202.306.684,09 dan pada TA 2022 sebesar Rp584.417.933.294,38 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 196
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Audited)	(Audited)	Rp	%
1	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(1.142.205.279.048,77)	584.416.677.650,38	(1.726.621.956.699,15)	(295,44)
2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	74.002.972.364,68	1.255.644,00	74.001.716.720,68	5.893.526,89
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.068.202.306.684,09)	584.417.933.294,38	(1.652.620.239.978,47)	(282,78)

5.4.6 POS LUAR BIASA (Rp163.855.515.062,69)

Pos Luar Biasa adalah pendapatan dan pengeluaran yang timbul dari peristiwa atau transaksi yang merupakan bagian dari kegiatan normal, tetapi atas dasar sifat, ruang lingkup, atau karakternya yang jarang terjadi, maka perlu disajikan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan (asas bruto), dengan tujuan agar dapat memberikan sudut pandang baru terhadap hasil/output dan pengembangan dalam kegiatan normal Daerah.

Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar negatif Rp163.855.515.062,69 dan pada TA 2022 sebesar negatif Rp188.384.463.037,00. dirinci sebagai berikut:

5.4.6.1 Pendapatan Luar Biasa Rp0,00

Pendapatan luar biasa pada Pemerintah Provinsi Papua baik pada TA 2023 maupun TA 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 atau NIHIL.

5.4.6.2 Beban Luar Biasa Rp163.855.515.062,69

Beban luar biasa Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 memenuhi definisi peristiwa luar biasa dan perlu disajikan secara terpisah.

Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp163.855.515.062,69. Bila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp188.384.463.037,00, maka Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Papua turun sebesar Rp24.528.947.974,31 atau (13,02 %).

5.4.7 SURPLUS/DEFISIT-LO (Rp1.232.057.821.746,78)

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/defisit merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban selama periode pelaporan setelah perhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 mengalami DEFISIT sebesar negatif

Rp1.232.057.821.746,78 dan TA 2022 mengalami SURPLUS sebesar Rp396.033.470.257,38. sebagai berikut:

Tabel 197
Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.068.202.306.684,09)	584.417.933.294,38	(1.652.620.239.978,47)	(282,78)
2	POS LUAR BIASA	(163.855.515.062,69)	(188.384.463.037,00)	24.528.947.974,31	(13,02)
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(1.232.057.821.746,78)	396.033.470.257,38	(1.628.091.292.004,16)	(411,10)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Laporan Operasional Pemerintah Provinsi pada TA 2023 mengalami DEFISIT sebesar negatif Rp1.232.057.821.746,78 dan TA 2022 mengalami SURPLUS sebesar Rp396.033.470.257,38.

Bila dibandingkan dengan Surplus/defisit Laporan Operasional TA 2022 SURPLUS sebesar Rp396.033.470.257,38, maka Surplus/defisit Laporan Operasional TA 2023 mengalami penurunan sebesar negatif Rp1.628.091.292.004,16 atau (411,10%).

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan Arus Kas dengan menggunakan metode langsung, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

Laporan Arus Kas mencerminkan kondisi obyektif kas dan menyajikan informasi keuangan mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas per tanggal pelaporan, sehingga saldo akhir kas dalam Laporan Arus Kas akan sama dengan saldo kas dalam Neraca per tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua diklasifikasikan dalam 4 (empat) komponen aktivitas, yaitu: (1) Aktivitas Operasi; (2) Aktivitas Investasi/Investasi Aset Nonkeuangan; (3) Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan; dan (4) Aktivitas Transitoris/Non Anggaran. Masing-masing aktivitas dilaporkan arus masuk dan arus keluar kasnya sehingga diperoleh informasi tentang arus kas bersih dari tiap-tiap aktivitas.

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Papua selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Realisasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar negatif Rp804.574.054.340,95 dan Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2022 sebesar Rp1.614.905.039.162,19. Arus kas bersih dari aktivitas operasi negatif menggambarkan bahwa secara internal pemerintah daerah kurang memiliki kemandirian dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional rutinnnya, terkait dengan penyediaan pelayanan publik.

Bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2022 sebesar Rp1.614.905.039.162,19 maka Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar negatif Rp2.419.479.093.503,14 atau (149,82%)

Realisasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas Rp3.733.430.723.750,09

Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp3.733.430.723.750,09 dan pada TA 2022 sebesar Rp11.040.028.768.899,40.

Realisasi Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 198
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)		
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%	
1	Penerimaan Pajak Daerah	518.641.672.099,00	1.235.493.977.265,00	(716.852.305.166,00)	(58,02)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	17.180.906.474,00	17.713.806.139,00	(532.899.665,00)	(3,01)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.177.723.145,00	766.991.557.636,00	(721.813.834.491,00)	(94,11)
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	189.675.973.017,09	206.475.071.547,36	(16.799.098.530,27)	(8,14)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	372.057.176.155,00	1.938.939.483.801,00	(1.566.882.307.646,00)	(80,81)
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	823.921.492.505,00	2.314.812.589.728,00	(1.490.891.097.223,00)	(64,41)
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	178.036.462.636,00	366.834.632.121,00	(188.798.169.485,00)	(51,47)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Nonfisik	19.673.419.066,00	384.159.530.465,00	(364.486.111.399,00)	(94,88)
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.051.198.658.000,00	3.792.655.366.000,00	(2.741.456.708.000,00)	(72,28)
10	Penerimaan Dana Insentif daerah	0,00	11.485.688.000,00	(11.485.688.000,00)	(100,00)
11	Penerimaan Hibah	486.710.723.915,00	4.396.650.135,00	482.314.073.780,00	10.970,04
12	Penerimaan Lainnya	31.156.516.738,00	70.416.062,00	31.086.100.676,00	44.146,32
13	<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi		3.733.430.723.750,09	11.040.028.768.899,40	(7.306.598.045.149,27)	(66,18)

Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp3.733.430.723.750,09 bila dibandingkan dengan Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp11.040.028.768.899,40, maka Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.306.598.045.149,27 atau (66,18%)

5.5.1.2 Arus Keluar Kas Rp4.538.004.778.091,04

Realisasi Arus keluar kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp4.538.004.778.091,04 dan Arus keluar kas aktivitas operasi TA 2022 sebesar Rp9.425.123.729.737,17.

Realisasi Arus keluar kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

Tabel 199
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)		
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%	
1	Pembayaran Pegawai	1.098.194.585.460,00	2.413.293.504.407,00	(1.315.098.918.947,00)	(54,49)
2	Pembayaran Barang dan Jasa	2.123.340.461.900,44	4.487.048.045.881,96	(2.363.707.583.981,52)	(52,68)
3	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	695.069.090.926,91	1.634.316.326.641,84	(939.247.235.714,93)	(57,47)
5	Pembayaran Bantuan Sosial	19.844.839.668,00	43.752.760.076,37	(23.907.920.408,37)	(54,64)
6	Pembayaran Tak Terduga	163.855.515.062,69	196.021.127.021,00	(32.165.611.958,31)	(16,41)
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	425.700.285.073,00	650.691.965.709,00	(224.991.680.636,00)	(34,58)
8	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	0,00
9	<i>Pembayaran Kejadian Luar Biasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi		4.538.004.778.091,04	9.425.123.729.737,17	(4.887.118.951.646,13)	(51,85)

Arus keluar kas aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp4.538.004.778.091,04 atau turun sebesar Rp4.887.118.951.646,13 atau (51,85%) bila dibandingkan dengan realisasi arus keluar kas aktivitas operasi pada TA 2022 sebesar Rp9.425.123.729.737,17

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Pemerintah Provinsi Papua melakukan aktivitas investasi untuk menjaga kesinambungan operasional rutin pemerintah daerah saat ini serta untuk meningkatkan kapasitas pemberian pelayanan publik di masa depan.

Realisasi Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar negatif Rp19.205.063.182,80 dan TA 2022 sebesar negatif Rp1.749.300.308.361,66. Hal ini menunjukkan adanya pengeluaran kas yang lebih besar dibandingkan penerimaan kas dan menunjukkan adanya pertumbuhan aset tetap yang positif.

Realisasi arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas Rp500.239.894.237,00

Arus masuk kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp500.239.894.237,00 dan TA 2022 sebesar Rp300.233.497.067,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 200
Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 <i>Pencairan Dana Cadangan</i>	500.000.000.000,00	300.153.254.727,00	199.846.745.273,00	66,58
2 <i>Penjualan atas Tanah</i>	0,00	10.815.000,00	(10.815.000,00)	(100,00)
3 <i>Penjualan atas Peralatan dan Mesin</i>	155.234.600,00	25.500.000,00	129.734.600,00	508,76
4 <i>Penjualan atas Gedung dan Bangunan</i>	84.659.637,00	43.927.340,00	40.732.297,00	92,73
5 <i>Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6 <i>Penjualan Aset Tetap Lainnya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7 <i>Penjualan Aset Lainnya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
8 <i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <i>Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	500.239.894.237,00	300.233.497.067,00	200.006.397.170,00	66,62

Arus masuk kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp500.239.894.237,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp200.006.397.170,00 atau 66,62% bila dibandingkan dengan realisasi arus masuk kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2022 sebesar Rp300.233.497.067,00.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas Rp519.444.957.419,80

Realisasi arus keluar kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp519.444.957.419,80 dan TA 2022 sebesar Rp2.049.533.805.428,66 terdiri dari:

Tabel 201
Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 <i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <i>Perolehan Tanah</i>	12.734.748.904,00	25.000.000.000,00	(12.265.251.096,00)	(49,06)
3 <i>Perolehan Peralatan dan Mesin</i>	136.329.618.455,43	236.086.848.452,50	(99.757.229.997,07)	(42,25)
4 <i>Perolehan Gedung dan Bangunan</i>	103.129.046.171,65	1.054.570.476.959,30	(951.441.430.787,65)	(90,22)
5 <i>Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	239.023.566.448,72	709.924.786.398,86	(470.901.219.950,14)	(66,33)
6 <i>Perolehan Aset Tetap Lainnya</i>	2.627.977.440,00	2.504.767.568,00	123.209.872,00	4,92
7 <i>Perolehan Aset Lainnya</i>	0,00	1.446.926.050,00	(1.446.926.050,00)	(100,00)
8 <i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>	25.600.000.000,00	20.000.000.000,00	5.600.000.000,00	28,00
9 <i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>				
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	519.444.957.419,80	2.049.533.805.428,66	(1.530.088.848.008,86)	(74,66)

Realisasi Arus keluar kas aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Papua TA 2022 sebesar Rp2.049.533.805.428,66 pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.530.088.848.008,86 atau (74,66%) menjadi sebesar Rp519.444.957.419,80.

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Realisasi arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas Rp0,00

Realisasi arus masuk kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau NIHIL. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi Papua tidak menerima kas yang berhubungan dengan pinjaman dan/atau pelunasan utang jangka panjang.

Tabel 202
Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas Rp0,00

Realisasi arus keluar kas baik baik Tahun Anggaran 2023 maupun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau NIHIL

Tabel 203
Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Audited)	(Audited)	Rp	%
1 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Papua mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Realisasi arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas**Rp1.574.879.628.165,00**

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris pada TA 2023 sebesar Rp1.574.879.628.165,00 dan pada TA 2022 sebesar Rp3.005.491.221.085,90 adalah merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 204
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	254.953.722.885,00	702.978.511.580,00	(448.024.788.695,00)	(63,73)
2 Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	1.318.841.503.079,00	2.301.278.058.947,90	(982.436.555.868,90)	(42,69)
3 Penerimaan Sisa UUDP Tahun Sebelumnya	1.084.402.201,00	1.234.650.558,00	(150.248.357,00)	(12,17)
4 Kas Masuk dari kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	1.574.879.628.165,00	3.005.491.221.085,90	(1.430.611.592.920,90)	(47,60)

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris pada TA 2023 sebesar Rp1.574.879.628.165,00 atau turun sebesar negatif Rp1.430.611.592.920,90 atau (47,60%) bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp3.005.491.221.085,90.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris TA 2023 adalah merupakan penjumlahan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp254.953.722.885,00, Penerimaan Kembali Uang Persediaan sebesar Rp1.318.841.503.079,00 dan Penerimaan Sisa Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.084.402.201,00 yang merupakan setoran sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 pada TA 2023.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas**Rp1.575.141.442.532,00**

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada TA 2023 sebesar Rp1.575.141.442.532,00 dan TA 2022 sebesar Rp3.005.340.972.728,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 205
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	254.953.722.885,00	702.978.511.580,00	(448.024.788.695,00)	(63,73)
2 Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	1.319.985.517.627,00	2.302.362.461.148,90	(982.376.943.521,90)	(42,67)
3 Kas di Bendahara Penerimaan	202.202.020,00	0,00	202.202.020,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	1.575.141.442.532,00	3.005.340.972.728,90	(1.430.199.530.196,90)	(47,59)

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.575.141.442.532,00 yang terdiri dari pengeluaran PFK BUD sebesar Rp254.953.722.885,00 dan Pemberian Uang Persediaan Kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.319.985.517.627,00, yang merupakan Pencairan SP2D UP/GU/TU TA 2022. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada TA 2023 sebesar Rp1.575.141.442.532,00, bila dibandingkan dengan Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada TA 2022 sebesar Rp3.005.340.972.728,90, maka realisasi Arus keluar kas dari aktivitas transitoris pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.430.199.530.196,90 atau (47,59%).

5.5.5 SALDO AKHIR KAS**Rp970.254.665.668,82**

Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BLUD.

Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum

disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD.

Saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp970.254.665.668,82 dan sebesar Rp1.794.885.454.005,57. Hal ini berarti terjadi penurunan saldo kas sebesar Rp824.630.788.336,75 atau (45,94%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 206
Saldo Akhir Kas Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		<i>(Audited)</i>	<i>(Audited)</i>	Rp	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(804.574.054.340,95)	1.614.905.039.162,19	(2.419.479.093.503,14)	(149,82)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(19.205.063.182,80)	(1.749.300.308.361,66)	1.730.095.245.178,86	(98,90)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(261.814.367,00)	150.248.357,00	(412.062.724,00)	(274,25)
Kenaikan/(Penurunan) Kas		(824.040.931.890,75)	(134.245.020.842,47)	(689.795.911.048,28)	513,83
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bend Penerimaan dan Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS		1.793.768.584.078,57	1.928.090.937.976,04	(134.322.353.897,47)	(6,97)
Koreksi SILPA Tahun Lalu		(1.981.199.605,00)	(77.333.055,00)	(1.903.866.550,00)	2.461,91
Saldo Awal Setelah Koreksi		1.791.787.384.473,57	1.928.013.604.921,04	(136.226.220.447,47)	(7,07)
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas Bendahara BOS		967.746.452.582,82	1.793.768.584.078,57	(826.022.131.495,75)	(46,05)
Terdiri dari:					
1	Kas di Kas Daerah	949.499.167.391,14	1.768.953.115.230,74	(819.453.947.839,60)	(46,32)
2	Kas di BLUD	18.206.015.981,68	22.779.956.117,83	(4.573.940.136,15)	(20,08)
3	Kas Dana BOS	41.269.210,00	2.035.512.730,00	(1.994.243.520,00)	(97,97)
Kas di Bendahara Pengeluaran		1.144.014.548,00	1.084.402.201,00	59.612.347,00	5,50
Kas di Bendahara Penerimaan		202.202.020,00	0,00	202.202.020,00	0,00
Kas Lainnya		1.161.996.518,00	32.467.726,00	1.129.528.792,00	3.478,93
Saldo Akhir Kas		970.254.665.668,82	1.794.885.454.005,57	(824.630.788.336,75)	(45,94)

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas Bendahara BOS TA 2023 sebesar Rp1.793.768.584.078,57 atau turun sebesar Rp134.322.353.897,47 atau (6,97%) bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.928.090.937.976,04.

Adapun Saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Papua TA 2023 sebesar Rp970.254.665.668,82 terdiri dari (1) saldo kas di Bendahara Umum Daerah yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp949.499.167.391,14; (2) saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.144.014.548,00; (3) saldo kas di Bendaharan Penerimaan sebesar Rp202.202.020,00; (4) saldo kas di bendahara BLUD RSUD sebesar Rp18.206.015.981,68; (5) saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp41.269.210,00; dan (6) saldo kas lainnya sebesar Rp1.161.996.518,00.

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Ekuitas Awal, Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Saldo Ekuitas akhir sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL

Rp23.462.462.667.753,60

Ekuitas awal adalah total nilai ekuitas neraca tahun sebelumnya. Ekuitas awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp23.462.462.667.753,60. Dibandingkan dengan ekuitas awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp23.070.198.453.450,70, maka ekuitas awal per 1 Januari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp392.264.214.302,91 atau 1,70%.

- 5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO (Rp1.232.057.821.746,78)**
 Surplus/defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar negatif Rp1.232.057.821.746,78 dan sebesar Rp396.033.470.257,38. Hal ini menunjukkan adanya penurunan surplus/(Defisit)-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.628.091.292.004,16 atau (411,10%).
- 5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR (Rp36.785.101.584,76)**
 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mencakup koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, akumulasi penyusutan, koreksi aset lainnya, dan lain-lain.
 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 sebesar negatif Rp36.785.101.584,76 dan tahun 2022 sebesar negatif Rp3.769.255.954,47 Hal ini berarti pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp33.015.845.630,29 atau (875,92%).
 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 5.6.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN (Rp941.261.270.699,49)**
 Koreksi Nilai Persediaan selama Tahun 2023 senilai negatif Rp941.261.270.699,49 merupakan koreksi nilai persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut:
- Koreksi Saldo atas *double* pencatatan persediaan barang diserahkan ke masyarakat senilai Rp51.114.520.402,00
 - Koreksi ekuitas atas persediaan barang diserahkan ke masyarakat tahun 2019 s.d. 2022 yang dicatat sebagai beban persediaan senilai Rp890.146.750.297,49
- Sedangkan pada tahun 2022 terdapat koreksi ekuitas nilai persediaan senilai negatif Rp3.805.277.795,60 merupakan koreksi atas penggunaan alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- 5.6.3.2 KOREKSI EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN Rp906.996.672.086,91**
 Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp906.996.672.086,91 merupakan koreksi ekuitas perhitungan ulang akumulasi penyusutan atas kapitalisasi Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 5.6.3.3 KOREKSI EKUITAS PIUTANG Rp61.877.900,00**
 Koreksi Ekuitas Piutang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp61.877.900,00 dan senilai negatif Rp94.233.620,00 antara lain sebagai berikut:
- Koreksi atas Piutang pada Rumah Sakit Jiwa Abepura berupa Piutang atas Klaim BPJS yang telah diterima pada tahun 2022 senilai negatif Rp558.000,00
 - Koreksi atas perhitungan penyisihan piutang Pajak pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah akibat perubahan kebijakan akuntansi senilai Rp62.435.900,00
- Sedangkan Pada tahun 2022 terdapat Koreksi Ekuitas Piutang senilai negatif Rp94.233.620,00 merupakan koreksi atas penghapusan Piutang kelebihan pembayaran hutang Pengadaan Peti Jenazah dan Asesoris Tahun 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sesuai nomor kontrak 602,1/1933,2/KPS/PJA/RSU/JPR/10/2020 senilai piutang tersebut telah dihapuskan atas dasar surat pernyataan.
- 5.6.3.4 KOREKSI EKUITAS HUTANG (Rp3.104.717.397,00)**
 Koreksi Ekuitas Hutang pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing adalah senilai negatif Rp3.104.717.397,00 dan Rp207.588.517,00 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

BAB VII PENUTUP

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 (Audited) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi, kenaikan dan penurunan SAL, posisi keuangan, kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, kondisi obyektif kas, dan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
2. Pendapatan-LRA Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp3.733.670.617.987,09 atau mencapai 102,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp3.643.143.738.502,00. Hal ini berarti melebihi target pendapatan sebesar Rp90.526.879.485,09 atau 2,48%.

Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.444.887.208.362,00 atau 99,17%.

Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.040.109.011.239,40 maka realisasi Pendapatan-LRA pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.306.438.393.252,27 atau (66,18%).
3. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.031.849.735.510,84 atau 85,51% dari anggarannya sebesar Rp5.884.616.768.664,00, Sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp852.767.033.153,16 atau (14,49%).

Realisasi belanja daerah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.422.807.799.654,96 atau (56,07%) bila dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp11.454.657.535.165,80.

Belanja Operasi mempunyai proporsi 78,23% lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja modal 9,81% dan proporsi belanja tak terduga sebesar 3,26% dan proporsi belanja transfer sebesar 8,70% dari total belanja dan transfer daerah.
4. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 sebesar Rp1.794.852.986.279,57 merupakan akumulasi SILPA TA 2022. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp1.792.871.786.674,57. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp969.092.669.150,82. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 dan Lain-lain sebesar negatif Rp1.981.199.605,00 sehingga, Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 Provinsi Papua sebesar Rp969.092.669.150,82.
5. Gambaran Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2023 adalah Total Aset sebesar Rp22.258.936.680.613,80; Total Kewajiban sebesar Rp65.316.936.191,78 dan total Ekuitas sebesar Rp22.193.619.744.422,10. Total Aset merupakan gambaran kekayaan daerah per 31 Desember 2023 terdiri dari: (1) Aset Lancar sebesar Rp1.485.228.717.451,85; (2) Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.394.787.925.652,96; (3) Aset Tetap (netto) sebesar Rp14.931.515.346.029,20; (4) Dana Cadangan sebesar Rp453.016.281.601,00; dan (5) Aset Lainnya sebesar Rp3.994.388.409.878,86.
6. Pendapatan Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp3.728.123.362.600,58 dan Beban Operasional Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2023 sebesar Rp4.870.328.641.649,35. Surplus/(Defisit) dari kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar negatif Rp1.142.205.279.048,77. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp74.002.972.364,68, Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar negatif Rp1.068.202.306.684,09. Surplus Defisit dari Pos luar biasa Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2023 adalah sebesar negatif Rp163.855.515.062,69, sehingga Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.232.057.821.746,78.
7. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 menggambarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar negatif Rp804.574.054.340,95 ; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar negatif Rp19.205.063.182,80, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar negatif Rp261.814.367,00, sehingga terjadi penurunan kas pada tahun 2023 sebesar negatif Rp824.040.931.890,75. Dengan demikian, Saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Papua tahun 2023 sebesar Rp970.254.665.668,82 terdiri dari (1) saldo kas di Bendahara Umum Daerah yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp949.499.167.391,14; (2) saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.144.014.548,00; (3) saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp202.202.020,00; (4) saldo kas di bendahara BLUD RSUD sebesar Rp18.206.015.981,68; (5) saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp41.269.210,00; dan (6) saldo kas Lainnya sebesar Rp1.161.996.518,00.

8. Ekuitas awal 1 Januari 2023 sebesar Rp23.462.462.667.753,60. Surplus – LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar negatif Rp1.232.057.821.746,78 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar negatif Rp36.785.101.584,76, sehingga Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.193.619.744.422,10.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 (Audited) pada umumnya berjalan dengan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

Namun demikian kami juga menyadari dan perlu dipahami bersama, bahwa di samping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas di masa-masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Provinsi Papua dan pengabdian pada masyarakat di Tanah Papua.